

# Muhammadiyah

Dari Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas

Langsung ke: [navigasi](#), [cari](#)



Logo Muhammadiyah

**Muhammadiyah** adalah sebuah organisasi [Islam](#) yang besar di [Indonesia](#). Nama organisasi ini diambil dari nama Nabi [Muhammad](#) s.a.w.

Tujuan utama Muhammadiyah adalah mengembalikan seluruh [penyimpangan](#) yang terjadi dalam proses dakwah. Penyimpangan ini sering menyebabkan ajaran Islam bercampur-baur dengan kebiasaan di daerah tertentu dengan alasan adaptasi.

Gerakan Muhammadiyah berciri semangat membangun tata sosial dan pendidikan masyarakat yang lebih maju dan terdidik. Menampilkan ajaran Islam bukan sekadar agama yang bersifat pribadi dan statis, tetapi dinamis dan berkedudukan sebagai sistem kehidupan manusia dalam segala aspeknya. Akan tetapi, ia juga menampilkan kecenderungan untuk melakukan perbuatan yang ekstrem.

Dalam pembentukannya, Muhammadiyah banyak merefleksikan kepada perintah-perintah [Al Quran](#), diantaranya surat [Ali Imran ayat 104](#) yang berbunyi: *Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar; merekalah orang-orang yang beruntung.* Ayat tersebut, menurut para tokoh Muhammadiyah, mengandung isyarat untuk Bergeraknya umat dalam menjalankan dakwah Islam secara teorganisasi, umat yang bergerak, yang juga mengandung penegasan tentang hidup berorganisasi. Maka dalam butir ke-6 Muqaddimah Anggaran Dasar Muhammadiyah dinyatakan, *melancarkan*

*amal-usaha dan perjuangan dengan ketertiban organisasi*, yang mengandung makna pentingnya organisasi sebagai alat gerakan yang niscaya.

Sebagai dampak positif dari organisasi ini, kini telah banyak berdiri rumah sakit, panti asuhan, dan tempat pendidikan di seluruh Indonesia.

## Daftar isi

[\[sembunyikan\]](#)

- [1 Sejarah Muhammadiyah di Indonesia](#)
- [2 Daftar Pimpinan Muhammadiyah Indonesia](#)
- [3 Lihat pula](#)
- [4 Pranala luar](#)
- [5 Referensi](#)

## [\[sunting\]](#) Sejarah Muhammadiyah di Indonesia

Berdasarkan situs resmi Muhammadiyah, **Muhammadiyah** didirikan oleh [K.H. Ahmad Dahlan](#) di Kampung Kauman [Yogyakarta](#) pada tanggal 8 Dzulhijjah 1330 H/[18 November 1912](#).

Persyarikatan Muhammadiyah didirikan untuk mendukung usaha KH Ahmad Dahlan untuk memurnikan ajaran Islam yang dianggap banyak dipengaruhi hal-hal mistik. Kegiatan ini pada awalnya juga memiliki basis [dakwah](#) untuk wanita dan kaum muda berupa pengajian Sidratul Muntaha. Selain itu peran dalam pendidikan diwujudkan dalam pendirian sekolah dasar dan sekolah lanjutan, yang dikenal sebagai Hooge School Muhammadiyah dan selanjutnya berganti nama menjadi Kweek School Muhammadiyah.

Pada masa kepemimpinan Ahmad Dahlan (1912-1923), daerah pengaruh Muhammadiyah masih terbatas di karesidenan [Yogyakarta](#), [Surakarta](#), [Pekalongan](#), dan [Pekajangan](#). Selain Yogya, cabang-cabang Muhammadiyah berdiri di kota-kota tersebut pada tahun 1922. Pada tahun 1925, [Abdul Karim Amrullah](#) membawa Muhammadiyah ke [Sumatera Barat](#) dengan membuka cabang di [Sungai Batang, Agam](#). Dalam tempo yang relatif singkat, arus gelombang Muhammadiyah telah menyebar ke seluruh Sumatera Barat, dan dari daerah inilah kemudian Muhammadiyah bergerak ke seluruh [Sumatera](#), [Sulawesi](#), dan [Kalimantan](#). Pada tahun 1938, Muhammadiyah telah tersebar keseluruh Indonesia.<sup>[1]</sup>

Terdapat pula organisasi khusus wanita bernama Aisyiyah.<sup>[2]</sup>

## [\[sunting\]](#) Daftar Pimpinan Muhammadiyah Indonesia

- [KH Ahmad Dahlan 1912-1922](#)

- [KH Ibrahim 1923-1934](#)
- [KH Hisyam 1935 - 1936](#)
- [KH Mas Mansur 1937 - 1941](#)
- [Ki Bagus Hadikusuma 1942 - 1953](#)
- [Buya AR Sutan Mansur 1956](#)
- [H.M. Yunus Anis 1959](#)
- [KH. Ahmad Badawi 1962 - 1965](#)
- [KH. Faqih Usman 1968](#)
- [KH. AR Fachruddin 1971 - 1985](#)
- [KHA. Azhar Basyir, M.A. 1990](#)
- [Prof. Dr. H. M. Amien Rais 1995](#)
- [Prof. Dr. H.A. Syafii Ma'arif 1998 - 2005](#)
- [Prof. Dr. HM Din Syamsuddin 2005 - 2010](#)

## **[[sunting](#)] Lihat pula**

- [Nahdlatul Ulama](#)
- [Muallimin](#)
- [Hizbul Wathan](#)

## **[[sunting](#)] Pranala luar**

- (id) [Situs Web Resmi](#)

## **[[sunting](#)] Referensi**

1.  ^ Ahmad Syafii Maarif : *Strategi Dakwah Muhammadiyah*.  
[http://www.muhammadiyah.or.id/index2.php?option=com\\_content&do\\_pdf=1&id=471](http://www.muhammadiyah.or.id/index2.php?option=com_content&do_pdf=1&id=471)
2.  ^ Website resmi Muhammadiyah. *Sejarah Singkat Pendirian Persyarikatan Muhammadiyah*.  
[http://www.muhammadiyah.or.id/index.php?option=com\\_content&task=view&id=22&Itemid=35](http://www.muhammadiyah.or.id/index.php?option=com_content&task=view&id=22&Itemid=35) Yogyakarta: diunduh 21 Februari 2007 16:15 WIB

Muhajir : Gerakan Muhammadiyah Harus “By Design”



Arif Nur Kholis

Selasa, 01 September 2009



**Jakarta** – Rektor Univ. Muhammadiyah Malang (UMM) , Dr. Muhajir Efendy menyatakan bahwa seharusnya ke depan gerakan Muhammadiyah tidak boleh bergerak

seadanya dan alami saja, namun harus dalam sebuah perencanaan organisasi yang matang. “Gerakan Muhammadiyah harus by design, bukan sekedar by nature” terang Muhajir didepan peserta Pengkajian Ramadhan 1430 H di Gedung Pusat Dakwah Muhammadiyah, Menteng Raya 62 Jakarta, Senin (31/08/2009).

Menurut Muhajir, sebenarnya untuk bergerak Muhammadiyah sudah memiliki kekuatan yang sangat besar dalam usia menjelang satu abad ini. Untuk masuk ke abad berikutnya Muhammadiyah perlu membuat berbagai rencana perubahan. “Untuk melakukan perubahan kita harus punya kekuatan, dan Muhammadiyah sudah punya kekuatan yang sangat besar yaitu adanya kepercayaan publik” lanjut Muhajir.’

Sejalan dengan pendapat itu, Kamis (20/08/2009) Muhadjir menyatakan kepada redaksi [www.muhammadiyah.or.id](http://www.muhammadiyah.or.id) “Data jumlah anggota harus menjadi prioritas, karena hal tersebut penting untuk dapat mengetahui kekuatan Muhammadiyah secara riil, sehingga tidak ada lagi klaim-klaim pimpinan cabang atau ranting, sehingga mengaburkan kekuatan Muhammadiyah sesungguhnya,” jelasnya. (Baca : [Abad Kedua Muhammadiyah Harus Based on Data](#) ) bahwa pada Abad Kedua yang akan dilakoni Muhammadiyah sebentar lagi, juga harus dibarengi dengan pembenahan data dalam organisasi.

### **Modal Muhammadiyah**

Sementara itu, Abdul Fatah Wibisana dari Majelis Tarjih PP Muhammadiyah yang memaparkan pandangannya bersama Muhajir malam itu menyatakan bahwa modal Muhammadiyah untuk bergerak sudah cukup, bahkan untuk mencapai peradaban utama. Modal tersebut menurut sosok yang biasa dipanggil Ki Ageng tersebut adalah Faham Islam berkemajuan, organisasi yang relatif sehat , Visi dan Misi yang jelas, Sumber Daya Manusia yang memadai, memiliki pengalaman hampir seratus tahun dan memiliki citra positif.

Konsep Islam berkemajuan ini sore harinya Ketua Umum PP Muhammadiyah menerangkan adalah bentuk Islam yang menyadari bahwa Dakwah Al Khoir harus didahulukan sebelum Amar ma’ruf nahi munkar. “Bahkan saya perlu mengatakan bahwa belumlah begitu wajib melakukan amar ma’ruf nahi munkar, kalau upaya dakwah Al Khoir itu belum diupayakan dengan optimal” lanjut Din.

### **Mengukur Peran Muhammadiyah**

Ketua PP Muhammadiyah, dr Sudibyso Markus pada Selasa pagi (1/09/2009) juga membahas hal yang berkaitan dengan yang diusulkan oleh Muhajir tentang Gerakan Muhammadiyah yang berbasis perencanaan matang. Menurut Sudibyso, saat ini sedang membangun indikator yang bisa mengukur manfaat dan implikasi keberadaan Muhammadiyah di suatu tempat. “Kami baru melakukan uji coba alat ukur kami di dua desa di Yogyakarta” terang Sudibyso.

Menurut Sudibyso, semua warga Muhammadiyah harus menyadari bahwa ketika mengerti Surat Al Maun saja, kita tidak cukup semata-mata memberi makan. “Tidak cukup seperti

itu, nanti yang memberi dan yang diberi sama – sama kecewa” katanya.

“Model pengukuran yang kami lakukan akan kami pakai untuk mengukur seberapa jauh yang dilakukan Muhammadiyah” terang Sudibyo. “Asumsinya, misalnya ketika terinspirasi dari Surat Al Maun, maka dibutuhkan adanya Organisasi yang harus dibangun, nilai yang harus dibangun, dan SDM yang harus dibangun, nah itu semua sedang kami upayakan metode pengukurannya” lanjutnya.

Malam sebelumnya Abdul Fatah Wibisono menyatakan bahwa tujuan Muhammadiyah yaitu Mewujudkan Masyarakat Islam sebenar benarnya itu konsep pentahapan untuk mewujudkannya dilakukan oleh dr. Sudibyo Markus dan timnya. **(arif)**

Khittah Perjuangan dalam Kehidupan Bernegara dan Bernegara



Muhammadiyah adalah Gerakan Islam yang melaksanakan da'wah amar ma'ruf nahi munkar dengan maksud dan tujuan menegakkan dan menjunjung tinggi Agama Islam sehingga terwujud masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Muhammadiyah berpandangan bahwa Agama Islam menyangkut seluruh aspek kehidupan meliputi aqidah, ibadah, akhlaq, dan mu'amalat duniawiyah yang merupakan satu kesatuan yang utuh dan harus dilaksanakan dalam kehidupan perseorangan maupun kolektif. Dengan mengemban misi gerakan tersebut Muhammadiyah dapat mewujudkan atau mengaktualisasikan Agama Islam menjadi rahmatan lil-'alamin dalam kehidupan di muka bumi ini.

Muhammadiyah berpandangan bahwa berkiprah dalam kehidupan bangsa dan negara merupakan salah satu perwujudan dari misi dan fungsi melaksanakan da'wah amar ma'ruf nahi munkar sebagaimana telah menjadi panggilan sejarahnya sejak zaman pergerakan hingga masa awal dan setelah kemerdekaan Indonesia. Peran dalam kehidupan bangsa dan negara tersebut diwujudkan dalam langkah-langkah strategis dan taktis sesuai kepribadian, keyakinan dan cita-cita hidup, serta khittah perjuangannya sebagai acuan gerakan sebagai wujud komitmen dan tanggungjawab dalam mewujudkan "Baladun Thoyyibatun Wa Rabbun Ghafur".

Bahwa peran dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dapat dilakukan melalui dua strategi dan lapangan perjuangan. Pertama, melalui kegiatan-kegiatan politik yang berorientasi pada perjuangan kekuasaan/kenegaraan (real politics, politik praktis) sebagaimana dilakukan oleh partai-partai politik atau kekuatan-kekuatan politik formal di tingkat kelembagaan negara. Kedua, melalui kegiatan-kegiatan kemasyarakatan yang bersifat pembinaan atau pemberdayaan masyarakat maupun kegiatan-kegiatan politik tidak langsung (high politics) yang bersifat mempengaruhi kebijakan negara dengan perjuangan moral (moral force) untuk mewujudkan kehidupan yang lebih baik di tingkat masyarakat dan negara sebagaimana dilakukan oleh kelompok-kelompok kepentingan

(interest groups).

Muhammadiyah secara khusus mengambil peran dalam lapangan kemasyarakatan dengan pandangan bahwa aspek kemasyarakatan yang mengarah kepada pemberdayaan masyarakat tidak kalah penting dan strategis daripada aspek perjuangan politik kekuasaan. Perjuangan di lapangan kemasyarakatan diarahkan untuk terbentuknya masyarakat utama atau masyarakat madani (civil society) sebagai pilar utama terbentuknya negara yang berkedaulatan rakyat. Peran kemasyarakatan tersebut dilakukan oleh organisasi-organisasi kemasyarakatan seperti halnya Muhammadiyah. Sedangkan perjuangan untuk meraih kekuasaan (power struggle) ditujukan untuk membentuk pemerintahan dalam mewujudkan tujuan negara, yang perannya secara formal dan langsung dilakukan oleh partai politik dan institusi-institusi politik negara melalui sistem politik yang berlaku. Kedua peranan tersebut dapat dijalankan secara objektif dan saling terkait melalui bekerjanya sistem politik yang sehat oleh seluruh kekuatan nasional menuju terwujudnya tujuan negara.

Muhammadiyah sebagai organisasi sosial-keagamaan (organisasi kemasyarakatan) yang mengemban misi da'wah amar ma'ruf nahi munkar senantiasa bersikap aktif dan konstruktif dalam usaha-usaha pembangunan dan reformasi nasional sesuai dengan khittah (garis) perjuangannya serta tidak akan tinggal diam dalam menghadapi kondisi-kondisi kritis yang dialami oleh bangsa dan negara. Karena itu, Muhammadiyah senantiasa terpenggil untuk berkiprah dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dengan berdasarkan pada khittah perjuangan sebagai berikut:

Muhammadiyah meyakini bahwa politik dalam kehidupan bangsa dan negara merupakan salah satu aspek dari ajaran Islam dalam urusan keduniawian (al-umur ad-dunyawiyat) yang harus selalu dimotivasi, dijiwai, dan dibingkai oleh nilai-nilai luhur agama dan moral yang utama. Karena itu diperlukan sikap dan moral yang positif dari seluruh warga Muhammadiyah dalam menjalani kehidupan politik untuk tegaknya kehidupan berbangsa dan bernegara.

Muhammadiyah meyakini bahwa negara dan usaha-usaha membangun kehidupan berbangsa dan bernegara, baik melalui perjuangan politik maupun melalui pengembangan masyarakat, pada dasarnya merupakan wahana yang mutlak diperlukan untuk membangun kehidupan di mana nilai-nilai Ilahiah melandasi dan tumbuh subur bersamaan dengan tegaknya nilai-nilai kemanusiaan, keadilan, perdamaian, ketertiban, kebersamaan, dan keadaban untuk terwujudnya "Baladun Thayyibatun Wa Rabbun Ghafur".

Muhammadiyah memilih perjuangan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara melalui usaha-usaha pembinaan atau pemberdayaan masyarakat guna terwujudnya masyarakat madani (civil society) yang kuat sebagaimana tujuan Muhammadiyah untuk mewujudkan masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Sedangkan hal-hal yang berkaitan dengan kebijakan-kebijakan kenegaraan sebagai proses dan hasil dari fungsi politik pemerintahan akan ditempuh melalui pendekatan-pendekatan secara tepat dan bijaksana sesuai prinsip-prinsip perjuangan kelompok kepentingan yang efektif dalam kehidupan negara yang

demokratis.

Muhammadiyah mendorong secara kritis atas perjuangan politik yang bersifat praktis atau berorientasi pada kekuasaan (*real politics*) untuk dijalankan oleh partai-partai politik dan lembaga-lembaga formal kenegaraan dengan sebaik-baiknya menuju terciptanya sistem politik yang demokratis dan berkeadaban sesuai dengan cita-cita luhur bangsa dan negara. Dalam hal ini perjuangan politik yang dilakukan oleh kekuatan-kekuatan politik hendaknya benar-benar mengedepankan kepentingan rakyat dan tegaknya nilai-nilai utama sebagaimana yang menjadi semangat dasar dan tujuan didirikannya negara Republik Indonesia yang diproklamasikan tahun 1945.

Muhammadiyah senantiasa memainkan peranan politiknya sebagai wujud dari dakwah amar ma'ruf nahi munkar dengan jalan mempengaruhi proses dan kebijakan negara agar tetap berjalan sesuai dengan konstitusi dan cita-cita luhur bangsa. Muhammadiyah secara aktif menjadi kekuatan perekat bangsa dan berfungsi sebagai wahana pendidikan politik yang sehat menuju kehidupan nasional yang damai dan berkeadaban.

Muhammadiyah tidak berafiliasi dan tidak mempunyai hubungan organisatoris dengan kekuatan-kekuatan politik atau organisasi manapun. Muhammadiyah senantiasa mengembangkan sikap positif dalam memandang perjuangan politik dan menjalankan fungsi kritik sesuai dengan prinsip amar ma'ruf nahi munkar demi tegaknya sistem politik kenegaraan yang demokratis dan berkeadaban.

Muhammadiyah memberikan kebebasan kepada setiap anggota Persyarikatan untuk menggunakan hak pilihnya dalam kehidupan politik sesuai hati nurani masing-masing. Penggunaan hak pilih tersebut harus merupakan tanggungjawab sebagai warga negara yang dilaksanakan secara rasional dan kritis, sejalan dengan misi dan kepentingan Muhammadiyah, demi kemaslahatan bangsa dan negara.

Muhammadiyah meminta kepada segenap anggotanya yang aktif dalam politik untuk benar-benar melaksanakan tugas dan kegiatan politik secara sungguh-sungguh dengan mengedepankan tanggung jawab (*amanah*), akhlak mulia (*akhlaq al-karimah*), keteladanan (*uswah hasanah*), dan perdamaian (*ishlah*). Aktifitas politik tersebut harus sejalan dengan upaya memperjuangkan misi Persyarikatan dalam melaksanakan da'wah amar ma'ruf nahi munkar.

Muhammadiyah senantiasa bekerjasama dengan pihak atau golongan mana pun berdasarkan prinsip kebajikan dan kemaslahatan, menjauhi kemudharatan, dan bertujuan untuk membangun kehidupan berbangsa dan bernegara ke arah yang lebih baik, maju, demokratis dan berkeadaban.

# **Khithah Perjuangan Muhammadiyah**

Ditulis oleh [immfaiuad](#) di/pada Februari 18, 2009

## **HAKIKAT MUHAMMADIYAH**

Perkembangan masyarakat Indonesia, baik yang disebabkan oleh daya dinamik dari dalam ataupun karena persentuhan dengan kebudayaan dari luar, telah menyebabkan perubahan tertentu. Perubahan itu menyangkut seluruh segi kehidupan masyarakat, diantaranya bidang sosial, ekonomi, politik dan kebudayaan, yang menyangkut perubahan struktural dan perubahan pada sikap serta tingkah laku dalam hubungan antar manusia.

Muhammadiyah sebagai gerakan, dalam mengikuti perkembangan dan perubahan itu, senantiasa mempunyai kepentingan untuk melaksanakan amar ma'ruf nahi-mungkar, serta menyelenggarakan gerakan dan amal usaha yang sesuai dengan lapangan yang dipilihnya ialah masyarakat, sebagai usaha Muhammadiyah untuk mencapai tujuannya: "menegakkan dan menjunjung tinggi Agama Islam sehingga terwujud masyarakat utama, adil dan makmur yang diridloi Allah SWT.

Dalam melaksanakan usaha tersebut, Muhammadiyah berjalan diatas prinsip gerakannya, seperti yang dimaksud di dalam Matan Keyakinan Cita-cita Hidup Muhammadiyah.

Keyakinan dan Cita-Cita Hidup Muhammadiyah itu senantiasa menjadi landasan gerakan Muhammadiyah, juga bagi gerakan dan amal usaha dan hubungannya dengan kehidupan masyarakat dan ketatanegaraan, serta dalam bekerjasama dengan golongan Islam lainnya.

## **MUHAMMADIYAH DAN MASYARAKAT**

Sesuai dengan khittahnya, Muhammadiyah sebagai Persyarikatan memilih dan menempatkan diri sebagai Gerakan Islam amar-ma'ruf nahi mungkar dalam masyarakat, dengan maksud yang terutama ialah membentuk keluarga dan masyarakat sejahtera sesuai dengan Dakwah Jamaah.

Di samping itu Muhammadiyah menyelenggarakan amal-usaha seperti tersebut pada Anggaran Dasar Pasal 4, dan senantiasa berikhtiar untuk meningkatkan mutunya

Penyelenggaraan amal-usaha, tersebut merupakan sebagian ikhtiar Muhammadiyah untuk mencapai Keyakinan dan Cita-Cita Hidup yang bersumberkan ajaran Islam dan bagi usaha untuk terwujudnya masyarakat utama, adil dan makmur yang diridloi Allah SWT.

## **MUHAMMADIYAH DAN POLITIK**

Dalam bidang politik Muhammadiyah berusaha sesuai dengan khittahnya: dengan dakwah amar ma ma'ruf nahi mungkar dalam arti dan proporsi yang sebenar-benarnya, Muhammadiyah harus dapat membuktikan secara teoritis konsepsionil, secara operasional

dan secara kongkrit riil, bahwa ajaran Islam mampu mengatur masyarakat dalam Negara Republik Indonesia yang berdasar Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945 menjadi masyarakat yang adil dan makmur serta sejahtera, bahagia, materiil dan spirituil yang diridloi Allah SWT. Dalam melaksanakan usaha itu, Muhammadiyah tetap berpegang teguh pada kepribadiannya

Usaha Muhammadiyah dalam bidang politik tersebut merupakan bagian gerakannya dalam masyarakat, dan dilaksanakan berdasarkan landasan dan peraturan yang berlaku dalam Muhammadiyah.

Dalam hubungan ini Muktamar Muhammadiyah ke-38 telah menegaskan bahwa:

Muhammadiyah adalah Gerakan Dakwah Islam yang beramal dalam segala bidang kehidupan manusia dan masyarakat, tidak mempunyai hubungan organisatoris dengan dan tidak merupakan afiliasi dari sesuatu Partai Politik atau Organisasi apapun

Setiap anggota Muhammadiyah sesuai dengan hak asasinya dapat tidak memasuki atau memasuki organisasi lain, sepanjang tidak menyimpang dari Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam Persyarikatan Muhammadiyah.

## MUHAMMADIYAH DAN UKHUWAH ISLAMIIYAH

Sesuai dengan kepribadiannya, Muhammadiyah akan bekerjasama dengan golongan Islam manapun juga dalam usaha menyiarkan dan mengamalkan Agama Islam serta membela kepentingannya.

Dalam melakukan kerjasama tersebut, Muhammadiyah tidak bermaksud menggabungkan dan mensubordinasikan organisasinya dengan organisasi atau institusi lainnya.

## DASAR PROGRAM MUHAMMADIYAH

Berdasarkan landasan serta pendirian tersebut di atas dan dengan memperhatikan kemampuan dan potensi Muhammadiyah dan bagiannya, perlu ditetapkan langkah kebijaksanaan sebagai berikut:

Memulihkan kembali Muhammadiyah sebagai Persyarikatan yang menghimpun sebagian anggota masyarakat, terdiri dari muslimin dan muslimat yang beriman teguh, ta'at beribacalah, berakhlac mulia, dan menjadi teladan yang baik di tengah-tengah masyarakat.

Meningkatkan pengertian dan kematangan anggota Muhammadiyah tentang hak dan kewajibannya sebagai warga negara, dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia dan meningkatkan kepekaan sosialnya terhadap persoalan-persoalan dan kesulitan hidup masyarakat

Menetapkan kedudukan Persyarikatan Muhammadiyah sebagai gerakan untuk melaksanakan dakwah amar-ma'ruf nahi-mungkar ke segenap penjuru dan lapisan masyarakat serta di segala bidang kehidupan di Negara Republik Indonesia yang berdasar Pancasila dan Undang- Undang Dasar 1945.

Keputusan Muktamar Muhammadiyah ke-40 di Surabaya .

**Jumat, 2009 Februari 27**

### **Faktor Modal Sosial Gerakan Muhammadiyah**

**Almisar Hamid,**

Dosen FISIP Univ Muhammadiyah Jakarta.

Muhammadiyah--salah satu gerakan dakwah Islam terbesar di Indonesia selain NU--pada 5-8 Maret 2009 ini akan mengadakan tanwir di Lampung. Tanwir adalah pertemuan nasional di bawah muktamar. Para pesertanya adalah pimpinan wilayah (level propinsi), pimpinan majelis dan lembaga (badan-badan pembantu organisasi), serta pimpinan organisasi-organisasi otonom (ortom), seperti Aisyiyah, Pemuda Muhammadiyah, IMM, dan IPM. Agenda Tanwir Muhammadiyah ini biasanya mengangkat persoalan aktual, baik di dalam Muhammadiyah maupun di luarnya (umat Islam dan bangsa Indonesia). Di dalam Muhammadiyah, yang aktual adalah banyaknya kader terjun ke politik praktis. Sedangkan di luar Muhammadiyah, tentang pemilu (masalah bangsa) dan dunia Islam masih sekitar kebiadaban Israel terhadap bangsa Palestina. Apakah tanwir mengusung agenda tersebut? Itu bisa terlihat dari tema tanwir tersebut, yakni *Muhammadiyah membangun visi dan karakter bangsa*.

Melalui tanwir ini diharapkan, Muhammadiyah makin kokoh sebagai gerakan kultural, gerakan membangun masyarakat melalui modal sosial, dan tidak tergoa dengan politik praktis yang rawan konflik juga kepentingan. Bagaimana modal sosial menjadi kekuatan dalam gerakan Muhammadiyah? Lebih dahulu ada baiknya melihat perjalanan gerakan Dakwah *Amar Ma'ruf Nahi Mungkar*, begitu kader Muhammadiyah menyebutnya.

Menurut kalender hijriyah, tahun 1430 H ini Muhammadiyah telah memasuki usia seratus tahun (satu abad). Sekadar untuk diketahui, gerakan dakwah ini resmi berdiri pada 8 zulhijah 1330 H/bertepatan pada 18 November 1912 M di Kota Yogyakarta.

Seabad adalah suatu usia yang sangat panjang jika dibandingkan anak manusia. Jika anak manusia itu masih ada, umumnya mereka sudah tergolek di tempat tidur dan tidak

mandiri lagi. Berbeda dengan anak manusia, Muhammadiyah seperti lambangnya, matahari bersinar, tampaknya terus memancarkan sinarnya, tidak hanya di bumi Indonesia, tetapi juga mencapai wilayah ASEAN lainnya, Eropa, dan Timur Tengah.

Luasnya pancaran sinar Muhammadiyah tidak lepas dari jasa para pemimpin, yang mendapat kepercayaan dari jamaahnya atau warganya untuk memimpin organisasi gerakan kultural ini. Sejak gerakan dakwah ini didirikan sudah tercatat 14 orang yang menjadi nakhoda gerakan modern Islam, begitu Deliar Noer menyebutnya. Mereka adalah KH Ahmad Dahlan (1912-1923), KH Ibrahim (1923-1932), KH Hisyam (1932-1936), KH Mas Mansur (1936-1942), Ki Bagus Hadikusumo (1942-1953), AR Sutan Mansur (1952-1959), HM Yunus Anis (1959-1968), KH Ahmad Badawi (1962-1968), KH Fakhri Usman/HAR Fakhruddin (1968-1971), HAR Fakhruddin (1971-1990), KH Ahmad Azhar Basyir, MA (1990-1995), HM Amien Rais/HA Syafii Maarif (1995-2000), HA Syafii Maarif (2000-2005), dan Din Syamsuddin (2005-2010).

Perjuangan KH Ahmad Dahlan dalam mendirikan Muhammadiyah seperti perjuangan para nabi (nabi-nabi), tidaklah ringan. Saudagar santri itu, begitu Zaim Uchrwi menyebutnya (*Republika*, 26/12/2008), pernah dituduh sudah kafir karena membangun sekolah model sekolah-sekolah Belanda. Sementara itu, sekolah-sekolah Indonesia yang umumnya pesantren, tidak memiliki kurikulum pelajaran sains (aljabar, ilmu ukur, kimia, fisika, biologi, kedokteran, dan lain-lain).

Penting diketahui, pelajaran sains tersebut adalah milik umat Islam. Penemunya semua umat Islam pada abad pertengahan (dinasti Umayyah dan Abbasiyah). Ilmuwan Eropa mengembangkan ilmu itu ketika mereka belajar pada ilmuan Islam, terutama di Andalusia (bagian dari negara Spanyol sekarang).

Jadi, tidak heran bila KH Ahmad Dahlan iri dengan sekolah-sekolah Belanda dan menirunya melalui sekolah-sekolah Muhammadiyah. Inilah yang disebut Prof Amien Rais sebagai barang hilangnya kaum Muslimin (Ilmu pengetahuan) yang harus direbut kembali (Jurnal Media Inovasi No.1/1996). Dalam tulisannya, *Tauhid Sosial: Doktrin Perjuangan Muhammadiyah*--doktrin ini dapat dikatakan sebagai penyubur gerakan (penulis)--Amien mengangkat empat doktrin perjuangan Muhammadiyah dan salah satunya adalah doktrin Pencerahan Umat. Amien mengatakan, para pendahulu tokoh Muhammadiyah tidak pernah bosan mengingatkan, masyarakat Islam Indonesia bahwa ilmu pengetahuan adalah barang hilangnya kaum Muslimin yang harus direbut kembali.

Pada tahap awal pertumbuhannya, Muhammadiyah, menurut Amien, tidak membangun kongsi-kongsi dagang, tetapi membangun sekolah sebanyak mungkin. Pertimbangannya terlalu jelas, yakni kebodohan telah menjadi musuh terbesar umat Islam dan mustahil umat Islam dapat membangun masa depan yang lebih baik, jika kebodohan dan keterbelakangan tetap saja melekat lengket dalam kehidupan mereka. Lewat doktrin *enlightenment* bagi umat Islam, Muhammadiyah merintis sekolah umum sebanyak-banyaknya.

Seperti dikemukakan di atas, tulisan ini mencoba mengangkat bagaimana faktor modal

sosial (*social capital*) menjadi kekuatan di dalam gerakan Muhammadiyah. Sehingga, organisasi gerakan dakwah ini mampu melakukan modernisasi dan pembangunan, jauh lebih dahulu dari negara, terutama melalui pendidikan.

Penting diketahui, sejak beberapa tahun terakhir ini ramai dibahas tentang modal sosial. Melalui kekuatan modal sosial ini diharapkan dapat meringankan beban pembangunan di Indonesia yang selama ini mengandalkan modal finansial dan modal manusia atau *human capital*.

Apa itu modal sosial? Dalam bukunya yang terkenal, *Trust: The Social Virtues and The Creation of Prosperity* (1995), Fukuyama berhasil meyakinkan bahwa modal sosial memiliki kekuatan untuk memengaruhi prinsip-prinsip yang melandasi kemajuan ekonomi dan kesejahteraan sosial suatu negara. Negara-negara yang dikategorikan sebagai *high trust societies*, menurut Fukuyama, cenderung memiliki keberhasilan ekonomi yang mengagumkan. Sebaliknya, *low trust societies* cenderung memiliki kemajuan dan perilaku ekonomi yang lebih lamban dan inferior.

Fukuyama (1995; 1999) dalam Edi Suharto (2008) mendefinisikan modal sosial sebagai seperangkat norma atau nilai informal yang dimiliki bersama oleh para anggota suatu kelompok yang memungkinkan terjalinnya kerja sama di antara mereka. Kunci dari modal sosial adalah *trust* atau kepercayaan. Dengan *trust*, lanjut Fukuyama, orang-orang bisa bekerja sama dengan baik. Karena, ada kesediaan di antara mereka untuk menempatkan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi.

*Trust* bagaikan energi yang dapat membuat kelompok masyarakat atau organisasi dapat bertahan. *Trust* yang rendah mengakibatkan banyak energi terbuang karena digunakan untuk mengatasi konflik yang berkepanjangan. Mengacu pada pandangan Fukuyama tentang modal sosial, menarik disimak pertumbuhan dan perkembangan Muhammadiyah lewat amal usahanya yang tidak sedikit, terutama dengan adanya sekolah-sekolah. Meminjam pandangan Amien Rais, di Muhammadiyah itu sudah lama tertanam doktrin yang disebutnya 'menggembirakan amal saleh'. Dalam benak warga Muhammadiyah, ujar Amien, fungsi organisasi antara lain untuk memobilisasikan atau dalam bahasa Muhammadiyah, untuk menggembirakan amal saleh kolektif. Menurut penulis, dilihat dari perspektif ini, lahirnya Muhammadiyah pada satu abad yang lalu merupakan terobosan besar.

Sebelum Muhammadiyah lahir, umat Islam sudah terbiasa menggerakkan amal saleh dalam berbagai bidang kehidupan, akan tetapi hanya bersifat kecil-kecilan di atas inisiatif individual belaka. Setelah Muhammadiyah lahir, kemampuan dan semangat beramal dari berbagai individu Muslim dipadukan lewat sebuah organisasi. Karena di organisasi, lewat pembagian kerja yang rapih, umat Islam dapat melakukan lompatan-lompatan amal saleh secara kuantitatif dan kualitatif. Apa yang tidak mungkin dikerjakan melalui kemampuan individual, akhirnya dapat dilaksanakan dengan bagus lewat organisasi. Dan, organisasi itu bernama Muhammadiyah.

Menurut mantan ketua MPR itu, sampai sekarang, semangat beramal saleh tetap kuat

menghujam dalam sikap hidup kalangan warga Muhammadiyah. Dilihat dari sisi modal sosial, terbangunnya gerakan amal saleh--di antaranya untuk mendirikan sekolah-sekolah--melalui kekuatan jamaah di Muhammadiyah, antara lain merupakan *trust* atau kepercayaan dari jamaah kepada pemimpin-pemimpin Muhammadiyah yang umumnya hidup sederhana atau jauh dari bermewah-mewah, jauh dari korupsi, ikhlas, tekun bekerja, dan tidak banyak bicara. Oleh karena itu, jika berharap membangun melalui modal sosial, seyogyanya pemimpin bangsa ini belajar dari kehidupan pemimpin Muhammadiyah di atas. Dengan demikian, kepercayaan rakyat akan tumbuh sehingga mereka rela berkorban demi negeri tercinta ini. *Wallahu a'lam bis showwab.*

(-)

# Ikatan Remaja Muhammadiyah

Dari Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas

Langsung ke: [navigasi](#), [cari](#)



**Artikel ini perlu [dirapikan](#) agar memenuhi standar Wikipedia**

Merapikan artikel bisa berupa membagi artikel ke dalam paragraf atau [wikifikasi artikel](#).

Setelah dirapikan, tolong hapus pesan ini.

IKATAN REMAJA MUHAMMADIYAH

## SEJARAH IRM

Ikatan Remaja Muhammadiyah (IRM) merupakan metamorfosis dari Ikatan Pelajar Muhammadiyah (IPM) yang berdiri tahun 1961. Interpretasi sejarah bisa jadi berbeda-beda dalam memandang perubahan nama dari Ikatan Pelajar Muhammadiyah ke Ikatan Remaja Muham-madiyah. Namun, proses sejarah organisasi ini memang tidak sederhana.

Latar belakang berdirinya IPM tidak terlepas kaitannya dengan latar belakang berdirinya Muham-madiyah sebagai gerakan dakwah Islam amar ma'ruf nahi mungkar yang ingin melakukan pemurnian terhadap pengamalan ajaran Islam, sekaligus sebagai salah satu konsekuensi dari banyaknya sekolah yang merupakan amal usaha Muhammadiyah untuk membina dan mendidik kader. Oleh karena itulah dirasakan perlu hadirnya Ikatan Pelajar Muhammadiyah sebagai organisasi para pelajar yang terpanggil kepada misi Muhammadiyah dan ingin tampil sebagai pelopor, pelangsuper penyempurna perjuangan Muhammadiyah.

Jika dilacak jauh ke belakang, sebenarnya upaya para pelajar Muhammadiyah untuk mendirikan organisasi pelajar Muhammadiyah sudah dimulai jauh sebelum Ikatan Pelajar Muhammadiyah berdiri pada tahun 1961. Pada tahun 1919 didirikan Siswo Projo yang

merupakan organisasi persatuan pelajar Muham-madiyah di Madrasah Mu'allimin Muhammadiyah Yogyakarta. Pada tahun 1926, di Malang dan Surakarta berdiri GKPM (Gabungan Keluarga Pelajar Muham-madiyah). Selanjutnya pada tahun 1933 berdiri Hizbul Wathan yang di dalamnya berkumpul pelajar-pelajar Muhammadiyah.

Setelah tahun 1947, berdirinya kantong-kantong pelajar Muhammadiyah untuk beraktivitas mulai mendapatkan resistensi dari berbagai pihak, termasuk dari Muhammadiyah sendiri. Pada tahun 1950, di Sulawesi (di daerah Wajo) didirikan Ikatan Pelajar Muhammadiyah, namun akhirnya dibubarkan oleh pimpinan Muhammadiyah setempat. Pada tahun 1954, di Yogyakarta berdiri GKPM yang berumur 2 bulan karena dibubarkan oleh Muhammadiyah. Selanjutnya pada tahun 1956 GKPM kembali didirikan di Yogyakarta, tetapi dibubarkan juga oleh Muhammadiyah (yaitu Majelis Pendidikan dan Pengajaran Muhammadiyah). Setelah GKPM dibubarkan, pada tahun 1956 didirikan Uni SMA Muhammadiyah yang kemudian merencanakan akan mengadakan musyawarah se-Jawa Tengah. Akan tetapi, upaya ini mendapat tantangan dari Muhammadiyah, bahkan para aktifisnya diancam akan dikeluarkan dari sekolah Muhammadiyah bila tetap akan meneruskan rencananya. Pada tahun 1957 juga berdiri IPSM (Ikatan Pelajar Sekolah Muhammadiyah) di Surakarta, yang juga mendapatkan resistensi dari Muhammadiyah sendiri.

Resistensi dari berbagai pihak, termasuk Muhammadiyah, terhadap upaya mendirikan wadah atau organisasi bagi pelajar Muhammadiyah sebenarnya merupakan refleksi sejarah dan politik di Indonesia yang terjadi pada awal gagasan ini digulirkan. Jika merentang sejarah yang lebih luas, berdirinya IPM tidak terlepas kaitannya dengan sebuah background politik umat Islam secara keseluruhan. Ketika Partai Islam MASYUMI berdiri, organisasi-organisasi Islam di Indonesia merapatkan sebuah barisan dengan membuat sebuah deklarasi (yang kemudian terkenal dengan Deklarasi Panca Cita) yang berisikan tentang satu kesatuan umat Islam, bahwa umat Islam bersatu dalam satu partai Islam, yaitu Masyumi; satu gerakan mahasiswa Islam, yaitu Himpunan Mahasiswa Islam (HMI); satu gerakan pemuda Islam, yaitu Gerakan Pemuda Islam Indonesia (GPII); satu gerakan pelajar Islam, yaitu Pelajar Islam Indonesia (PII); dan satu Kepanduan Islam, yaitu Pandu Islam (PI). Kesepakatan bulat organisasi-organisasi Islam ini tidak dapat bertahan lama, karena pada tahun 1948 PSII keluar dari Masyumi yang kemudian diikuti oleh NU pada tahun 1952. Sedangkan Muhammadiyah tetap bertahan di dalam Masyumi sampai Masyumi membubarkan diri pada tahun 1959. Bertahannya Muhammadiyah dalam Masyumi akhirnya menjadi mainstream yang kuat bahwa deklarasi Panca Cita hendaknya ditegakkan demi kesatuan umat Islam Indonesia. Di samping itu, resistensi dari Muhammadiyah terhadap gagasan IPM juga disebabkan adanya anggapan yang merasa cukup dengan adanya kantong-kantong angkatan muda Muhammadiyah, seperti Pemuda Muhammadiyah dan Nasyi'atul 'Aisyiyah, yang cukup bisa mengakomodasikan kepentingan para pelajar Muhammadiyah.

Dengan kegigihan dan kemantapan para aktifis pelajar Muhammadiyah pada waktu itu untuk membentuk organisasi kader Muhammadiyah di kalangan pelajar akhirnya mulai mendapat titik-titik terang dan mulai menunjukkan keberhasilannya, yaitu ketika pada tahun 1958 Konferensi Pemuda Muhammadiyah Daerah di Garut berusaha melindungi aktivitas

para pelajar Muhammadiyah di bawah pengawasan Pemuda Muhammadiyah. Mulai saat itulah upaya pendirian organisasi pelajar Muhammadiyah dilakukan dengan serius, intensif, dan sistematis. Pembicaraan-pembicaraan mengenai perlunya berdiri organisasi pelajar Muhammadiyah banyak dilakukan oleh Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah dengan Pimpinan Pusat Muhammadiyah.

Dengan keputusan konferensi Pemuda Muhammadiyah di Garut tersebut akhirnya diperkuat pada Mukhtar Pemuda Muhammadiyah ke II yang berlangsung pada tanggal 24-28 Juli 1960 di Yogyakarta, yaitu dengan memutuskan untuk membentuk Ikatan Pelajar Muhammadiyah (Keputusan II/No. 4). Keputusan tersebut di antaranya ialah sebagai berikut :

Mukhtar Pemuda Muhammadiyah meminta kepada Pimpinan Pusat Muhammadiyah Majelis Pendidikan dan Pengajaran supaya memberi kesempatan dan menyerahkan kompetensi pembentukan IPM kepada PP Pemuda Muhammadiyah. Mukhtar Pemuda Muhammadiyah mengamanatkan kepada Pimpinan Pusat Muhammadiyah untuk menyusun konsepsi Ikatan Pelajar Muhammadiyah (IPM) dari pembahasan-pembahasan mukhtar tersebut, dan untuk segera dilaksanakan setelah mencapai kesepakatan pendapat dengan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Majelis Pendidikan dan Pengajaran.

Kata sepakat akhirnya dapat tercapai antara Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah dengan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Majelis Pendidikan dan Pengajaran tentang organisasi pelajar Muhammadiyah. Kesepakatan tersebut dicapai pada tanggal 15 Juni 1961 yang ditandatangani bersama antara Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah dengan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Majelis Pendidikan dan Pengajaran. Rencana pendirian IPM tersebut dimatangkan lagi dalam Konferensi Pemuda Muhammadiyah di Surakarta tanggal 18-20 Juli 1961, dan secara nasional melalui forum tersebut IPM dapat berdiri. Tanggal 18 Juli 1961 ditetapkan sebagai hari kelahiran Ikatan Pelajar Muhammadiyah.

Perkembangan IPM akhirnya bisa memperluas jaringan sehingga bisa menjangkau seluruh sekolah-sekolah Muhammadiyah yang ada di Indonesia. Pimpinan IPM (tingkat ranting) didirikan di setiap sekolah Muhammadiyah. Berdirinya Pimpinan IPM di sekolah-sekolah Muhammadiyah ini akhirnya menimbulkan kontradiksi dengan kebijakan pemerintah Orde Baru dalam UU Keormasan, bahwa satu-satunya organisasi siswa di sekolah-sekolah yang ada di Indonesia hanyalah Organisasi Siswa Intra-Sekolah (OSIS). Sementara di sekolah-sekolah Muhammadiyah juga terdapat organisasi pelajar Muhammadiyah, yaitu IPM. Dengan demikian, ada dualisme organisasi pelajar di sekolah-sekolah Muhammadiyah. Bahkan pada Konferensi Pimpinan Wilayah IPM tahun 1992 di Yogyakarta, Menteri Pemuda dan Olahraga saat itu (Akbar Tanjung) secara khusus dan implisit menyampaikan kebijakan pemerintah kepada IPM, agar IPM melakukan penyesuaian dengan kebijakan pemerintah.

Dalam situasi kontra-produktif tersebut, akhirnya Pimpinan Pusat IPM membentuk team eksistensi yang bertugas secara khusus menyelesaikan permasalahan ini. Setelah dilakukan pengkajian yang intensif, team eksistensi ini merekomendasikan perubahan

nama dari Ikatan Pelajar Muhammadiyah ke Ikatan Remaja Muhammadiyah. Perubahan ini bisa jadi merupakan sebuah peristiwa yang tragis dalam sejarah organisasi, karena perubahannya mengandung unsur-unsur kooptasi dari pemerintah. Bahkan ada yang mengang-gap bahwa IPM tidak memiliki jiwa heroisme sebagai-mana yang dimiliki oleh PII yang tetap tidak mau menga-kui Pancasila sebagai satu-satunya asas organisasinya.

Namun sesungguhnya perubahan nama tersebut merupakan blessing in disguise (rahmat tersembunyi). Perubahan nama dari IPM ke IRM sebenarnya semakin memperluas jaringan dan jangkauan organisasi ini yang tidak hanya menjangkau pelajar, tetapi juga basis remaja yang lain, seperti santri, anak jalanan, dan lain-lain.

Keputusan pergantian nama ini tertuang dalam Surat Keputusan Pimpinan Pusat IPM Nomor VI/PP.IPM/1992, yang selanjutnya disahkan oleh Pimpinan Pusat Muhammadiyah pada tanggal 18 Nopember 1992 melalui Surat Keputusan Pimpinan Pusat Muham-madiyah Nomor 53/SK-PP/IV.B/1.b/1992 tentang pergantian nama Ikatan Pelajar Muhammadiyah menjadi Ikatan Remaja Muhammadiyah. Dengan demikian, secara resmi perubahan IPM menjadi IRM adalah sejak tanggal 18 Nopember 1992.

### AGENDA AKSI

GERAKAN SEKOLAH KADER GERAKAN IQRA' GERAKAN PARLEMEN  
PELAJAR

MAKSUD DAN TUJUAN "TERBENTUKNYA REMAJA MUSLIM YANG BERAKHLAQ MULIA, BERILMU, DAN TERAMPIL DALAM RANGKA MENEGAKKAN DAN MENJUNJUNG TINGGI NILAI-NILAI AJARAN ISLAM SEHINGGA TERWUJUDNYA MASYARAKAT ISLAM YANG SEBENAR-BENARNYA"

## **[[sunting](#)] Jaringan IRM**

Susunan organisasi IRM dibuat secara berjenjang dari tingkat Pimpinan Pusat, Pimpinan Wilayah, Pimpinan Daerah, Pimpinan Cabang, dan tingkat Ranting. Pimpinan Pusat adalah kesatuan wilayah-wilayah dalam ruang lingkup nasional. Pimpinan Wilayah adalah kesatuan daerah-daerah dalam tingkat propinsi atau daerah tingkat I. Pimpinan Daerah adalah kesatuan cabang-cabang dalam tingkat kabupaten/kotamadia atau daerah tingkat II. Sedangkan Pimpinan Cabang adalah kesatuan ranting-ranting dalam satu kecamatan. Pimpinan Ranting adalah kesatuan anggota-anggota dalam satu sekolah, desa/kelurahan atau tempat lainnya. Saat ini, Ikatan Remaja Muhammadiyah telah menjangkau seluruh wilayah Indonesia.

TINJAUAN ORGANISATORIS IRM

1) IRM sebagai Organisasi Maksud dan tujuan IRM adalah “terbentuknya remaja muslim yang berakhlak mulia dan berilmu dalam rangka menegakkan, menjunjung tinggi nilai-nilai ajaran Islam sehingga terwujudnya masyarakat utama, adil dan makmur yang diridloi Allah swt” (Pasal 3 AD/ART). Keanggotaan IRM sebagai organisasi adalah keanggotaan REMAJA. Pada Anggaran Dasar Pasal 5 tentang anggota, anggota IRM adalah: a) remaja muslim yang bersekolah di perguruan Muhammadiyah tingkat SMP/ sederajat dan/atau SMA/ sederajat; b) remaja muslim yang berusia 12 tahun dan maksimal 21 tahun; c) mereka yang pernah menjadi anggota sebagaimana tersebut dalam ketentuan a dan b yang diperlukan oleh organisasi dengan usia maksimal 24 tahun. Adapun syarat menjadi anggota IRM disebutkan dalam Anggaran Rumah Tangga IRM Bab II Pasal 2 sebagai berikut. a) Remaja muslim WNI, yang menyetujui maksud dan tujuan IRM, bersedia mendukung kebijakan organisasi dan berperan aktif melaksanakan tugas IRM dapat diterima menjadi anggota. b) Pelajar yang bersekolah di perguruan Muhammadiyah tingkat SMP/ sederajat dan/atau SMA/ sederajat. Kewajiban anggota bahwa setiap anggota berkewajiban untuk menaati dan menjalankan AD dan ART serta menaati segala peraturan dan kebijakan organisasi. Adapun hak-hak anggota IRM adalah: a) memberikan saran dan menyatakan pendapat demi kebaikan organisasi b) memberikan suara c) memberikan saran untuk kebaikan d) memilih dan dipilih e) mendapatkan pembinaan dari IRM Jaringan struktural IRM secara berjenjang dari tingkat Pimpinan Pusat, Pimpinan Wilayah, Pimpinan Daerah, Pimpinan Cabang, dan Pimpinan Ranting. Dalam hal permusyawaratan, dalam IRM mengenal Mukhtamar, Konferensi Pimpinan Wilayah (Konpiwil), Musyawarah Wilayah (Musywil), Konferensi Pimpinan Daerah (Konpida), Musyawarah Daerah (Musyda), Konferensi Pimpinan Cabang (Konpicab), Musyawarah Cabang (Musycab), Konferensi Pimpinan Ranting (Konpiran), dan Musyawarah Ranting (Musyran). Permusyawaratan lain yang perlu diketahui adalah Mukhtamar Luar Biasa, yaitu mukhtamar yang diselenggarakan apabila keberadaan ikatan terancam dibubarkan yang Konpiwil tidak berwenang untuk memutuskan dan tidak dapat ditangguhkan sampai mukhtamar berikutnya. Permusyawaratan dapat berlangsung tanpa me-mandang jumlah yang hadir, asal yang bersangkutan telah diundang secara sah. Keuangan merupakan vitalitas bagi wujud gerak maupun amal usaha. Keuangan mampu menyetir langkah usaha suatu organisasi. Keuangan merupakan kekayaan dan aset modal usaha organisasi. Keuangan IRM secara jelas diatur dalam AD/ART, keuangan IRM diperoleh dari dana abadi, iuran anggota, uang pangkal, dan sumber lain yang halal dan tidak mengikat. Demikian pula IRM mendapat bantuan rutin dari pimpinan Muhammadiyah setingkat.

2) Prinsip Dasar Organisasi: IRM Ikatan Remaja Muhammadiyah (IRM) adalah salah satu organisasi otonom persyarikatan Muhammadiyah yang merupakan gerakan Islam, dakwah amar ma’ruf nahi mungkar di kalangan remaja, berakidah Islam, dan bersumber pada Al-Quran dan As-Sunnah. Organisasi ini didirikan dengan maksud dan tujuan sebagaimana tersebut di atas, yaitu dalam Pasal 3 AD/ART Mukhtamar IRM XIII. Pencapaian maksud dan tujuan tersebut dilakukan dengan upaya-upaya sebagai berikut: a) Menanamkan kesadaran beragama Islam, memperteguh iman, menertibkan peribadatan dan mempertinggi akhlak. b) Mempertinggi dan memperdalam pemahaman agama Islam untuk mendapatkan kemurnian dan kebenarannya. c) Memperdalam, memajukan dan meningkatkan ilmu pengetahuan, teknologi dan budaya. d) Membimbing, membina, dan

menggerakkan anggota guna meningkatkan fungsi dan peran IRM sebagai kader persyarikatan, umat dan bangsa dalam menunjang pembangunan manusia seutuhnya menuju terbentuknya masyarakat utama, adil dan makmur yang diridloi Allah swt. e) Meningkatkan amal salih dan kepedulian terhadap nilai-nilai kemanusiaan. f) Segala usaha yang tidak menyalahi ajaran Islam dengan mengindahkan hukum dan falsafah yang berlaku.

WEB SITE IRM [http:// Sejarah Ringkas dan Misi Muhammadiyah](http://Sejarah Ringkas dan Misi Muhammadiyah)

[www.irm.or.id/](http://www.irm.or.id/) GROUPS [remaja-kritis@yahoo.com](mailto:remaja-kritis@yahoo.com)

[Napak](#)

[Tilas](#)



[IPM](#)

Saturday, 11 October 2008 04:46

NAPAK TILAS ipm dan IRM

### **Sejarah Perjuangan IRM**

Latar belakang berdirinya IPM tidak terlepas dari latar belakang berdirinya Muhammadiyah sebagai Gerakan Dakwah Islam Amal Ma'ruf Nahi Munkar dan sebagai kensekuensi dari banyaknya sekolah yang merupakan amal usaha Muhammadiyah untuk membina dan mendidik kader.

Di samping itu situasi dan kondisi politik di Indonesia pada era rahun 1956-an, dimana pada masa ini merupakan masa kejayaan PKI dan masa Orde lama. Muhammadiyah menghadapi tantangan yang sangat berat dari berbagai pihak. Sehingga karena itulah dirasakan perlu adanya dukungan terutama untuk menegakkan dan menjalankan misi Muhammadiyah. Oleh karena itu kehadiran Ikatan Pelajar Muhammadiyah sebagai organisasi para pelajar yang terpanggil pada misi Muhammadiyah dan ingin tampil sebagai pelopor, pelangsung dam penyempurna perjuangan Muhammadiyah.

Upaya dan keinginan pelajar Muhammadiyah untuk mendirikan organisasi pelajar Muhammadiyah telah dirintis sejak tahun 1919. Akan tetapi selalu saja mendapat halangan dan rintangan dari berbagai pihak, termasuk oleh Muhammadiyah sendiri. Aktivitas pelajar Muhammadiyah untuk membentuk kader organisasi Muhammadiyah di kalangan pelajar akhirnya mendapat titik –titik terang dan mulai menunjukkan keberhasilannya, yaitu ketika pada tahun 1958, Konferensi Pemuda Muhammdiyah di garut menempatkan organisasi pelajar Muhammmadiyah di bawah pengawasan Pemuda Muhammadiyah.

Keputusan Konferensi Pemuda Muhammadiyah di Garut tersebut diperkuat pada

Muktamar Pemuda Muhammadiyah II yang berlangsung pada tanggal 24-28 Juli 1960 di Yogyakarta yakni dengan memutuskan untuk membentuk IPM (Keputusan II/ no.4).

Keputusan tersebut antara lain adalah sebagai berikut :

Muktamar meminta kepada PP Muhammadiyah Majelis Pendidikan bagian Pendidikan dan pengajaran supaya memberi kesempatan dan mengerahkan Kompetensi Pembentukan IPM kepada Pemuda Muhammadiyah.

Muktamar mengamanahkan kepada PP Pemuda Muhammadiyah untuk menyusun konsepsi Ikatan Pelajar Muhammadiyah dan untuk segera dilaksanakan setelah mencapai persesuaian pendapat dengan PP Muhammadiyah Majelis Pendidikan dan Pegajaran.

Setelah ada kesepakatan antara PP Pemuda Muhammadiyah dan PP Muhammadiyah Majelis Pendidikan dan Pengajaran pada tanggal 15 Juni 1961 ditandatangani peraturan bersama tentang organisasi Ikatan Pelajar Muhammadiyah.

Rencana pendirian IPM tersebut dimatangkan lagi di dalam Konferensi Pemuda Muhammadiyah di Surakarta tanggal 18-20 Juli 1961 dan secara nasional melalui forum tersebut IPM dapat berdiri dengan Ketua Umum **Herman Helmi farid Ma'ruf**, Sekretaris Umum **Muhammad Wirsyam Hasan**.

Ditetapkan pula pada tanggal 5 Shafar 1381 bertepatan tanggal 18 Juli 1961 M sebagai hari kelahiran Ikatan Pelajar Muhammadiyah.

Irm Dari Masa Ke Masa

### **A. Tahun 1961-1966**

Pada tahun ini PP IPM masih dalam pengawasan PP Pemuda Muhammadiyah, dan bersama-sama PP Pemuda Muhammadiyah berusaha mendirikan IPM di seluruh Indonesia. Pendirian IPM di seluruh Indonesian ini didukung oleh instruksi PP Pemuda Muhammadiyah no.4 tahun 1962 tertanggal 4 Februari 1962 yang berisi Instruksi kepada Pemuda Muhammadiyah daerah se-Indonesia agar membentuk IPM di daerahnya masing-masing.

### **B. Tahun 1966-1969**

Musyawah Nasional Ikatan Pelajar Muhammadiyah I dilaksanakan pada tanggal 18-24 November 1966 di Jakarta dengan menghasilkan keputusan antara lain :

Membentuk PP IPM caretaker yakni pimpinan terdahulu yang bertugas melaksanakan

tugas kepemimpinan IPM tingkat pusat sampai terbentuknya PP IPM yang baru.

Menunjuk tim formatur yang terdiri dari Anwar Bey, M. Dfahmi Ms, M. Wirsyam dan unsur PP Muhammadiyah. Akan tetapi sebelas bulan kemudian baru terbentuk PP IPM dengan **Ketua Umum Moh. Wirsyam Hasan, Sekretaris Umum Imam Ahmadi.**

Menetapkan Muqadimah Anggaran Dasar IPM dan Anggaran Dasar.

Merumuskan Khittah Perjuangan IPM

Pada masa ini aktivis IPM pada umumnya ikut terlibat dalam mengantisipasi perkembangan politik Indonesia. Banyak Aktivis IPM turut terlibat dalam mengantisipasi perkembangan Politik Indonesia. Banyak aktivis IPM yang tergabung dalam KAPPI (Kesatuan Aksi Pelajar Pemuda Indonesia). Satu instruksi yang dikeluarkan PP IPM berkaitan dengan KAPPI ditunjukkan kepada daerah-daerah agar terlibat secara aktif di dalam KAPPI. Di samping itu di dalam Muktamar IPM ke-2 di Palembang dikeluarkan memorandum yang menyatakan bahwa IPM dari tingkat pusat sampai daerah akan tetap merupakan komponen aktif KAPPI masih tetap dapat menjaga kemurnian perjuangannya.

Tidak kalah pentingnya ditetapkan Sistem Pengkaderan IPM hasil seminar kader tanggal 20-23 Agustus 1969 di Palembang. Sejak inilah mulai dikenal istilah Taruna Melati, MABITA (Masa Bimbingan Anggota – yang kemudian berubah menjadi MABICA), Coaching Instruktur.

Pada periode ini eksistensi IPM digoyang dalam Tanwir Muhammadiyah tanggal 19-21 September 1968. Akan tetapi berkat argumentasi PP IPM dan dukungan AMM lain, akhirnya eksistensi IPM tetap dapat dipertahankan

### **C. Tahun 1969-1972**

Munas/Muktamar II Palembang dilaksanakan pada tanggal 27-30 Agustus 1969 menyepakati adanya penyempurnaan Khittah Perjuangan dengan dilengkapi Tafsir Khittah, Identitas, Tafsir Identitas, dan Tafsir Asas dan Tujuan IPM.

Pada periode yang dipimpin oleh **Muhsin Sulaiman** sebagai Ketua Umum, dan **Ahmad Masuku** sebagai Sekretaris Umum berhasil ditetapkan lagu Mars IPM dan Himne IPM sebagai lagu resmi IPM.

#### **D. Tahun 1972-1975**

Muktamar III IPM di Surabaya melakukan penyempurnaan terhadap tafsir Khittah Perjuangan IPM, tafsir identitas IPM dan menghasilkan tafsir asas dan tujuan IPM serta teori perjuangan IPM. Juga menunjuk **Abdul Shomad Karim dan Faisal sebagai Ketum dan Sekum.**

Pada Konpiwil 1973 ditetapkan sebagai pedoman pengkaderan IPM pengganti pedoman terdahulu yang ditetapkan pada Muktamar II di Palembang.

Dalam periode ini aktivitas IPM banyak kemunduran, orientasi program nasionalnya yaitu: “Memantapkan IPM sebagai organisasi dakwah dan partisipasi dalam pembangunan nasional”.

#### **E. Tahun 1975-1978**

Muktamar IPM IV yang dilaksanakan di Ujung Pandang tanggal 23-26 Agustus 1975 mengambil tema “ Membina dan Meningkatkan Peranan IPM sebagai Gerakan Dakwah di Kalangan Pelajar” dan menghasilkan program kerja nasional IPM dengan orientasi; meningkatkan partisipasi IPM dalam pembangunan nasional, dengan usaha antara lain: Aktif dalam usaha menanggulangi *drop out*, menggalakkan kepramukaan, meningkatkan studi pelajar, dan menanggulangi kenakalan remaja dan pemberantasan penyalahgunaan narkotika.

Pada tanggal 24-26 Desember 1976 hasil Konpiwil 1973 dikaji ulang dan direvisi dalam seminar kader IPM di Tomang Jakarta.

Sebagai **Ketum adalah Gafaruddin dan Sekum Faisal Noor.**

#### **F. Tahun 1979 – 1983**

Muktamar IPM V dilaksanakan di Jakarta pada tanggal 17 – 11 Juli 1979 dengan mengambil tema: “Generasi muda agamis dan pelajar modal pembangunan bangsa”. Berhasil terpilih **Asnawi Syar ini sebagai Ketum dan maulana Yusuf Widodo sebagai Sekum.**

Dalam Mukatamar IPM V ditetapkan antara lain:

IPM tetap berfungsi sebagai organisasi ekstra dan intra sekolah.

IPM sebagai organisasi pembina dan pengembangan pelajar yang agamis dan terpelajar sebagai modal pembangunan bangsa.

Meningkatkan partisipasi IPM dalam pembangunan nasional:

Mendukung program-program pemerintah dalam pembinaan dan pembangunan generasi muda.

Meminta pada pemerintah untuk memperketat pengawasan dan pencedaran film serta mass media lain yang memuat gambar tidak senonoh demi menjauhkan generasi muda dari bahaya moral.

Orientasi program IPM adalah studi, kepemimpinan dan dakwah.

### **G. Tahun 1983 – 1986**

Muktamar IPM VI sedianya akan diselenggarakan di Purwakarta Jawa Tengah urung dilaksanakan karena tidak mendapat ijin pemerintah. Mulai saat itulah masalah nama Ikatan Pelajar Muhammadiyah menjadi permasalahan di tingkat pusat. Akhirnya Muktamar IPM VI diselenggarakan secara terbatas di Yogyakarta tanggal 30 september – 2 Oktober 1983. Adapun sasaran program yang hendak dicapai adalah:

Terbinanya anggota IPM yang berdedikasi terhadap IPM.

Terbinanya IPM sebagai organisasi otonom Muhammadiyah yang memiliki mutu dan efektivitas dalam menyelenggarakan kepemimpinannya untuk mencapai tujuan.

Terbinanya peran serta aktif IPM sebagai ortom dalam fungsinya sebagai pelopor, pelangsung, peyempurna amal usaha Muhammadiyah serta berintegrasi dalam Angkatan Muda Muhammadiyah lainnya.

Di bawah kepemimpinan **Masyhari Makhasi dan Ismail Ts Siregar** focus utama kegiatan dalam pembina ke dalam dengan melakukan konsolidasi organisasi sampai tingkat bawah. Pada periode ini SPI kembali diperbaharui melalui forum seminar dan Lokalnya Pengkaderan tahun 1985 di Ujung Pandang, dilakukan pula pengembangan materi pengkaderan yang ada.

## **H. Tahun 1986 – 1989**

Muktamar IPM VII dapat terselenggara tanggal 26 – 30 April 1986 di Cirebon dengan tema: “Memantapkan gerakan IPM dalam membangun akhlak mulia dan memupuk kreatifitas pelajar”. Periode ini memiliki tujuan umum program nasional yaitu terciptanya tradisi keilmuan dan kreatifitas di kalangan anggota yang dijiwai oleh akhlak mulia sehingga menjadi teladan di lingkungannya.

Tidak kurang beberap konsep dihasilkan pada periode ini seperti Sistem Dakwah Pelajar yang berisi komponen Mabica, Maperta, Pekan Dakwah, Latihan Da’i. Di samping disusun pula Sistem Administrasi IPM.

Pada periode kepemimpinan Khoiruddin Bashory dan Azwir Alimuddin ini masalah nama IPM masih menjadi agenda penting dan belum menunjukkan hasil sehingga berakibat gagalnya rencana penyelenggaraan Muktamar VIII di Medan yang diganti menjadi Muktamar Terbatas (silaturahmi pimpinan) di Yogyakarta.

## **Tahun 1990 – 1993**

Di bawah kepemimpinan **M. Jamaluddin Ahmad dan Zainul Arifin AU**, menghasilkan Konsep Pengembangan Sumber Daya Manusia, Latihan Penelitian, Pembentukan KIR, Pengelolaan Studi Islami.

Muktamar terbatas yang mengambil tema; “ Mengembangkan gerak IPM dalam membina akhlak dan kreatifitas pelajar menuju masyarakat utama” memberikan arahan program dengan target:

Meningkatkan kualitas hidup anggota IPM dan pelajar pada umumnya dengan usaha peningkatan penghayatan hidup yang tertib ibadah, tertib belajar dan tertib berorganisasi.

Meletakkan kerangka mekanisme kepemimpinan dan keorganisasian yang semakin mantap untuk melakukan pembinaan tahap berikutnya.

## **Perubahan IPM ke IRM**

Dalam Konpiwil IPM 1992 Yogyakarta, Menpora Akbar Tanjung secara implisit menyampaikan kebijakan pemerintah pada IPM untuk melakukan penyesuaian tubuh

organisasi.

Usai Konpiwil PP IPM diminta Depdagri mengisi formulir direktori organisasi dengan disertai catatan agar pada waktu pengambilan formulir tersebut nama IPM telah berubah.

Karenanya PP IPM yang sebelumnya telah mengangkat tim eksistensi yang bertugas menyelesaikan masalah ini melakukan pembicaraan intensif. Akhirnya diputuskan perubahan nama Ikatan Pelajar Muhammadiyah menjadi Ikatan Remaja Muhammadiyah.

Dengan pertimbangan:

Keberadaan remaja sebagai kader persyarikatan, umat dan bangsa selama ini belum mendapat perhatian sepenuhnya dari persyarikatan Muhammadiyah.

Perlunya pengembangan jangkauan IPM

Adanya kebijakan pemerintah RI tentang tidak diperbolehkannya penggunaan kata “Pelajar” untuk organisasi berskala nasional.

Keputusan pergantian nama oleh PP IPM ini tertuang dalam SK PP IPM Nomor VI/PP.IPM/ 1992, yang selanjutnya perubahan tersebut disajikan oleh Pimpinan Pusat Muhammadiyah tanggal 22 Jumadil Awal 1413 H/18 November 1992 M melalui SK No. 53/SK-PP/IV.B/1.b/1992 tentang pergantian nama (Ikatan Pelajar Muhammadiyah menjadi Ikatan Remaja Muhammadiyah).

Dengan demikian secara resmi perubahan IPM menjadi IRM adalah sejak tanggal 18 November 1992.

## **J. Tahun 1993 – 1995**

Setelah perubahan nama, maka Mukhtamar IRM pertama tanggal 3-7 Agustus 1993. Dengan pertimbangan nilai historis Mukhtamar itu disebut dengan Mukhtamar IRM IX yang bertepatan “Aktualisasi Gerak IRM dalam peningkatan kualitas remaja muslim menghadapi PJPT II”.

Mukhtamar yang berlangsung meriah dan dihadiri sekitar 700 orang utusan dari seluruh tanah air berhasil menetapkan Anggaran Dasar, Khittah Perjuangan, Kepribadian IRM, Garis-Garis Besar Kebijakan IRM, Pimpinan Pusat periode 1993-1995 (**Ketua Athailah A. Latief dan Sekretaris Arief Budiman**) dan beberapa rekomendasi.

Termasuk dalam keputusan Mukhtamar adalah menetapkan sasaran utama program jangka panjang yaitu upaya menciptakan tradisi keilmuan yang berwawasan iptek dan tradisi

berkarya kreatif yang dijiwai akhlak mulia dalam rangka membentuk sumber daya remaja yang potensial sehingga mampu menjadi modal utama bagi terbentuknya komunitas remaja yang islami dan menjadi pelopor di lingkungannya. Sasaran tersebut dilaksanakan secara bertahap, berencana dan berkesinambungan selama empat periode Muktamar.

Pada periode Muktamar IX (1993-1995) aktifitas IRM diarahkan kepada upaya penataan mekanisme gerakan yang kondusif bagi terciptanya tradisi keilmuan yang berwawasan iptek dan berkarya kreatif yang dijiwai akhlak mulia.

Pada Konpiwil IRM tahun 1994 di Kendal ditetapkan Anggaran Rumah Tangga dan setelah itu dilakukan penataan pimpinan dengan pergantian sekretaris yaitu M. Irfan Islami dan perubahan susunan personalia lainnya. Pada periode ini telah berhasil pula ditetapkan Anggaran Rumah Tangga, penyempurnaan Sistem Pengkaderan IRM, Pedoman Administrasi, Lagu Mars IRM dan peraturan-peraturan penting lainnya.

#### **K. Tahun 1996 –1998**

Muktamar X di Surakarta pada tanggal 11 – 15 maret 1996 dengan agenda pendukung acara yang sangat menarik adalah BASIRA (Bakti Silaturahmi Remaja) yang terdiri dari Perkampungan Kerja dan Pelatihan Kepemimpinan Pelajar Muhammadiyah Se Indonesia. Muktamar ini memilih **Izzul Muslimin sebagai Ketua dan sekretaris Iwan Setiawan Ar Rozie**. Periode Muktamar X diarahkan pada upaya pemantapan mekanisme gerakan yang kondusif bagi terciptanya tradisi keilmuan yang berwawasan iptek dan tradisi berkarya kreatif yang dijiwai akhlak mulia. Pada periode ini terumuskan garis-garis besar kebijakan IRM (GBK IRM) yang mencakup tentang pola dasar kebijakan dan pola dasar kebijakan IRM jangka panjang. Periode 1996 – 1998 ini mulai dirintis adanya lembaga khusus PP IRM seperti LAPSI, Bina Mentari, Alifah, Bengkel Seni Ufuk dan Lembaga dakwah. Dalam jumlah personel pengurus boleh paling sedikit yang hanya berkisar 15 orang PP IRM, nanti pada Konpiwil Palembang 1997 terjadi penambahan pengurus dengan memasukkan anggota pimpinan.

#### **L. Tahun 1998 – 2000**

Muktamar XI di Makassar pada tanggal 21 –24 Mei 1998 Di makassar mengambil tema; “ Mentradisikan Ilmu, Mengembangkan Karya, Menuju Prestasi” dengan **Ketua Taufiqurrahman dan Sekretaris Raja Juli Ahntoni**. Yang diarahkan pada upaya pengembangan program yang mendukung terciptanya tradisi keilmuan yang berwawasan

iptek dan tradisi berkarya kreatif yang dijiwai akhlak mulia. Muktamar XI ini sangatlah bersejarah dalam benak seluruh kader IRM dimana pada tanggal 21 Mei 1998 bersamaan dengan pembukaan Muktamar juga terjadi proses pergantian kepemimpinan nasional dengan pengunduran diri Presiden Soeharto. Selain itu IRM kembali menegaskan komitmennya sebagai gerakan dakwah amar ma'ruf nahi munkar tidak berpolitik praktis dalam Deklarasi Makassar, juga terjadi perubahan AD dan ART IRM, terumuskannya agenda aksi seperti sekolah kader, gerakan pendampingan agama Islam, gerakan advokasi remaja selain itu perintisan kerjasama dengan pihak Founding menjadi kerja-kerja periode ini seperti terlibatnya IRM dalam JPPR dalam program Pemilu 1999.

## **M. Tahun 2000 – 2002**

Tanggal 8 – 11 Juli 2000 di Jakarta adalah Muktamar IRM ke 12 yang merupakan Muktamar gabungan dengan Muhammadiyah, Aisyiah, Nasyiatul Aisyiah dan IRM, Muktamar yang dihadiri seluruh utusan pimpinan wilayah IRM ini membahas dan menetapkan penetapan kembali nama IRM setelah melauli perdebatan yang panjang setelah adanya usulan pengembalian nama IPM. Dalam Muktamar ke – 12 ini ditetapkan antara lain:

Dasar-Dasar Gerakan IRM atau Paradigma Gerakan IRM

Kepribadian IRM

Kepribadian Kader IRM

Perubahan Struktur Bidang IRM

Pada Muktamar ini bidang Irmawati ditiadakan, Bidang Organisasi dan Hikmah dan Advokasi merupakan bidang tambahan dari struktur IRM. Tema yang diangkat adalah “Meneguhkan jati Diri, Merapatkan barisan Menuju Indonesia Baru” ini menetapkan **Raja Juli Antoni sebagai Ketua Umum** dalam pemilihan langsung yang merupakan model pemilihan baru di IRM dan **Arif Jamali Muis sebagai Sekretaris Jendral**. Pada Muktamar ini pula penyusunan kebijakan IRM jangka panjang tahap kedua ditetapkan selama empat kali pelaksanaan Muktamar dimulai dari periode muktamar XII sampai Muktamar XV dimana masing-masing tahapan memiliki sasaran khusus dalam kerangka sasaran jangka panjang yaitu:

Muktamar XII : diarahkan pada penataan dan pemantapan gerak organisasi dengan mengusahakan kemandirian/otonomisasi dan pengembangan program-program advokasi kepelajaran/ keremajaan yang muatan-muatannya antara lain adalah memupuk kepekaan sosial politik, etos intelektual dan nilai-nilai moral kepada remaja/ pelajar.

Muktamar XIII : diarahkan kepada pengembangan gerakan untuk mencapai daya tawar (bargaining position) IRM yang kuat dengan mengusahakan sikap kritisisme organisasi pengembangan program-program pemberdayaan yang memuat antara lain penyadaran politik, amaliah transformatif dan penguasaan IPTEK.

Muktamar XIV : diarahkan kepada pengembangan gerakan untuk mewujudkan gerakan IRM sebagai kekuatan transformatif di masyarakat dengan mengusahakan penguasaan program-program alternatif pemberdayaan.

Muktamar XV : diarahkan kepada pengembangan gerakan menuju internasionalisasi gerakan dengan mengupayakan bentuk pemberdayaan yang dapat menguatkan daya saing yang antara lain bermuatan penguasaan IPTEK dan keterampilan professional.

Dimana Muktamar XII diarahkan pada penataan dan pemantapan gerak organisasi dengan mengusahakan kemandirian/otonomisasi dan pengembangan program-program advokasi kepelajaran/keremajaan yang muatan-muatannya antara lain adalah memupuk kepekaan sosial politik, etos intelektual dan nilai-nilai moral kepada remaja/pelajar. Dimana pada periode ini semakin terlihat kerjasama dengan pihak Founding dengan beberapa agenda program di antaranya SRATK (Studi Refleksi Aktif tanpa Kekerasan). Penerbitan Buletin Retas dan Pelatihan Sadar Gender.

Selain itu adanya program pendampingan anak korban konflik Maluku dengan pembentukan relawan pada TOT paralegal, Peluncuran Album ke-2 lagu-lagu IRM. Dan tak kalah pentingnya adanya rekonstruksi Sistem Perkaderan pada acara Seminar dan Lokakarya Nasional Sistem Perkaderan IRM tanggal 20 –24 April 2002 di Kota makassar.

## **N. Tahun 2002 –2004**

“Membangun Kesadaran Kritis Remaja Sebagai Subjek Perubahan” adalah tema yang diangkat pada Muktamar ke-13 Di Yogyakarta pada tanggal 10 – 13 Oktober 2002, dimana disahkannya Khittah Perjuangan IRM atas penyesuaian dari dasar-dasar perjuangan IRM hasil Muktamar ke-12 serta revisi AD dan ART IRM. Pada Muktamar ini pula penyusunan kebijakan IRM jangka panjang tahap kedua mengalami perubahan sasaran umum dari sebelumnya, yaitu:

Muktamar XII : diarahkan pada penataan dan pemantapan gerak organisasi dengan mengusahakan kemandirian atau otonomisasi dan pengembangan program-program advokasi kepelajaram/ keremajan yang muatan-muatannya antara lain adalah memupuk kepeakaan sosial politik, etos intelektual dan nilai-nilai moral kepada remaja/pelajar.

Muktamar XIII : Diarahkan kepada mentradisikan kesadaran kritis di kalangan pelajar

dan remaja melalui pengembangan nilai-nilai advokasi, kaderisasi dan penguatan infrastruktur.

Muktamar XIV : diarahkan kepada pengembangan gerakan untuk mewujudkan gerakan IRM sebagai kekuatan transformatif di masyarakat dengan mengusahakan pengayaan program-program alternatif pemberdayaan.

Muktamar XV : diarahkan kepada pengembangan gerakan untuk menuju internasionalisasi gerakan dengan mengupayakan bentuk pemberdayaan yang dapat menguatkan daya saing yang antara lain bermuatan penguasaan IPTEK dan keterampilan professional.

Dalam pemilihan langsung Muktamar XIII ini menetapkan **Munawwar Khalil selaku Ketua Umum dan Husnan Nurjuman selaku Sekretaris Jendral.**

Diantara berbagai pekerjaan besar yang menjadi amanat Muktamar XIII dalam periode ini antara lain :

Sosialisasi hasil lokakarya sistem perkaderan IRM yang diorientasikan pada pembentukan kader Ikatan yang memiliki kesadaran kritis dan berbagai kegiatan pengkaderan yang juga diorientasikan kepada pembentukan kader kritis.

Gerakan advokasi pada periode ini telah sampai pada fase pendampingan dan pembentukan komunitas advokasi. Hal ini diawali dengan perencanaan Gerakan Parlemen Remaja.

Gerakan infrastruktur juga tetap menjadi prioritas. Hal ini diimplementasikan dengan berbagai perumusan dan penyesuaian berbagai mekanisme organisasi mensikapi berbagai perubahan dan perkembangan baik internal organisasi dengan perubahan struktur dan system pembinaan jaringan, maupun hal eksternal seperti otonomi daerah. Hal tersebut disikapi dengan Pedoman Pembentukan Peleburan dan Pemekaran Organisasi (P4O) IRM dan Penyesuaian Pedoman Administrasi IRM.

## FASE PERJALANAN IRM

Sejarah perkembangan IRM, sejak dari kelahiran Ikatan Pelajar Muhammadiyah (IPM) hingga kemudian terjadinya perubahan nama menjadi Ikatan Remaja Muhammadiyah (IRM) pada tahun 1992 telah melampaui proses yang panjang seiring dengan dinamika yang berkembang di masyarakat baik dalam skala nasional maupun global. Hingga saat ini IRM telah melampaui tiga fase perkembangan:

### Fase Pembentukan (**mulai tahun 1961 s/d 1976**)

Kelahiran IPM bersamaan dengan masa dimana pertentangan ideologis menjadi gejala yang menonjol dalam kehidupan sosial dan politik di Indonesia dan dunia pada waktu itu. Keadaan yang demikian menyebabkan terjadinya polarisasi kekuatan tidak hanya persaingan kekuasaan di dalam lembaga pemerintahan, bahkan juga dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam situasi seperti ini IPM lahir dan berproses membentuk dirinya. Maka sudah menjadi kewajaran bila pada saat keberadaannya IPM banyak berfokus pada upaya untuk mengkonsolidasi dan menggalang Kesatuan Pelajar Muhammadiyah yang tersebar di Seluruh Indonesia ke dalam wadah IPM.

Upaya untuk menemukan karakter dan jati diri IPM sebagai gerakan kader dan dakwah banyak menjadi perhatian pada waktu itu. Upaya ini mulai dapat terwujud setelah IPM dapat merumuskan Khittah perjuangan IPM, Identitas IPM, dan Pedoman Pengkaderan IPM (hasil Musyawarah Nasional/ Muktamar IPM ke-2 di Palembang tahun 1969). Fase pembentukan IPM diakhiri pada tahun 1976, yaitu dengan keberhasilan IPM merumuskan system perkaderan IPM (SPI) hasil seminar Tomang tahun 1976 di Jakarta. Dengan SPI yang telah dirumuskan tersebut, maka semakin terwujudlah bentuk struktur keorganisasian IPM secara lebih nyata sebagai organisasi kader dan dakwah yang otonom dari persyarikatan Muhammadiyah.

### Fase Penataan (**mulai tahun 1976 s/d tahun 1992**)

IPM memasuki fase penataan ketika bangsa Indonesia tengah bersemangat mencanangkan pembangunan ekonomi sebagai panglima, dan memandang bahwa gegap gempita persaingan ideologi dan politik harus segera di akhiri jika bangsa Indonesia ingin memajukan dirinya. Situasi pada saat itu menghendaki adanya monoloyalitas tunggal dalam berbangsa dan bernegara dengan mengedepankan stabilitas nasional sebagai syarat pembangunan yang tidak bisa ditawar lagi. Dalam keadaan seperti ini menjadikan organisasi-organisasi yang berdiri sejak masa sebelum orde baru harus dapat menyesuaikan diri. Salah satu kebijakan pemerintah yang kemudian berimbas bagi IPM adalah tentang ketentuan OSIS sebagai satu-satunya organisasi pelajar yang eksis di sekolah. Keadaan ini menyebabkan IPM mengalami kendala dalam upaya mengembangkan keberadaannya secara lebih leluasa dan terbuka.

Di samping itu, masyarakat pun mengalami perubahan kecenderungan sebagai akibat dari kebijakan massa mengambang yang menghendaki dilepaskannya masyarakat dari situasi persaingan dan polarisasi ideologi dan politik. Dalam situasi seperti ini akhirnya terjadi sikap apatis pada sebagian masyarakat terhadap organisasi warna ideologi yang kental. Muhammadiyah meskipun tidak terlibat dalam aktifitas politik praktis tetap mengalami dampak sikap apatis tersebut. Akibatnya aktifitas yang dilakukan memang lebih bersifat pembinaan internal dan kegiatan dakwah sosial yang tidak terlalu kentara membawa misi

ideologis.

Dalam keadaan demikian IPM lebih memfokuskan aktifitasnya pada pembinaan kader dengan menekankan kegiatan kaderisasi untuk mencetak kader IPM yang berkualitas. IPM menyadari bahwa pola pembinaan kader tidak hanya cukup dengan melaksanakan aktifitas perkaderan dalam bentuk training-training semata. Permasalahan muncul ketika masyarakat pelajar sedang mengalami kegairahan religiitas. Banyak anggota dan kader-kader IPM yang telah dibina kemudian berbalik arah meninggalkan organisasinya menuju kelompok kajian keislaman yang lebih menarik perhatian dan mampu memenuhi keinginannya. Maka dalam masa ini IPM mulai menata diri dengan memberikan perhatian kepada aktifitas-aktifitas bidang pengkajian dan pengembangan dakwah, bidang Ipmawati serta bidang pengkajian Ilmu pengetahuan dan pengembangan keterampilan dengan porsi perhatian yang sama besar dengan bidang perkaderan.

Agenda permasalahan IPM yang membutuhkan perhatian khusus untuk segera dipecahkan pada waktu itu adalah tentang keberadaan IPM secara nasional yang dipermasalahkan oleh pemerintah karena OSIS-lah satu-satunya organisasi pelajar yang diakui eksistensinya di sekolah. Konsekuensinya semua organisasi yang menggunakan kata pelajar harus diganti dengan nama lain. Pada awalnya IPM dan beberapa organisasi pelajar sejenis berusaha tetap konsisten dengan nama pelajar dengan berharap ada peninjauan kembali kebijaksanaan pemerintah tersebut pada masa mendatang. Namun konsistensi itu ternyata membawa dampak kerugian yang tidak sedikit bagi IPM karena kemudian kegiatan IPM secara nasional seringkali mengalami hambatan dan kesulitan penyelenggaraannya. Di samping itu beberapa organisasi pelajar yang lain yang senasib dengan IPM satu persatu mulai menyesuaikan diri, sehingga IPM merasa sendirian memperjuangkan konsistensinya.

Pada sisi lain IPM merasa perlu untuk segera memperbaharui visi dan orientasi serta mengembangkan gerak organisasinya secara lebih luas dari ruang lingkup kepelajaran memasuki ke dunia keremajaan sebagai tuntutan perubahan dan perkembangan zaman. Maka pada tanggal 18 November 1992 berdasarkan SK PP Muhammadiyah No. 53/SK-PP/IV.B/1.b/1992 Ikatan Pelajar Muhammadiyah secara resmi berubah nama menjadi Ikatan Remaja Muhammadiyah.

**Fase Pengembangan ( mulai tahun 1992 sampai dengan 2002 ).**

Perubahan nama IPM menjadi IRM beriringan dengan suasana pada saat nama bangsa Indonesia tengah menyelesaikan PJPT I, dan akan memasuki PJPT II. Banyak kemajuan yang telah diperoleh Bangsa Indonesia sebagai hasil PJPT I, diantaranya adalah pertumbuhan ekonomi yang semakin baik dan pesat, stabilitas nasional yang semakin mantap, dan tingkat pendidikan, kesehatan dan sosial ekonomi masyarakat yang semakin baik. Namun demikian ada beberapa pekerjaan rumah yang harus segera diselesaikan

bangsa Indonesia pada PJPT II, antara lain, masalah pemerataan pembangunan dan kesenjangan ekonomi, demokratisasi, ketertinggalan di bidang iptek, permasalahan sumber daya manusia, dan penegakan hukum dan kedisiplinan.

Sementara itu, era 90-an ditandai pula dengan semakin maraknya kesadaran berislam diberbagai kalangan masyarakat muslim di Indonesia. Disamping itu peran dan partisipasi ummat Islam dalam kehidupan berbangsa dan bernegara juga semakin meningkat. Kondisi yang demikian memberi peluang bagi IRM untuk dapat berkiprah lebih baik lagi.

Pada sisi lain, kemajuan teknologi komunikasi dan informasi semakin membawa manusia kearah globalisasi yang membwa banyak perubahan pada berbagai sisi kehidupan manusia. Tatanan sosial, budaya, politik, dan ekonomi banyak mengalami perombakan drastis. Salah satu perubahan mendasar yang akan banyak membawa pengaruh bagi bangsa indonesia adalah masalah liberalisasi ekonomi. Liberalisasi ekonomi sebagaimana diputuskan dalam konferensi APEC merupakan kebijakan yang tidak terelakan karena mulai tahun 2003 mendatang Indonesia harus memaski era AFTA (ASEAN Free Trade Area) yang dilanjutkan pada tahun 2020 dalam skema liberalisasi perdagangan yang lebih luas tidak hanya dalam aspek ekonomi saja, tetapi juga dalam kehidupan sosial, politik dan budaya.

Pengaruh liberalisasi ekonomi berdampak luas tidak hanya dalam aspek ekonomi saja, akan tetapi juga berdampak dalam kehidupan sosial politik dan budaya. Salah satu dampak yang sekarang sangat dirasakan adalah munculnya krisis moneter yang terjadi di Asia Tenggara dan sebagai Asia Timur. Munculnya krisis yang dimulai dengan timbulnya depresi mata uang, disebabkan oleh ketidaksiapan perangkat supra struktur dan infrastuktur baik ekonomi maupun politik dalam mengantisipasi dampak globalisasi perdagangan. Fenomena ini kemudian memunculkan tuntutan reformasi dibidang ekonomi dan politik sebagai prasyarat untuk mengantisipasi dan menyelesaikan persoalan krisis. Di Indonesia sebagai salah satu negara yang terkena krisis dan menderita paling parah muncul tuntutan reformasi. Fenomena reformasi yang dituntut masyarakat Indonesia adalah reformasi yang mendasar diseluruh bidang baik dibidang ekonomi, budaya, politik bahkan sampai reformasi moral. Tuntutan reformasi ini jelas mendesak IRM untuk melakukan peran dan fungsinya sebagai organisasi keagamaan dan dakwa Islam dikalangan remaja menjadi lebih aktif dan responsif terhadap perkembangan perjalanan bangsa menuju masyarakat dan pemerintahan yang bersih dan modern.

Dalam kondisi yang demikianlah IRM memasuki fase perkembangan, yaitu perkembangan pasca perubahan nama IPM menjadi IRM hingga terselenggaranya pelaksanaan pola kebijakan jangka panjang IRM pada muktamar XII. Diharapkan nantinya IRM telah mencapai kondisi yang telah relatif mantap baik secara mekanisme kepemimpinan maupun mekanisme keorganisasian sehingga mampu secara optimal menjadi wahana penumbuhan dan pengembangan potensi sumber daya remaja. Pengelolaan sumber daya yang dimiliki Ikatan Remaja Muhammadiyah harus didukung dengan adanya peningkatan kualitas pinpinan, mekanisme kerja yang kondusif yang seiring dengan kemajuan zaman, serta pemantapan dan pengembangan gerak Ikatan

Remaja Muhammadiyah yang berpandangan ke depan namun tetap dijiwai oleh akhlak mulia. IRM dituntut untuk dapat menyipakan dasar yang kokoh baik secara institusional maupun personal sehingga tercipta komunitas yang kondusif bagi para remaja untuk siap menghadapi zaman yang akan datang.

Sumber : Buku Materi Mukthamar IRM

Memahami Jati Diri  
Muhammadiyah



Jumat, 12 Desember 2008 10:32

Organisasi sosial keagamaan yang bergerak di bidang pendidikan, dakwah dan sosial ini sudah sedemikian besar, jika diukur dari jumlah anggota atau simpatisannya, amal usaha yang berhasil diwujudkan serta resonansi pemikiran yang telah dihasilkan. Dari sisi jumlah anggota, Muhammadiyah telah tersebar di hampir seluruh wilayah tanah air. Hampir-hampir tidak ada suatu kecamatan dan bahkan desa yang belum tersentuh oleh gerakan Muhammadiyah. Sehingga, tidak terlalu salah jika seorang Pimpinan Pusat Muhammadiyah mengklaim warga Muhammadiyah saat ini tidak kurang dari 20 juta orang, sekalipun dalam pemilu capres yang lalu Pak Amien Rais sebagai salah seorang yang pernah menduduki Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah belum didukung oleh sejumlah suara itu, dengan alasan tidak semua warga Muhammadiyah mendukungnya.

Amal usaha Muhammadiyah juga sedemikian besar jumlahnya. Muhammadiyah telah memiliki ratusan rumah sakit dan klinik kesehatan, lembaga pendidikan baik tingkat dasar, sekolah menengah sampai perguruan tinggi. Jumlah sekolah dasar dan menengah menurut laporan yang seringkali disebut-sebut tidak kurang dari 10 ribu buah, perguruan tinggi Muhammadiyah, besar dan kecil, tidak kurang dari 100 an buah. Amal usaha Muhammadiyah akan lebih besar lagi jumlahnya jika dihitung pula dari masjid atau musholla yang berhasil didirikan.

Selanjutnya, jika dilihat dari sisi pemikiran, memang tidak mudah menakar, karena sifatnya yang abstrak. Akan tetapi jika hal itu dilihat dari berapa jumlah sarjana atau ulama, yang setidaknya-tidaknya dapat ditengarai sebagai anggota ataupun simpatisan organisasi yang mengklaim diri sebagai pembaharu ini sudah sangat besar. Oleh karena besarnya jumlah sarjana di lingkungan Muhammadiyah ini sampai-sampai muncul pameo yang membedakan antara Muhammadiyah dan NU. Jika NU dikenal sebagai organisasi kaya dengan ulama atau kyai, Muhammadiyah dikenal sebagai kaya sarjana. Fenomena ini sesungguhnya tidak sulit dicari akar penyebabnya. Muhammadiyah sudah lebih lama

berorientasi pada pengembangan sekolah umum yang tentu menghasilkan sarjana, sedangkan NU pada awalnya lebih berorientasi pada pondok pesantren. Jika NU kemudian juga mengembangkan sekolah umum dan perguruan tinggi, hal itu merupakan gejala baru yang terjadi pada puluhan tahun terakhir ini saja.

Prestasi Muhammadiyah dalam membangun beberapa institusi terutama di bidang pendidikan, kesehatan serta rumah ibadah seperti digambarkan itu, merupakan sesuatu yang luar biasa. Sebab, organisasi ini sesungguhnya diakui atau tidak hanya mengandalkan kekuatan sendiri, yakni bersumber dari warga Muhammadiyah. Mereka tidak memperoleh support pendanaan dari pemerintah. Jika Muhammadiyah berhasil mendirikan sekolah, madrasah, universitas, rumah sakit atau masjid/musholla, semua itu hanya mengandalkan biaya dari warga atau simpatisan organisasi ini. Keadaan seperti ini kemudian Muhammadiyah disebut sebagai gerakan yang tumbuh dari bawah. Jika Muhammadiyah dalam membangun amal usaha memperoleh dana dari pemerintah, hanyalah bersifat bantuan. Walaupun pada hakekatnya, siapa membantu siapa memerlukan penjelasan yang memadai.

Pada sisi lain keberhasilan Muhammadiyah seperti itu melahirkan kesan, terutama dari kalangan eksternal, bahwa organisasi sosial keagamaan itu sedemikian kukuhnya. Atas dasar kesan itu selanjutnya terbangun pameo, jika mau belajar tentang bagaimana berorganisasi, mengurus pendidikan, mengelola rumah sakit dan sebagainya, maka datanglah ke Muhammadiyah. Dan, pada sisi lain, jika ingin membangun pondok pesantren, belajarlah pada Nahdlatul Ulama'. Pameo seperti itu tidak ayal melahirkan citra diri di lingkungan sebagian warga Muhammadiyah sebagai kelompok Islam yang modern, lebih maju, dan gerakan serta pemikirannya selalu mengikuti perkembangan zaman. Label seperti itu juga melahirkan sikap dan jati diri orang-orangnya yang berlebihan, seperti misalnya merasa lebih maju dan modern dan selalu berada pada posisi pembaharu dalam banyak hal dan lain-lain. Sikap-sikap seperti itu, sesungguhnya masih terbuka untuk diuji secara kritis dan obyektif. Upaya ini saya anggap perlu, dari mana datangnya dan oleh siapa saja agar Muhammadiyah berpeluang memahami diri sendiri sebagai dasar untuk membawa organisasi ke arah yang lebih baik di tengah pergumulan dan perubahan masyarakat yang semakin cepat ini.

### **Ruh Muhammadiyah**

Muhammadiyah sejak awal kehadirannya dikenal sebagai gerakan dakwah, amar ma'ruf nahyu anil mungkar di tengah masyarakat. Gerakan organisasi ini jika mengikuti pikiran para tokoh dan sejarah kelahirannya didorong oleh keprihatinan-keprihatinan terhadap adanya kesenjangan antara idealitas Islam yang sedemikian agung dengan kenyataan dalam kehidupan sehari-hari para penganutnya yang keadaannya sedemikian jauh dari tuntunan ideal itu. Jika Islam mengajarkan tentang kebersihan, maka konsep ajaran itu tidak tampak dalam berbagai lapangan kehidupan dan juga institusi gerakan Islam. Karena itulah di kalangan Muhammadiyah seringkali dicontohkan apa yang dilakukan oleh Kyai Ahmad Dahlan, pendiri Muhammadiyah, tentang bagaimana tokoh ini mengajarkan tentang Islam. Ia mengajarkan surat al Ma'un secara berulang-ulang hingga para santrinya bosan. Atas dasar suasana kebosanan itu kemudian Pendiri

Muhammadiyah ini mengubah kegiatan mengajarnya dengan kegiatan yang lebih nyata, yaitu para santri-santrinya ditugasi membawa bahan-bahan apa saja yang dapat digunakan untuk menyantuni fakir miskin yang ada di sekitar kota Yogyakarta. Selanjutnya, melalui kegiatan nyata itu, Kyai Dahlan menunjukkan, tentang cara menjalankan ajaran Islam yang sesungguhnya. Ajaran itu diamalkan, artinya dikerjakan dan bukan sekedar dibaca, dihafalkan dan digunakan sebagai bacaan rutin pada setiap sholat.

Masyarakat Islam ketika itu, juga terbelenggu oleh nilai-nilai yang dianggap kurang sejalan dengan ajaran Islam, misalnya kepasrahan pada alam, kebiasaan mengikuti tradisi yang diberikan secara turun temurun dari leluhurnya, bahkan juga kebodohan, kemiskinan yang semua itu kurang beradaptasi dengan perubahan zaman. Mensikapi fenomena seperti itu, Muhammadiyah berani melakukan langkah dan atau tampil berbeda. Jika umat Islam ketika itu, sebagai contoh kecil, harus selalu menggunakan sarung dan peci, yang hal itu dianggap bersumber dari ajaran Islam, maka orang-orang Muhammadiyah berani ikut tradisi belanda menggunakan celana panjang dan tanpa peci. Muhammadiyah mendirikan sekolah, klinik kesehatan, mengirim anak-anak mereka ke sekolah belanda untuk belajar tentang berbagai hal terkait dengan kesehatan, ketrampilan dan sebagainya. Langkah-langkah seperti ini, karena dianggap sebagai hal baru maka Muhammadiyah dikenal sebagai pembaharu.

Mendasarkan atas cara berpikir seperti itu maka Muhammadiyah mengklaim telah kembali ke ajaran yang bersumber pada al Qur'an dan hadits. Jika al Qur'an mengajak untuk menyantuni anak yatim dan orang miskin, maka sesegera mungkin tuntunan itu dijalankan, yaitu benar-benar berbuat menolong orang miskin dan anak yatim. Jika Islam menganjurkan untuk sholat berjama'ah, atau sholat berjama'ah dipandang lebih afdhol daripada sholat sendirian di rumah, maka Muhammadiyah menggerakkan anggotanya sesegera mungkin meninggalkan apa saja, segera pergi ke masjid untuk sholat berjama'ah ketika mendengarkan adzan sebagai panggilan sholat. Jika ada tuntunan bahwa pendidikan itu penting, maka Muhammadiyah segera membangun dan menyiapkan segala perangkat yang diperlukan untuk menyelenggarakan pendidikan. Dan, seterusnya perintah-perintah lainnya, segera ditunaikan sebagai pengamalan al Qur'an dan hadits Nabi.

Melalui uraian di atas, sesungguhnya Muhammadiyah ingin menjadikan al Qur'an benar-benar sebagai tuntunan dalam seluruh kehidupan ini. Hanya dalam perjalanan sejarah selanjutnya, gerakan organisasi itu mengalami pasang surut. Bahkan, tidak ayal para penerusnya justru memahami Muhammadiyah sebatas sebagai organisasi. Muhammadiyah sebagai organisasi lebih menonjol daripada Muhammadiyah sebagai gerakan Islam. Tidak jarang anggota dan bahkan pimpinan Muhammadiyah lebih membela struktur dan aturan-aturan organisasinya daripada mengedepankan substansi gerakannya itu sendiri. Oleh karena itu, tidak sedikit di Muhammadiyah terjadi problem-problem organisasi yang menyebabkan gerakannya mandek. Muhammadiyah yang sesungguhnya adalah gerakan dakwah, yaitu mengajak orang menjalankan ajaran Islam secara kaffah, ternyata dalam tataran praktek di lapangan, justru berbalik arah. Alih-alih sukses menambah anggota, justru yang sudah masuk menjadi anggota Muhammadiyah

pun keluar dan bahkan juga dikeluarkan. Inilah konsekuensi sebagai kehidupan organisasi, yang seharusnya tidak terjadi jika itu adalah organisasi keagamaan.

Lalu, apakah sesungguhnya ruh Muhammadiyah itu. Saya menangkap bahwa sesungguhnya ruh Muhammadiyah adalah etos, semangat, cita-cita dan keinginan menjadikan al Qur'an dan hadits sebagai pedoman hidup dan benar-benar ditampakkan dalam kehidupan sehari-hari. Atau, ialah perjuangan menjadikan Rasulullah, Muhammad saw., sebagai tauladan yang selalu diikutinya. Jika itu pengertiannya maka selayaknya Muhammadiyah tidak sebagaimana organisasi lain, lebih mengedepankan aspek organisasi, padahal seharusnya lebih menyentuh aspek substansialnya sebagai gerakan dakwah. Semestinya tujuan utama ialah berdakwah tidak boleh terganggu oleh apapun, termasuk kepentingan organisasinya.

## Organisasi Islam

### **MUHAMMADIYAH : Meretas Jalan Baru Untuk Indonesia**

Muhammadiyah, salah satu organisasi Islam terbesar yang masih eksis hingga kini, didirikan oleh KH. Dahlan pada tanggal 8 Dzulhijah 1330 (18 November 1912) di Yogyakarta.

Secara etimologis, Muhammadiyah berasal dari kata "Muhammad" yaitu nama Rasulullah saw yang diberi ya nisbah dan ta marbutah yang berarti pengikut Nabi Muhammad saw. Dalam Anggaran Dasar Muhammadiyah yang baru, yang telah disesuaikan dengan UU No. 8 tahun 1985 dan hasil Muktamar Muhammadiyah ke-41 di Surakarta pada tanggal 7-11 Desember 1985, Bab I Pasal 1 disebutkan bahwa Muhammadiyah adalah gerakan Islam dan dakwah amar ma'ruf nahi munkar yang berakidah Islam dan bersumber pada al-Qur'an dan Sunnah. Muhammadiyah menentang berbagai praktik bid'ah dan khurafat. Sifat gerakan ini non politik, tetapi tidak melarang anggota-anggotanya memasuki partai politik. Bahkan KH. Ahmad Dahlan selaku pemimpinnya juga menjadi anggota Sarekat Islam.

Muhammadiyah dikenal sebagai organisasi yang telah mengembuskan jiwa pembaruan Islam di Indonesia dan bergerak di berbagai bidang kehidupan umat. Muhammadiyah memberikan titik tekan tersendiri bagi dunia pendidikan. Langkah yang diambil Muhammadiyah antara lain, (1) memperteguh iman, menggembirakan dan memperkuat ibadah, serta mempertinggi akhlak; (2) mempergiat dan memperdalam penyelidikan ilmu agama Islam untuk mendapatkan kemurniannya; (3) memajukan dan memperbarui pendidikan, pengajaran dan kebudayaan serta memperluas ilmu pengetahuan menurut tuntunan Islam; (4) menggiatkan dan menggembirakan dakwah Islam serta amar ma'ruf nahi munkar; (5) mendirikan, menggembirakan dan memelihara tempat ibadah dan wakaf; (6) membimbing kaum wanita ke arah kesadaran beragama dan berorganisasi; (7) membimbing para pemuda agar menjadi orang Islam berarti; (8) membimbing ke arah kehidupan dan penghidupan sesuai dengan ajaran Islam; (9) menggerakkan dan menumbuhkan rasa tolong menolong dalam kebajikan takwa; (10) menanam kesadaran

agar tuntunan dan peraturan Islam berlaku dalam masyarakat.

Pada tahun 1930-an, menjelang Perang Dunia II, pemimpin-pemimpin Muhammadiyah, di antaranya KH Mas Mansyur, Prof. Kahar Muzakir, dan Dr. Sukiman Wirjosandjoyo, mensponsori berdirinya Partai Islam Indonesia. KH. Mas Mansyur juga aktif di GAPI, bahkan diunggulkan sebagai ketua Majelis Rakyat Indonesia, yang merupakan badan parlemen dari kaum pergerakan nasional.

Sejak masa berdirinya, banyak kader Muhammadiyah yang ikut berjuang, misalnya di perang kemerdekaan. Sementara itu setelah Indonesia merdeka, mulai bergerak kembali ke berbagai bidang, selain juga terjun dalam perjuangan fisik. Sementara itu, pada zaman revolusi fisik dan demokrasi liberal, banyak anggota Muhammadiyah yang memasuki partai politik Masyumi. Dalam dunia politik, banyak tokoh Muhammadiyah berdiri di depan.

Persebaran Muhammadiyah dimulai sejak kelahirannya sampai saat ini. Sampai sekurang-kurangnya tahun 1917, penyebaran Muhammadiyah bisa dibilang masih sangat terbatas, yakni masih di daerah Kauman Yogyakarta. KH. Ahmad Dahlan sendiri selain aktif tabligh, aktif pula mengajar di sekolah Muhammadiyah, dan memberikan bimbingan kepada masyarakat untuk melakukan berbagai kegiatan seperti pengajaran shalat dan juga mengumpulkan dana dan pakaian untuk dibagikan kepada fakir miskin.

Dengan kesungguhan para kadernya, Muhammadiyah berkembang pesat. Pada tahun 1925 Muhammadiyah memiliki 29 cabang dengan 4.000 anggota. Sedangkan kegiatannya di bidang pendidikan meliputi 8 Hollands Inlandse School, 1 Sekolah guru di Yogyakarta, 32 sekolah dasar 5 tahun, 1 Schakelschool, 14 madrasah dengan 119 guru dan 4000 murid. Di bidang sosial, Muhammadiyah mencatat 2 klinik di Jogja dan Surabaya dengan 12.000 pasien, 1 buah rumah miskin, dan 2 rumah yatim piatu.

Selanjutnya, penyebaran Muhammadiyah semakin meluas lagi. Bidang pendidikan menjadi begitu melekat dengan aikon Muhammadiyah. Data pada tahun 1985 saja tercatat lembaga pendidikan Muhammadiyah berjumlah 12.400 lebih yang tersebar di seluruh tanah air, yang terdiri dari pendidikan umum dan pendidikan agama. Dari jumlah tersebut tercatat 15 universitas dan 23 perguruan tinggi. Sisanya adalah sekolah TK sampai tingkat SLTA (agama dan non agama). Sampai dengan tahun 1990, jumlah Perguruan Tinggi Muhammadiyah berkembang menjadi 78 buah.

Selain bidang pendidikan, Muhammadiyah juga mencurahkan perhatiannya untuk mendirikan poliklinik, rumah bersalin, rumah sakit, dan sekarang fakultas kedokteran. Kalau pada tahun 1922 baru ada 1 rumah sakit atau poliklinik, di tahun 1990 Muhammadiyah telah memiliki 215 rumah sakit, poliklinik dan rumah bersalin. Kini belum ada data pasti, tapi diyakini jumlahnya jauh lebih tinggi dari tahun-tahun sebelumnya.

Muhammadiyah yang berkembang dengan pesat, tak elak dari kesungguhan hati para pendiri dan kadernya. Menarik kita simak pesan KH. Ahmad Dahlan, "...Aku ingin

berpesan pula hendaknya kamu bekerja dengan bersungguh-sungguh, bijaksana dan tetap berhati-hati, dan waspada dalam menggerakkan Muhammadiyah dan menggerakkan tenaga umat. Hal ini jangan kau kira urusan kecil. Inilah pesanku, siapa saja yang mengindahkan pesanku, tanda mereka tetap mencintai aku dan Muhammadiyah.” Selain itu beliau melanjutkan, “Adapun untuk menjaga keselamatan Muhammadiyah, maka perlulah kita berusaha dan menjalankan serta mengikuti garis khittahku; hendaklah kamu sekali-kali tidak menduakan pandangan Muhammadiyah dengan perkumpulan lain, jangan sentimen, jangan sakit hati kalau menerima celaan dan kritikan, jangan sombong, jangan berbesar hati kalau menerima pujian, jangan jubirya (ujub, kibir, riya), ikhlas dan murnikan hati kalau sedang berkorban harta benda, pikiran dan tenaga, dan harus bersungguh hati dan tetap tegak pendirianmu!” pesannya.

Yeni Rosdianti Rasio

### **NAHDLATUL ULAMA : Mengantar Kiai untuk RI-1**

Nahdlatul Ulama (NU) berarti kebangkitan ulama. Dibidangi oleh tokoh-tokoh ulama seperti Hadhratus Syekh Kiai Haji Muhammad Hasyim Asy'ari (1871-1947) dan KH. Abdul Wahab Hasbullah (1888-1971). NU lahir pada tanggal 31 Januari 1926 di Surabaya dan kini menjadi salah satu organisasi dan gerakan Islam terbesar di Indonesia.

NU lahir dari Komite Hijaz yang bertujuan mengupayakan berlakunya ajaran Islam yang berhaluan Ahlu Sunnah wal Jamaah dan penganut salah satu mazhab yang empat (Hanafi, Syafi'i, Hanbali dan Maliki). Sebagian besar yang mendominasi gerakan ini adalah mazhab Syafi'i.

Berbasiskan massa pesantren di seluruh Nusantara, NU mendorong menjadi sebuah gerakan kultural yang sangat berkembang. Soliditas di kalangan NU juga sedikit banyak dipengaruhi oleh kuatnya kekerabatan internal, baik yang disebabkan oleh seperguruan dalam menimba ilmu agama (pesantren sebagai tempat belajar), sebab nasab (keturunan), dan juga silaturahmi yang dijalin. Dan tentu saja ukhuwah Islamiyah dan kesatuan akidah.

Kepengurusan Nahdlatul Ulama terdiri atas: Mustasyar (berfungsi sebagai Badan Penasihat), Syuriah (berfungsi sebagai pimpinan tertinggi) dan Tanfidziyah (yang berfungsi sebagai Pelaksana Harian). Kepengurusan NU juga dilengkapi dengan berbagai lajnah, lembaga dan badan otonomi.

Dalam kehidupan politik, Nahdlatul Ulama ikut aktif semenjak zaman pergerakan kemerdekaan di masa penjajahan. Semula, Nahdlatul Ulama aktif sebagai anggota Majelis Islam A'la Indonesia (MAI), kemudian Majelis Syura Muslimin Indonesia (Masyumi), baik yang dibentuk di zaman Jepang maupun yang didirikan oleh seluruh organisasi Islam setelah merdeka sebagai satu-satunya partai politik umat Islam Indonesia. Karena berbagai perbedaan, pada tahun 1952 Nahdlatul Ulama, menyusul PSII, menyatakan menarik diri dari keanggotaan istimewa Masyumi dan berdiri sendiri sebagai partai politik. Nahdlatul Ulama bersama dengan PSII dan Perti membentuk Liga Muslimin Indonesia sebagai wadah kerja sama partai politik dan organisasi Islam. Dalam

pemilihan umum tahun 1955 Nahdlatul Ulama muncul sebagai partai politik besar ketiga. Pada masa Orde Baru Nahdlatul Ulama bersama partai politik lainnya (PSII, Parmusi, Perti) berfusi dalam Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Kemudian sejak tahun 1984 NU menyatakan diri kembali ke khittah 1926, yaitu melepaskan diri dari kegiatan politik dan menjadi organisasi sosial keagamaan.

Meski Khittah 1926 NU pada mulanya diilhami oleh suatu pemikiran bahwa keterlibatan secara langsung dalam kancah politik praktis ternyata tidak memberikan ‘keuntungan’ yang signifikan bagi kelangsungan hidup organisasi. Perjalanan NU kemudian tampak lebih didominasi oleh aktivitas politik. Inilah yang kemudian memunculkan ide untuk kembali ke khittah 1926. Bukan berarti NU harus meninggalkan dunia politik, namun netralitas politik tetap menjadi pilihan NU. Karena itu, untuk menjaga sikap netral itu, dapat dimaklumi jika PBNU melarang adanya rangkap jabatan bagi segenap pengurusnya dengan jabatan politik.

Dalam praktiknya, anggota NU masih ada yang di PPP, tak sedikit yang menyeberang ke Golkar, dan tidak dilarang juga masuk PDI. Ini terjadi dalam kurun sekitar 1984-1998. Sampai kemudian pada tahun 1999 saat gelombang reformasi menyeruak, NU bisa berkampanye untuk rumahnya sendiri’ yaitu Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Langkah ini dianggap sebagai langkah “non politik” dari “politik” NU, di mana NU tidak mengubah bentuk menjadi organisasi politik secara “langsung” (karena berarti ini mencederai khittah 1926) namun menampilkan representasi organisasinya yang memiliki kekuatan sosial cukup signifikan di Indonesia dalam jaket PKB.

Meski bukan satu-satunya partai bentukan warga NU, di masa inilah PKB meraih simpati massa—khususnya dari kalangan santri—Islam yang cukup besar, hingga mampu menduduki peringkat lima besar partai pemenang pemilu 1999.

Sebagai cucu dari pendiri NU, KH. Hasyim Asy’ari, sosok Abdurahman Wahid atau Gus Dur tak terlepas dari perkembangan Nahdlatul Ulama. Menjabat selama tiga periode berturut-turut dalam pucuk kepemimpinan di PBNU, pemikiran Gus Dur banyak memberikan “corak” bagi perkembangan NU berikutnya. Ia disebut-sebut sebagai seseorang yang memadukan pemikiran tradisional dan kontemporer. Greg Barton, dosen mata kuliah agama dan kajian Asia di Universitas Deakin Australia menulis dalam disertasinya yang berjudul “The Emergence of Neo Modernism”, salah satunya mengupas pemikiran beberapa tokoh Indonesia, di antaranya Gus Dur. Gus Dur adalah sosok yang penuh kontroversi dan dianggap telah memelopori bangkitnya gerakan liberalisme Islam di kalangan anak muda NU.

Gus Dur kemudian terpilih sebagai ketua Partai Kebangkitan Bangsa yang dengan demikian harus meletakkan jabatan sebagai ketua PBNU. Dalam perkembangannya, saat pemilihan presiden dilaksanakan di Senayan, pada tahun 1999 terjadi tarik-menarik. Lobi-lobi tokoh-tokoh Islam di DPR/MPR menghasilkan konsesi politik yang berujung pada pemenangan Abdurrahman Wahid sebagai orang nomor satu di republik ini. Namun, selama kepemimpinannya, pemerintah menuai badai kritik dan dipenuhi langkah-langkah yang juga penuh kontroversi. Gus Dur akhirnya lengser setelah

pertanggungjawabannya ditolak oleh MPR dalam Sidang Istimewa.

Besarnya organisasi Nahdatul Ulama yang oleh para penggagasnya—dengan segala kejernihannya—dimaksudkan untuk menegakkan Izzul Islam wal muslimin. Nyatanya cukup memberikan corak bagi khazanah sosial politik di Indonesia. Keberadaan organisasi Islam terbesar di negeri Indonesia ini tak pelak mengundang harapan bagi segenap kaum muslimin di Indonesia khususnya untuk memberikan kontribusi bagi kemaslahatan umat, seluas-luasnya.

Yeni Rosdianti Rasio

### **Al Irsyad Al Islamiyah : Gerakan Reformasi Islam**

Adalah Jamiat Khair, sebuah organisasi Islam tempat para ulama dan aktivis bergabung, tempat bermulanya Ahmad Soorkati mengawali karir dakwahnya di Indonesia. Ia diundang secara khusus oleh gerakan ini untuk menjadi pengajar pada berbagai badan pendidikan yang dirintisnya pada tahun 1912. Ia datang dari Sudan, membawa dan mengusung pola pikir rasional dalam berbagai kuliahnya.

Pola pikir itu pula yang membidani lahirnya al-Irsyad al-Islamiyah, sebuah gerakan pembaruan, memperbaiki pemahaman keberagamaan Muslim Indonesia kala itu. Perbedaan prinsipnya dengan beberapa kalangan Arab kala itu, kian membuatnya menggebu melakukan pembaruan. Bahkan dengan Ahmad Dahlan dan KH. Zam Zam, bertiga mereka pernah berjanji untuk berdakwah tak kenal lelah merehabilitasi pemahaman agama.

Dari sinilah peran terbagi-bagi, Ahmad Dahlan bergerak untuk kalangan pribumi dengan Muhammadiyah dan Soorkati sendiri mengkhususkan diri berdakwah di kalangan Arab dengan al-Irsyad. Secara organisatoris, Ahmad Soorkati bukan satu-satunya pendiri al-Irsyad. Ada tokoh lain seperti Syekh Umar Mangqush, said Mash'abi, Saleh Ubayd Abat dan Salim bin Alwad Bawa'i.

Al-Irsyad sebetulnya terinspirasi dan diwarnai oleh pemikiran Syekh Rashid Ridha yang mendirikan Jam'iyat Da'wah wa al-Irsyad di Mesir. Tujuan utama dari gerakan ini adalah menghasung kaum Muslim mengabdikan dirinya dalam mendidik umat dan memberikan yang terbaik untuk Islam.

Gerakan ini pada awalnya berdiri di Jakarta pada 6 September 1914, dua tahun setelah Muhammadiyah berdiri. Tapi dalam waktu singkat terus berkembang dengan pesat ke beberapa kota lain di Pulau Jawa. Setidaknya dalam gerakan awalnya, ada lima prinsip yang dengan setia selalu dijaga oleh al-Irsyad. Pertama, meneguhkan doktrin persatuan kaum Muslim dan membersihkan ibadah dari unsur-unsur bid'ah. Kedua, mewujudkan kesetaraan derajat di antara Muslim dalam menggali al Qur'an dan Sunnah. Ketiga, memerangi taqlid yang merebak. Keempat, menyiarkan ilmu dan ajaran Islam dan kelima, membangun pemahaman antara Muslim Indonesia dan keturunan Arab di Indonesia.

Konsentrasi awal gerakan ini untuk mensukseskan programnya adalah membangun dan mendirikan lembaga-lembaga pendidikan dan tarbiyah. Bisa dibayangkan, al-Irsyad adalah salah satu gerakan Islam yang melahirkan tokoh-tokoh bangsa di awal-awal kemerdekaan dengan program dan perannya. Agenda-agenda reformasi yang diusungnya tanpa ragu lagi telah memberikan peran tersendiri dalam perjuangannya di Indonesia. Bahkan, sebagian besar tokoh besar Muhammadiyah kala itu adalah kader-kader yang juga dibina dalam lembaga pendidikan al-Irsyad.

Gerakan ini dalam perkembangannya mengkonsentrasikan diri dalam perbaikan kondisi religius kaum Muslim, dari kalangan Arab khususnya dengan cara mendirikan madrasah, rumah piatu, panti asuhan dan juga rumah sakit. Tak ketinggalan, menyebarkan ide reformasi lewat tulisan dan penerbitan pun dilakukan oleh gerakan lewat berbagai even dan aksi, mulai dari publikasi, kelompok studi sampai aksi.

Pada tahun awal berdirinya, al-Irsyad sudah memiliki Madrasah Awaliyah dengan jenjang pendidikan selama tiga tahun. Ada juga Madrasah Ibtidaiyah dengan jenjang empat tahun, madrasah Takhziziyah berjenjang dua tahun dan Madrasah Mu'alimin yang dikhususkan untuk para guru. Singkat kata, peran al-Irsyad al-Islamiyah dalam membangun umat dan membangun bangsa tak bisa diragukan lagi.

Tapi sungguh sayang, organisasi dengan peran panjang dan besar itu kini tengah digoyang badai. Perbedaan pendapat yang kian meruncing terjadi di dalam tubuh gerakan pelopor kebangkitan ini. Perbedaan tersebut terus berlanjut hingga ke meja hijau. Sebuah peristiwa yang mengatakan, sejarah besar tak lagi mampu menyatukan hati. Semoga ikatan hati (mukmin) kembali menyatukan organisasi ini.

# Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah

Dari Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas

Langsung ke: [navigasi](#), [cari](#)



**Artikel ini perlu [dirapikan](#) agar memenuhi standar Wikipedia**

Merapikan artikel bisa berupa membagi artikel ke dalam paragraf atau [wikifikasi artikel](#). Setelah dirapikan, tolong hapus pesan ini.

**IMM (Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah)** ialah organisasi mahasiswa [Islam](#) di [Indonesia](#) yang memiliki hubungan struktural dengan organisasi [Muhammadiyah](#) dengan kedudukan sebagai organisasi otonom. Memiliki tujuan terbentuknya akademisi Islam yang berakhlak mulia dalam rangka mencapai tujuan Muhammadiyah.

Keberadaan IMM di perguruan tinggi Muhammadiyah telah diatur secara jelas dalam qoidah pada bab 10 pasal 39 ayat 3: "Organisasi Mahasiswa yang ada di dalam Perguruan Tinggi Muhammadiyah adalah Senat Mahasiswa dan Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah

(IMM)”. Sedangkan di kampus perguruan tinggi lainnya, IMM bergerak dengan status organisasi ekstra-kampus — sama seperti [Himpunan Mahasiswa Islam](#) maupun [KAMMI](#) — dengan anggota para mahasiswa yang sebelumnya pernah bersekolah di sekolah Muhammadiyah.

Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) didirikan di [Yogyakarta](#) pada tanggal [14 Maret 1964](#), bertepatan dengan tanggal 29 Syawwal 1384 H. Dibandingkan dengan organisasi otonom lainnya di Muhammadiyah, IMM paling belakangan dibentuknya. Organisasi otonom lainnya seperti [Nasyiatul `Aisyiyah](#) (NA) didirikan pada tanggal [16 Mei 1931](#) (28 Dzulhijjah 1349 H); [Pemuda Muhammadiyah](#) dibentuk pada tanggal [2 Mei 1932](#) (25 Dzulhijjah 1350 H); dan [Ikatan Pelajar Muhammadiyah](#) (IPM, yang namanya diganti menjadi [Ikatan Remaja Muhammadiyah](#) [IRM]) didirikan pada tanggal [18 Juli 1961](#) (5 Shaffar 1381 H).

Kelahiran IMM dan keberadaannya hingga sekarang cukup sarat dengan sejarah yang melatarbelakangi, mewarnai, dan sekaligus dijalaninya. Dalam konteks kehidupan umat dan bangsa, dinamika gerakan Muhammadiyah dan organisasi otonomnya, serta kehidupan organisasi-organisasi mahasiswa yang sudah ada, bisa dikatakan IMM memiliki sejarahnya sendiri yang unik. Hal ini karena sejarah kelahiran IMM tidak luput dari beragam penilaian dan pengakuan yang berbeda dan tidak jarang ada yang menyudutkannya dari pihak-pihak tertentu. Pandangan yang tidak apresiatif terhadap IMM ini berkaitan dengan aktivitas dan keterlibatan IMM dalam pergolakan sejarah bangsa Indonesia pada pertengahan tahun 1960-an; serta menyangkut keberadaan [Himpunan Mahasiswa Islam](#) (HMI) pada waktu itu.

Ketika IMM dibentuk secara resmi, itu bertepatan dengan masa-masanya HMI yang sedang gencar dirusuh oleh [PKI](#) dan [CGMI](#) serta terancam mau dibubarkan oleh rezim kekuasaan Soekarno. Sehingga kemudian muncul anggapan dan persepsi yang keliru bahwa IMM didirikan adalah untuk menampung dan mewartakan anggota HMI jika dibubarkan. Logikanya dalam mispersepsi ini, karena HMI tidak jadi dibubarkan, maka IMM tidak perlu didirikan. Anggapan dan klaim yang mengatakan bahwa IMM lahir karena HMI akan dibubarkan, menurut Noor Chozin Agham, adalah keliru dan kurang cerdas dalam memberi interpretasi terhadap fakta dan data sejarah. Justru sebaliknya, salah satu faktor historis kelahiran IMM adalah untuk membantu eksistensi HMI dan turut mempertahankannya dari rongrongan PKI yang menginginkannya untuk dibubarkan.

Penilaian yang kurang apresiatif terhadap kelahiran IMM juga bisa terbaca pada jawaban terhadap pertanyaan [Victor I. Tanja](#). Dalam bukunya Tanja mempertanyakan: Barangkali kita akan heran, mengapa Muhammadiyah memandang perlu untuk membentuk organisasi mahasiswanya sendiri? Dari salah seorang anggota HMI (yang tidak disebutkan atau menyebutkan namanya) keluar jawaban, bahwa selama masa pemerintahan Presiden [Soekarno](#) dahulu untuk mendapatkan persetujuan darinya, sebuah organisasi harus dapat membuktikan bahwa ia mempunyai dukungan kuat dari masyarakat luas. Untuk memenuhi persyaratan inilah maka bukan saja Muhammadiyah,

tetapi semua gerakan sosial politik yang ada di tanah air harus membentuk sebanyak mungkin organisasi-organisasi penunjang.

## Daftar isi

[\[sembunyikan\]](#)

- [1 Latar Belakang Sejarah](#)
- [2 Program Kerja](#)
- [3 Pimpinan](#)
  - [3.1 Tingkatan Kepemimpinan](#)
- [4 Bibliografi](#)

## [\[sunting\]](#) Latar Belakang Sejarah

Sesungguhnya ada dua faktor integral yang menjadi dasar dan latar belakang sejarah berdirinya IMM, yaitu faktor intern dan faktor ekstern. Yang dimaksud dengan faktor intern adalah faktor yang terdapat dan ada dalam organisasi Muhammadiyah itu sendiri. Sedangkan faktor ekstern adalah hal-hal dan keadaan yang datang dari dan berada di luar Muhammadiyah, yaitu situasi dan kondisi kehidupan umat dan bangsa serta dinamika gerakan organisasi-organisasi mahasiswa.

Faktor intern sebetulnya lebih dominan dalam bentuk motivasi idealis dari dalam, yaitu dorongan untuk mengembangkan ideologi, paham, dan cita-cita Muhammadiyah. Untuk mewujudkan cita-cita dan merefleksikan ideologinya itu, maka Muhammadiyah mesti bersinggungan dan berinteraksi dengan berbagai lapisan dan golongan masyarakat yang majemuk. Ada masyarakat petani, pedagang, birokrat, intelektual, profesional, mahasiswa. dan sbgainya.

Interaksi dan persinggungan Muhammadiyah dengan mahasiswa untuk merealisasikan maksud dan tujuannya itu, cara dan strateginya bukan secara langsung terjun mendakwahi dan mempengaruhinya di kampus-kampus perguruan tinggi. Tetapi caranya adalah dengan menyediakan dan membentuk wadah khusus yang bisa menarik animo dan mengembangkan potensi mahasiswa. Anggapan mengenai pentingnya wadah bagi mahasiswa tersebut lahir pada saat Muktamar ke-25 Muhammadiyah (Kongres Seperempat Abad Kelahiran Muhammadiyah) pada tahun 1936 di Jakarta. Pada kesempatan itu dicetuskan pula cita-cita besar Muhammadiyah untuk mendirikan universitas atau perguruan tinggi Muhammadiyah.

Namun demikian, keinginan untuk menghimpun dan membina mahasiswa-mahasiswa Muhammadiyah tersebut tidak bisa langsung terwujud, karena pada saat itu Muhammadiyah belum memiliki perguruan tinggi sendiri. Untuk menjembatannya, maka para mahasiswa yang sepaham, atau mempunyai alam pikiran yang sama, dengan Muhammadiyah itu diwadahi dalam organisasi otonom yang telah ada seperti NA dan

Pemuda Muhammadiyah, serta tidak sedikit pula yang berkecimpung di HMI. Pada tanggal 18 November 1955, Muhammadiyah baru bisa mewujudkan cita-citanya untuk mendirikan perguruan tinggi yang sejak lama telah dicetuskannya pada tahun 1936, yaitu dengan berdirinya Fakultas Hukum dan Filsafat di Padang Panjang. Pada tahun 1958, fakultas serupa dibangun di Surakarta; kemudian di Yogyakarta berdiri Akademi Tabligh Muhammadiyah; dan Fakultas Ilmu Sosial di Jakarta, yang kemudian berkembang menjadi Universitas Muhammadiyah Jakarta. Kendati demikian, cita-cita untuk membentuk organisasi bagi mahasiswa Muhammadiyah tersebut belum bisa terbentuk juga pada waktu itu. Kendala utamanya karena Muhammadiyah --yang waktu itu masih menjadi anggota istimewa Masyumi-- terikat Ikrar Abadi umat Islam yang dicetuskan pada tanggal 25 Desember 1949, yang salah satu isinya menyatakan satu-satunya organisasi mahasiswa Islam adalah HMI.

Sejak kegiatan pendidikan tinggi atau perguruan tinggi Muhammadiyah berkembang pada tahun 1960-an itulah kembali santer ide tentang perlunya organisasi yang khusus mewadahi dan menangani mahasiswa. Sementara itu, menjelang Mukhtamar Muhammadiyah Setengah Abad di Jakarta pada tahun 1962, mahasiswa-mahasiswa perguruan tinggi Muhammadiyah mengadakan Kongres Mahasiswa Muhammadiyah di Yogyakarta. Dari kongres ini pula upaya untuk membentuk organisasi khusus bagi mahasiswa Muhammadiyah kembali mengemuka. Pada tanggal [15 Desember 1963](#) mulai diadakan penjajagan berdirinya Lembaga Dakwah Mahasiswa yang idenya berasal dari Drs. Mohammad Djazman, dan kemudian dikoordinir oleh Ir. Margono, dr. Soedibjo Markoes, dan Drs. A. Rosyad Sholeh.

Dorongan untuk segera membentuk wadah bagi mahasiswa Muhammadiyah juga datang dari para mahasiswa Muhammadiyah yang ada di Jakarta seperti Nurwijoyo Sarjono, M.Z. Suherman, M. Yasin, Sutrisno Muhdam dan yang lainnya. Dengan banyaknya desakan dan dorongan tersebut, maka PP Pemuda Muhammadiyah -- waktu itu M. Fachrurrazi sebagai Ketua Umum dan M. Djazman Al Kindi sebagai Sekretaris Umum-- mengusulkan kepada PP Muhammadiyah --yang waktu itu diketuai oleh K.H. Ahmad Badawi-- untuk mendirikan organisasi khusus bagi mahasiswa yang diiberi nama Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah --atas usul Drs. Mohammad Djazman yang--, dan kemudian disetujui oleh PP Muhammadiyah serta diresmikan pada tanggal 14 Maret 1964 (29 Syawwal 1384). Peresmian berdirinya IMM itu resepsinya diadakan di gedung Dinoto Yogyakarta; dan ditandai dengan penandatanganan "Enam Penegasan IMM" oleh K.H. Ahmad Badawi, yang berbunyi:

1. Menegaskan bahwa IMM adalah gerakan mahasiswa Islam;
2. Menegaskan bahwa kepribadian Muhammadiyah adalah landasan perjuangan IMM;
3. Menegaskan bahwa ilmu adalah amaliah dan amala adalah ilmiah;
4. Menegaskan bahwa amal IMM adalah lilLahi Ta'ala dan seenantiasa diabdikan untuk kepentingan rakyat.

Sedangkan faktor ekstern berdirinya IMM berkaitan dengan situasi dan kondisi kehidupan di luar dan di sekitar Muhammadiyah. Hal ini paling tidak bertalian dengan

keadaan umat Islam, kehidupan berbangsa dan bernegara rakyat Indonesia, serta dinamika gerakan mahasiswa.

Keadaan dan kehidupan umat Islam waktu itu masih banyak dipenuhi oleh tradisi, paham, dan keyakinan yang tidak sesuai dengan ajaran Islam yang sesungguhnya. Keyakinan dan praktek keagamaan umat Islam, termasuk di dalamnya adalah mahasiswa, banyak bercampur baur dengan takhayul, bid'ah, dan khurafat.

Sementara itu dalam kehidupan berbangsa dan bernegara juga tengah terancam oleh pengaruh ideologi komunis (PKI), keterbelakangan, kemiskinan, kebodohan, dan konflik kekuasaan antar golongan dan partai politik. Sehingga, kendati waktu itu Indonesia telah merdeka selama kurang lebih 20 tahun, namun tidak bisa mencerminkan makna dan cita-cita proklamasi kemerdekaan. Demokrasi dan kedaulatan rakyat terkungkung, sementara tirani kekuasaan dan otoritarianisme merajalela akibat kebijakan demokrasi dipimpin ala Soekarno.

Keadaan politik Indonesia sekitar awal sampai dengan pertengahan tahun '60-an, tulis Cosmas Batubara, sangat menarik. Banyak pengamat politik yang mengatakan bahwa perkembangan dan kehidupan politik saat itu diwarnai oleh tiga pelaku politik yang amat dominan, yaitu: Diri pribadi Presiden Soekarno; ABRI (terutama sekali angkatan Darat); dan PKI. Ketiga kekuatan politik tersebut sangat mewarnai dan mempengaruhi perilaku dan orientasi kehidupan berbangsa, dan bernegara di berbagai lapisan dan kelompok masyarakat. Di kalangan organisasi mahasiswa, orientasi dan perilaku politiknya juga terbagi ke dalam tiga kekuatan dominan tadi. Organisasi mahasiswa yang secara tajam mengikuti garis Presiden Soekarno adalah GMNI, dan yang sejalan dengan garis ABRI adalah HMI, PMKRI, dan SOMAL (Sekretariat Organisasi-Organisasi Mahasiswa Lokal). Sedangkan yang mengikuti dan mendukung garis PKI adalah CGMI (Concentrasi Gerakan Mahasiswa Indonesia). Di tengah kemelut dan pertentangan garis politik tersebut, pergolakan organisasi-organisasi mahasiswa sampai dengan terjadinya [G30S](#) 1965 terlihat menemui jalan buntu dalam mempertahankan partisipasinya di era kemerdekaan RI. Pada waktu itu sejak Kongres Mahasiswa Indonesia di Malang pada tanggal 8 Juni 1947, organisasi-organisasi mahasiswa seperti HMI, PMKRI (Persatuan Mahasiswa Katholik Republik Indonesia), PMKI (Persekutuan Mahasiswa Kristen Indonesia; yang pada tahun 1950 berubah menjadi GMKI [Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia]), PMJ (Persatuan Mahasiswa Jogjakarta), PMD (Persatuan Mahasiswa Djakarta), MMM (Masyarakat Mahasiswa Malang), PMKH (Persatuan Mahasiswa Kedokteran Hewan), dan SMI (Serikat Mahasiswa Indonesia) berfusi ke dalam PPMI (Perserikatan Perhimpunan-Perhimpunan Mahasiswa Indonesia) yang bersifat independen. Independensi PPMI sebagai penggalang kekuatan anti-imperialisme pada mulanya berjalan kompak. Tetapi setelah mengadakan Konferensi Mahasiswa Asia Afrika (KMAA) di Bandung tahun 1957 --yang menjadi prestasi puncak PPMI-- masing-masing organisasinya kemudian memisahkan diri. Hal ini karena pada tahun 1958 PPMI menerima CGMI, selundupan PKI, yang kemudian melancarkan aksi intervensi untuk mempengaruhi organisasi mahasiswa lain agar keluar dari PPMI. Akhirnya, karena kuatnya pengaruh dan intervensi dari CGMI tersebut, maka masing-masing organisasi dalam PPMI memisahkan diri. Pada bulan oktober 1965, setelah PKI dilumpuhkan, PPMI

akhirnya secara resmi membubarkan diri. Sasaran gerakan CGMI sebetulnya ingin mendominasi gerakan mahasiswa dan kehidupan kampus serta ingin menyingkirkan organisasi-organisasi mahasiswa Islam seperti HMI.

Sesungguhnya sebelum PPMI membubarkan diri, antara tahun 1964 sampai 1965 masing-masing organisasi mahasiswa yang berfusi di dalamnya bersikap sok revolusioner. Pada akhirnya HMI juga tidak ketinggalan untuk menjadi bagian dari kekuatan revolusioner. Menurut Deliar Noer, waktu itu HMI dengan keras turut menyanyikan senandung Demokrasi Terpimpin. Slogan-slogan Soekarno mulai dikumandangkan seperti "Nasakom jiwaku", "revolusioner", dan "ganyang Malaysia". Bahkan pada tahun 1964 HMI memecat beberapa anggota penasihatnya yang telah alumni karena tidak sesuai dengan revolusi. HMI juga mengecam keras Kasman Singodimedjo yang sedang menghadapi pengadilan di Bogor dan menuntut dihukum sekeras-kerasnya bila bersalah.

Kendati HMI telah berusaha menunjukkan eksistensi dirinya sebagai bagian dari kekuatan revolusioner, namun tetap saja HMI menjadi sasaran CGMI dan/atau PKI untuk dibubarkan. Pada saat saat HMI terdesak itulah Ikatan mahasiswa Muhammadiyah lahir pada tanggal 14 maret 1964 (29 Syawal 1384 H). Itulah sebabnya muncul persepsi yang keliru bahwa IMM dibentuk adalah sebagai persiapan untuk menampung anggota-anggota HMI kalau terjadi dibubarkan. Persepsi yang keliru ini dikaitkan dengan dekatnya hubungan HMI dengan Muhammadiyah. Sebagaimana diketahui bahwa HMI pada mulanya didirikan dan dibesarkan oleh orang-orang Muhammadiyah, maka kalau HMI dibubarkan Muhammadiyah harus menyediakan wadah lain.

Persepsi tersebut adalah keliru, karena kelahiran IMM salah satu faktor historisnya adalah justru untuk membantu dan mempertahankan eksistensi HMI supaya tidak mempan dengan usaha-usaha PKI yang ingin membubarkannya. Sebab, kalau kelahiran IMM diperuntukkan untuk mengganti HMI jika dibubarkan, maka IMM tidak perlu repot-repot terlibat dalam beraksi menentang PKI yang mau membubarkan HMI. Di antara praduga mengapa kehadiran IMM dalam sejarah gerakan mahasiswa dipersoalkan adalah karena sangat dekatnya kelahiran IMM --kendati ide dasarnya sudah ada sejak tahun 1936-- dengan peristiwa G 30 S/PKI. Sehingga muncul pertanyaan (yang menggugat), mengapa IMM yang baru lahir sudah langsung terlibat dalam peristiwa nasional dan sejarah besar dalam pergulatan bangsa melawan dan menghancurkan PKI. Pada tahun 1965, IMM juga ikut bergabung dalam wadah KAMI (Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia), dan Slamet Sukirnantono, salah seorang tokoh DPP IMM, pada saat dibentuknya KAMI menjadi salah satu Ketua Presidium Pusat KAMI. IMM sendiri pada masa-masa awal berdirinya tidak luput dari ancaman dan teror PKI. Reaksi jahat dari PKI terhadap kelahiran IMM tersebut tidak saja terjadi di pusat, tetapi juga di daerah-daerah. Untuk menyelamatkan eksistensi IMM yang baru berdiri itu, maka dalam kesempatan audiensi dan silaturahmi dengan Presiden Soekarno di Istana Negara Jakarta pada tanggal 14 Februari 1965 DPP IMM meminta restunya. "Saja beri restu kepada Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah", demikian pernyataan yang ditandatangani oleh Presiden Soekarno. Karena IMM merupakan kebutuhan intern dan ekstern Muhammadiyah, maka tokoh-tokoh PP Pemuda Muhammadiyah yang sebelumnya bergabung dengan HMI kembali, sekaligus untuk

membina dan mengembangkan IMM. Dalam hal ini juga muncul klaim dan persepsi yang keliru, bahwa IMM dilahirkan oleh HMI. Tokoh-tokoh Pemuda Muhammadiyah khususnya yang terlibat menghembangkan HMI, karena waktu itu IMM belum ada. Sementara keterlibatan mereka di HMI adalah untuk mengembangkan ideologi Muhammadiyah. Buktinya setelah sekian lama ada di HMI, ternyata HMI yang sudah dimasuki oleh mahasiswa dari berbagai kalangan ormas keislaman itu pada akhirnya berbeda dengan orientasi Muhammadiyah. Oleh karena itu adalah wajar jika pada akhirnya mereka kembali ke Muhammadiyah sekaligus untuk turut mengembangkan IMM. Hal ini seperti yang terjadi di Yogyakarta, Jakarta, Riau, Padang, Ujungpandang dan lain lain. Juga perlu dicatat bahwa para tokoh PP Pemuda Muhammadiyah dan NA yang terlibat dalam mengusahakan terbentunya IMM sejak awal sampai berdirinya adalah mereka yang betul-betul tidak pernah terlibat dalam HMI. Berdirinya IMM berdasarkan perjalanan sejarahnya tersebut adalah karena tuntutan dan keharusan sejarah (historical necessity) dalam konteks kehidupan umat, bangsa, dan negara serta dinamika gerakan mahasiswa di Indonesia. Adapun maksud berdirinya IMM adalah: 1. Turut memelihara martabat dan membela kejayaan bangsa; 2. Menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam; 3. Sebagai upaya untuk menopang, melangsungkan, dan meneruskan cita-cita pendirian Muhammadiyah; 4. Sebagai pelopor, pelangsung, dan penyempurna cita-cita pembaruan dan amal usaha Muhammadiyah; 5. Membina, meningkatkan, dan memadukan iman dan ilmu serta amal dalam kehidupan bangsa, umat, dan persyarikatan.

Dinamika Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Seperti halnya organisasi-organisasi lain, dalam karir sejarahnya IMM mengalami dinamika gerakan yang naik turun dan pasang surut. Selama lebih dari tiga setengah dasawarsa ini, IMM telah mengalami empat periode gerakan. Pertama, periode pergolakan dan pemantapan (1964-1971). Kedua, periode pengembangan (1971-1975). Ketiga, periode tantangan (1975-1985). Keempat, periode kebangkitan (1985-?).

Dalam periode pergolakan dan pemantapan ini, IMM yang masih sangat muda harus berhadapan dengan situasi dan kondisi sosial, politik, ekonomi, budaya di tengah kehidupan berbangsa, bernegara dan beragama yang sangat rawan dan kritis. IMM pada saat itu langsung berhadapan dengan kebijakan Manipol Usdek Bung Karno, Nasakom, dan ancaman PKI. Dalam periode ini kegiatan-kegiatan IMM lebih banyak diarahkan kepada pembinaan personil, penguatan organisasi, pembentukan dan pengembangan IMM di kota-kota maupun perguruan tinggi. Dalam periode ini pula pola gerakan, prinsip perjuangan dan perangkat organisasi IMM berhasil ditetapkan.

Dalam periode ini telah terselenggara tiga kali Musyawarah Nasional (Muktamar) dan empat kali Konferensi Nasional (Tanwir) serta terbentuk lima kali formasi kepemimpinan IMM. Selama periode ini Mohammad Djazman Al-Kindi terus menjadi Ketua Umum DPP IMM. Kepemimpinan pertama (DPP Sementara) pra-Munas berlangsung dari tahun 1964-1965, dengan Ketuanya Mohammad Djazman Al-Kindi. Kepemimpinan kedua (1965-1967) adalah hasil Munas I di Surakarta (1-5 Mei 1965). Ketua Umum: Mohammad Djazman Al-Kindi; dan Sekretaris Jendral: A. Rosyad Sholeh. Kepemimpinan ketiga hasil reshuffle pada pertengahan 1966, Ketua Umumnya tetap; dan

Soedibjo Markoes menjadi Pejabat Sekjen. Kepemimpinan keempat (1967-1969) hasil Munas II di Banjarmasin (26-30 November 1967), Ketua Umum tetap; dan Sekjennya adalah Syamsu Udaya Nurdin. Kepemimpinan kelima hasil reshuffle pada Konfernas di Magelang (1-4 Juli 1970), Ketua Umum-nya masih tetap; sedangkan yang menjadi Sekjen adalah Bahransyah Usman.

Selain Djazman, tokoh-tokoh awal IMM lainnya yang terkenal di antaranya seperti: A. Rosyad Sholeh, Soedibjo Markoes, Mohammad Arief, Sutrisno Muhdam, Zulkabir, Syamsu Udaya Nurdin, Nurwijoyo Sarjono, Basri Tambun, Fathurrahman, Soemarwan, Ali Kyai Demak, Sudar, M. Husni Thamrin, M. Susanto, Siti Ramlah, Deddy Abu Bakar, Slamet Sukirnantanto, M. Amien Rais, Yahya Muhaimin, Abuseri Dimiyati, Marzuki Usman, Abdul Hadi W.M. Machnun Husein, dll.

Peran dan kehendak IMM untuk meneguhkan dan memantapkan eksistensinya secara signifikan dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara serta untuk kepentingan ummat dan Muhammadiyah selama periode ini tampak menonjol, baik melalui pernyataan deklarasi-deklarasinya --seperti Deklarasi Kota Barat 1965 dan Deklarasi Garut 1967-- maupun dengan aktivitas kegiatan dan artikulasi gerakannya. Mulai tahun 1971-1975 disebut sebagai periode pengembangan, karena masalah-masalah yang menyangkut konsolidasi pimpinan dan organisasi tidak terlalu banyak dipersoalkan. Orientasi kegiatan dan dinamika gerakan IMM sudah mulai banyak diarahkan pada pengembangan organisasi seperti melalui program-program sosial, ekonomi, dan pendidikan. Dinamika gerakan IMM ini semakin memperteguh concern IMM terhadap masalah-masalah kehidupan mahasiswa, umat, dan bangsa di tengah gejolak sosial dan modernisasi pembangunan. Hal ini misalnya seperti yang dinyatakan dalam Deklarasi Baiturrahman 1975, maupun dalam hasil rumusan pemikiran dari Munas dan Konferensi IMM. Dalam periode ini hanya terjadi satu kali suksesi kepemimpinan di tingkat DPP IMM. Munas III di Yogyakarta (14-19 Maret 1971) menghasilkan A. Rosyad Sholeh sebagai Ketua Umum; dan Machnun Husein sebagai Sekjen. Kemudian Konfernas V di Padang memutuskan penambahan personalia staf DPP IMM, yaitu: Alfian Darmawan, Abbas Sani, Maksun Saidrum, Ajeng Kartini, Dahlan Rais, Ahmad Syaichu, dan Arief Hasbu.

Dalam periode ini pula terjadi peristiwa penting yang mewarnai keberadaan IMM, yaitu dalam hal pembentukan KNPI (Komite Nasional Pemuda Indonesia) dan peristiwa Malari (Malapetaka Lima Belas Januari 1974). Waktu itu IMM tidak diakui sebagai salah satu pencetus kelahiran KNPI (23 Juli 1973), karena tidak ikut menandatangani Deklarasi Pemuda Indonesia sebagai landasan berdirinya KNPI. Sementara, pembuat dan perumus Deklarasi Pemuda Indonesia itu adalah Slamet Sukirnantanto, salah seorang anggota DPP IMM, yang waktu itu tidak bersedia menandatangani deklarasi tersebut atas nama IMM. Ketidakikutsertaan Slamet Sukirnantanto menandatangani deklarasi tersebut, dikarenakan pembentukan wadah generasi muda itu semula adalah secara perorangan dan sekedar sebagai wadah komunikasi antara generasi muda serta keanggotaannya bersifat pribadi. Namun ternyata pada saat penandatanganan harus mengatasnamakan organisasi. Dalam hal inilah letak persoalannya. Secara organisatoris, Slamet Sukirnantanto menolak menandatangani deklarasi itu, tetapi secara pribadi ia bersedia. Ketika terjadi peristiwa

Malari --yang berakibat pada tindakan represif terhadap gerakan mahasiswa--, maka pada tanggal 16 Januari 1974 IMM mengirim surat kepada Presiden Soeharto untuk mengadakan referendum dalam upaya mencari kebenaran obyektif mengenai kebijaksanaan yang dilakukan oleh pemerintah. Upaya ini diharapkan dapat tetap menjaga keutuhan persatuan serta kepentingan bangsa dan negara yang lebih besar jangan sampai menjadi korban para pemegang policy. Dalam menghadapi aksi Malari tersebut, IMM berharap agar pemerintah tidak memadamkan aspirasi dan idealisme mahasiswa.

Di antara ide dan gagasan pemikiran IMM pada periode ini adalah mengenai pendidikan. Dalam hal ini IMM menyadari bahwa pendidikan adalah suatu usaha "human investmen" yang penting untuk melukis dan mewarnai masa depan bangsa. Pendidikan merupakan salah satu unsur terpenting untuk menumbuhkan dan membina mental attitude bangsa. Kemudian mengenai masalah organisasi mahasiswa, IMM berpendapat bahwa keberadaannya harus berfungsi sebagai organisasi kader dan sekaligus dakwah. Karena itu organisasi mahasiswa harus menganut asas potensi, partisipasi, keluwesan, dan kesederhanaan.

Sedangkan dalam hal generasi muda, IMM berpendangan bahwa pembinaannya harus senantiasa dikaitkan dengan strategi pembangunan nasional yang berjangka panjang. Untuk itu perlu adanya pembauran antara konsep generasi muda sebagai pelanjut dengan konsep generasi muda sebagai pembaharu. Demikian pula halnya dengan perpaduan antara pengertian kader dan pioner.

Setelah melewati periode pergolakan dan pemantapan serta pengembangan, pada tahun 1975-1985 IMM berada dalam periode tantangan. Dalam periode ini Muktamar IV IMM di Semarang (21-25 Desember 1975), menghasilkan Zulkabir sebagai Ketua Umum; dan M. Alfian Darmawan sebagai Sekjen. Dalam periode ini IMM sebetulnya tidak menghadapi konflik atau tantangan yang berarti, yang menyebabkan organisasi ini mengalami stagnasi. Namun persoalannya terletak pada terjadinya kevakuman kepemimpinan di tingkat nasional (DPP IMM) selama lebih kurang satu dasawarsa. Selama periode ini di tingkat DPP tidak terjadi suksesi dan regenerasi kepemimpinan, atau dengan kata lain tidak terselenggara musyawarah nasional atau muktamar, yang seharusnya berlangsung pada tahun 1978.

Kevakuman dan terjadinya kemandegan IMM di DPP ini menimbulkan keprihatinan dan keheranan bagi banyak pihak, khususnya di kalangan Muhammadiyah dan ortomnya. Pada tahun 1983, H.S. Prodjokusumo misalnya menanggapi masalah ini dalam tulisannya IMM Bangkitlah. Kemudian dengan nada menyindir dan dalam gaya personifikasi -- tanpa bisa menutupi kekecewaannya terhadap IMM-- Umar Hasyim menulis: "Merenungi sejarahmu, kita jadi heran, ketika sejak Muktamar ke-4 tahun 1975 itu anda dengan lelapnya tidur nyenyak selama sepuluh tahun, karena pada bulan April 1986 engkau baru berhasil bermuktamar dan memilih kepengurusan DPP lagi. Sungguh luar biasa sekali, suasana dunia di mana anda berada ini demikian gegap gempitanya, tetapi anda bisa lelap tidur." Namun demikian, kendati di tingkat DPP terjadi kevakuman, justru di bawahnya IMM tetap eksis dan bergerak. Aktivitas kegiatan, program kerja, dan kaderisasi di

tingkat bawah itu terus berjalan. Kevakuman DPP IMM tidak mempengaruhi aktivitas IMM di Daerah, Cabang, dan Komisariat. Identitas IMM ternyata begitu kuat melekat pada jiwa para pimpinan dan kader IMM di bawah. Di level bawah IMM masih tetap tumbuh subur. Meski berada dalam periode tantangan, IMM masih tetap berusaha untuk melahirkan ide dan gagasan pemikirannya. Di antara ide dan gagasannya itu adalah mengenai perlunya Menteri Negara Urusan Pemuda. Ide dan gagasan pemikiran tersebut berangkat dari latar belakang kemahasiswaan dan kepemudaan yang tidak mempunyai saluran yang semestinya. Untuk itulah IMM mengusulkan kepada Presiden Soeharto untuk mengangkat seorang Menteri Negara Urusan Pemuda yang menyelenggarakan dan membina komunikasi dengan seluruh eksponen generasi muda. Kemudian, ketika terjadi Keputusan 15 Nopember 1978 (KNOP 15), IMM mengusulkan perlunya pengendalian dan pengarahan konsumsi masyarakat. Hal ini mengingat telah terjadinya bentuk konsumsi yang non-esensial dan tidak produktif. Di samping itu, perlunya perlindungan dan pembinaan industri kecil agar dapat bersaing dengan industri besar, oleh IMM dikemukakan kepada pemerintah. Demikian pula halnya dengan pemerataan pendapatan dan kesempatan kerja perlu diperhatikan oleh pemerintah. Setelah mengalami kevakuman dan kemandegan selama satu dasawarsa itu, maka pada tahun 1985 IMM mulai memasuki periode kebangkitan. Periode ini dimulai dengan adanya SK PP Muhammadiyah No. 10/PP/1985 tertanggal 31 Agustus 1985 tentang pembentukan DPP (Sementara) IMM. DPP(S) ini terdiri dari:

- Ketua : Immawan Wahyudi (DIY)
- Ketua I : Drs. Anwar Abbas (DKI)
- Ketua II : Drs. M. Din Syamsuddin (DKI)
- Ketua III : Farid Fathoni AF (Surakarta)
- Sekretaris I : Mukhlis Ahasan Uji (DIY)
- Sekretaris II : Nizam Burhanuddin (DKI)
- Sekretaris III: Agus Syamsuddin (DIY)
- Bendahara I : St. Daulah Khoiriati (DIY)
- Bendahara II : Asmuyeni Muchtar (DKI)

Setelah dilantik pada tanggal 1 september 1985, DPP(S) IMM mulai menata organisasi dan menjalankan aktivitasnya. Pada tanggal 7-10 desember 1985 DPP(S) berhasil mengadakan Tanwir ke-7 IMM di Surakarta. Tanwir yang bertemakan "Bangkit dan Tegaskan Identitas Ikatan" ini pada akhirnya mampu membangkitkan IMM dari tidurnya yang panjang. Hingga kemudian pada tanggal 14-18 april 1986 DPP(S) berhasil menyelenggarakan Mukhtamar ke-5 IMM di Padang, Sumatra Barat. Selain pada akhirnya berhasil menyusun kepengurusan DPP IMM yang baru periode 1986-1989 (Ketua Umum: Nizam Burhanuddin; dan Sekjen: M. Arifin Nawawi), Mukhtamar V itu juga mampu merumuskan konsep pengembangan wawasan bangsa dan umat kaitannya dengan identitas Ikatan, penyusunan ulang sistem perkaderan, pengembangan organisasi dan pembahasan program kerja. Dalam Mukhtamar V itu IMM juga bisa menghasilkan Deklarasi Padang, yang mengartikulasikan visi dan keberpihakan IMM terhadap masalah-masalah dunia internasional, umat Islam di Indonesia, Muhammadiyah, IMM sendiri, serta pembinaan generasi muda dan mahasiswa. Dalam periode kebangkitan ini IMM tidak lepas dari halangan dan tantangan. Artikulasi gerakan IMM pun mengalami

dinamika dan fluktuasi. Dalam periode kebangkitan (sampai sekarang) ini IMM telah mengalami beberapa kali Muktamar dan Tanwir, yang berperan untuk mempertahankan eksistensi IMM dan menyinambungkan regenerasi kepemimpinannya.

Muktamar VI di Ujungpandang (7-12 Juli 1989) menghasilkan DPP IMM (periode 1989-1992), dengan M. Agus Samsudin sebagai Ketua Umum; dan Fauzan sebagai Sekjen. Kemudian Tanwir VIII di Medan (24-28 April 1991), memutuskan Abdul Al Hasyir sebagai Sekjen, menggantikan Fauzan. Pada tanggal 25-31 Desember 1992 IMM berhasil menyelenggarakan Muktamar VII di Purwokerto, yang menghasilkan Tatang Sutahyar W sebagai Ketua Umum; dan Syahril Syah sebagai Sekjen untuk periode 1993-1995. Selanjutnya, pada Tanwir IX di Palembang (7-11 Juli 1994) terjadi pergantian Ketua Umum dari Tatang Sutahyar oleh Syahril Syah sebagai Pj. Ketua Umum, dan Armynt Gultom sebagai Sekjen. Selanjutnya, pada tanggal 25-31 Maret 1995 IMM kembali mengadakan Muktamar VIII di Kendari yang berhasil memilih Syahril Syah sebagai Ketua Umum dan Abd. Rohim Ghazali sebagai Sekjen untuk periode 1995-1997. Kemudian pada tanggal 22 Februari-2 Maret 1997, IMM kembali mengadakan Muktamar IX di Medan yang menghasilkan Irwan Badillah sebagai Ketua Umum dan M. Irfan Islami Dj. sebagai Sekjen untuk periode 1997-2000. Sampai sekarang IMM memiliki 26 DPD dan 115 PC, serta anggota sebanyak kurang lebih 567.000 orang. Anggota IMM tersebut tersebar di berbagai perguruan tinggi negeri dan swasta serta perguruan tinggi Muhammadiyah khususnya. Artikulasi gerakan IMM tidak terbatas dalam aktivitas dan pelaksanaan program-program kerja yang rutin belaka, tetapi juga aktif dalam menyikapi dan merespons persoalan-persoalan sosial-politik dan kemanusiaan, baik dalam skala lokal, nasional, maupun global. Kepedulian dan keberpihakan IMM seperti ini, karena IMM tidak ingin teralienasi oleh dinamika zaman dan terbawa arus secara pasif oleh perubahan sosial yang terus bergulir. Begitu pula ketika terjadi aksi-aksi gerakan reformasi yang banyak dilakukan kalangan mahasiswa dan kaum intelektual pada tahun 1997, IMM tidak ketinggalan melibatkan diri dan aktif bergerak di dalamnya. Baik di tingkat pusat maupun daerah, bersama eksponen Angkatan Muda Muhammadiyah lainnya IMM bergerak untuk mendukung dan menyukseskan aksi gerakan reformasi yang berhasil melengserkan Presiden Soeharto dari tampuk kekuasaannya. Di Yogyakarta misalnya IMM bergabung dalam Komnas AMM bersama organisasi otonom lainnya dalam mengartikulasikan gerakan dan tuntutan reformasi. Selain itu di beberapa Komisariat dan Korkom, IMM juga banyak mengadakan aksi dan gerakan serupa. Begitu pula dengan IMM di daerah-daerah lainnya, seperti di Jakarta yang menamakan gerakannya dengan FAKSI IMM (Front Aksi untuk Reformasi). Di Surabaya dan Ujungpandang IMM ada dalam GEMPAR (Gerakan Mahasiswa Pro Amien Rais) dsb. Selain itu, ketika akan berlangsung jajak pendapat penentuan status Timor-Timur pada tanggal 30 Agustus 1999, IMM juga berpartisipasi aktif dalam pemantauannya. Pada waktu akan, selama, dan sesudah berlangsung jajak pendapat tersebut IMM telah mengirimkan Immawan Wachid Ridwan (Biro Kerjasama Luar Negeri dan Hubungan Internasional DPP IMM) ke Timor-Timur untuk melakukan pemantauan bersama LSM dan OKP lainnya.

Susunan dan Struktur Organisasi Seperti Muhammadiyah dan organisasi otonom lainnya, secara vertikal IMM memiliki susunan organisasi mulai dari tingkat pusat sampai

komisariat. Lengkapnya: Komisariat, Cabang, Daerah, dan Pusat. Kepemimpinannya disebut Pimpinan Komisariat (PK), Pimpinan Cabang (PC), Dewan Pimpinan Daerah (DPD), dan Dewan Pimpinan Pusat (DPP). Komisariat ialah kesatuan anggota dalam suatu fakultas/akademi atau tempat tertentu. Cabang ialah kesatuan komisariat-komisariat dalam suatu Daerah Tingkat II atau daerah tertentu. Daerah ialah kesatuan cabang-cabang dalam suatu Propinsi/Daerah Tingkat I. Pusat ialah kesatuan daerah-daerah dalam Negara Republik Indonesia. Sebagai salah satu organisasi otonom Muhammadiyah, maka masing-masing level dari susunan organisasi tersebut mempunyai hubungan keorganisasian yang horizontal dengan Pimpinan Muhammadiyah. DPP IMM dengan PP Muhammadiyah; DPD IMM dengan PW Muhammadiyah; PC IMM dengan PD Muhammadiyah; dan PK IMM dengan PC/PR Muhammadiyah.

Adapun struktur organisasi IMM, berdasarkan hasil Muktamar IX di Medan adalah sebagai berikut. Mulai dari tingkat DPP sampai PK terdiri dari Ketua Umum, Sekretaris Jenderal --khusus untuk DPP, sedang untuk DPD sampai PK: Sekretaris Umum--, Bendahara Umum (bersama dua wakilnya); ditambah dengan beberapa Ketua Bidang dan Sekretaris Bidang (Organisasi, Kader, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, Hikmah, Sosial Ekonomi, dan Immawati). Struktur organisasi ini dibantu oleh sebuah biro, beberapa lembaga studi, dan dua korps (Biro Kerjasama Luar Negeri dan Hubungan Internasional [hanya ada di DPP]; Lembaga Studi Kelembagaan dan Pengembangan Organisasi; Lembaga Pengkajian dan Pengembangan Sumber Daya Kader; Lembaga Pengembangan Ilmu Agama dan Sosial Budaya; Lembaga Penelitian, Pengkajian dan Penerapan Teknologi; Lembaga Pers IMM [hanya ada di tingkat DPP dan DPD]; Lembaga Pengkajian Strategi dan Kebijakan; Lembaga Kesejahteraan Rakyat dan Lingkungan Hidup; Lembaga Studi dan Pengembangan Ekonomi Ummat [istilah lembaga hanya untuk DPP dan DPD, sedang di PC menggunakan istilah departemen]; Korps Instruktur [hanya ada di tingkat DPP sampai PC]; dan Korps Immawati). Kemudian di tingkat PK, departemen yang ada adalah: Departemen Organisasi, Kader, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, Hikmah, dan Sosial Ekonomi.

## **[[sunting](#)] Program Kerja**

Secara umum program kerja IMM dilaksanakan untuk memantapkan eksistensi organisasi demi mencapai tujuannya, "mengusahakan terbentuknya akademisi Islam yang berakhlak mulia dalam rangka mencapai tujuan Muhammadiyah" (AD IMM Pasal 6). Untuk menunjang pencapaian tujuan IMM tersebut, maka perencanaan dan pelaksanaan program kerja diorientasikan bagi terbentuknya profil kader IMM yang memiliki kompetensi dasar aqidah, kompetensi dasar intelektual, dan kompetensi dasar humanitas. Sebagai organisasi yang bergerak di bidang keagamaan, kemasyarakatan, dan kemahasiswaan, maka program kerja IMM pada dasarnya tidak bisa lepas dari tiga bidang garapan tersebut. Perencanaan dan pelaksanaan program kerja tersebut memiliki stressing yang berbeda-beda (berurutan dan saling menunjang) pada masing-masing level kepemimpinan.

- Di tingkat Komisariat: kemahasiswaan, perkaderan, keorganisasian, kemasyarakatan.

- Di tingkat Cabang: Perkaderan, kemahasiswaan, keorganisasian, kemasyarakatan.
- Di tingkat Daerah: keorganisasian, kemasyarakatan, perkaderan, kemahasiswaan.
- Di tingkat Pusat: Kemasyarakatan, keorganisasian, perkaderan, kemahasiswaan.

Berkaitan dengan program kerja jangka panjang, maka sasaran utamanya diarahkan pada upaya perumusan visi dan peran sosial politik IMM memasuki abad XXI. Hal ini tidak lepas dari ikhtiar untuk memantapkan eksistensi IMM demi tercapainya tujuan organisasi (lihat AD IMM Pasal 6). Sasaran utama dan program jangka panjang ini merujuk pada dan melanjutkan prioritas program yang telah diputuskan pada Mukktamar VII IMM di Purwokerto (1992). Program dimaksud menetapkan strategi pembinaan dan pengembangan organisasi secara bertahap, sistematis, dan berkelanjutan selama lima periode muktamar IMM.

Periode Mukktamar IX diarahkan pada pemantapan konsolidasi internal (organisasi, pimpinan, dan program) dengan meningkatkan upaya pembangunan kualitas institusional dan pemantapan mekanisme kaderisasi dalam menghadapi perkembangan situasi sosial politik nasional yang semakin dinamis. Periode Mukktamar X diarahkan pada penguatan orientasi kekaderan dengan meningkatkan mutu sumber daya kader sebagai penopang utama kekuatan organisasi dalam transformasi sosial masyarakat. Periode Mukktamar XI diarahkan pada penguatan peran institusi organisasi baik secara internal (pelopor, pelangsup, dan penyempurna gerakan pembaruan dan amal usaha Muhammadiyah) maupun eksternal (kader umat dan kader bangsa).

Periode Mukktamar XII diarahkan pada pemantapan peran IMM dalam wilayah kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara memasuki era globalisasi yang lebih luas. Periode Mukktamar XIII diarahkan pada pemberdayaan institusi organisasi serta pemantapan peranan IMM dalam kehidupan sosial politik bangsa.

Kemudian pelaksanaan program jangka panjang itu memiliki sasaran khusus pada masing-masing bidangnya. Bidang Organisasi diarahkan pada terciptanya struktur dan fungsi organisasi serta mekanisme kepemimpinan yang mantap dan mendukung gerak IMM dalam mencapai tujuannya. Program konsolidasi gerakan IMM juga diarahkan bagi terciptanya kekuatan gerak IMM baik ke dalam maupun ke luar sebagai modal penggerak bagi pengembangan gerakan IMM. Bidang Kaderisasi diarahkan pada penguatan tiga kompetensi dasar kader IMM (aqidah, intelektual, dan humanitas) yang secara dinamis mampu menempatkan diri sebagai agen pelaku perubahan sosial bagi kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara. Bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi diarahkan pada pembangunan budaya iptek dan penguatan paradigma ilmu yang melandasi setiap agenda dan aksi gerakan IMM dalam menyikapi tantangan zaman. Bidang Hikmah diarahkan pada penguatan peran sosial politik IMM di tengah kehidupan berbangsa dan bernegara, khususnya dalam peran serta dan partisipasi sosial politik generasi muda (mahasiswa). Bidang Sosial Ekonomi diarahkan pada penumbuhkembangan budaya dan wawasan wiraswasta di lingkungan IMM, terutama dalam membangun dan memberdayakan potensi ekonomi kerakyatan. Bidang Immawati diarahkan pada upaya penguatan jati diri dan peran aktif sumber daya kader puteri IMM dalam transformasi sosial menuju masyarakat utama.

## **[sunting]** Pimpinan

### **[sunting]** Tingkatan Kepemimpinan

- DPP (Dewan Pimpinan Pusat) berkedudukan di Ibukota Indonesia
- DPD (Dewan Pimpinan Daerah) berkedudukan di Ibukota Provinsi
- PC (Pimpinan Cabang) berkedudukan di Ibukota Kabupaten
- PK (Pimpinan Komisariat) berkedudukan di Fakultas/Universitas

Selain itu, IMM juga mempunyai lembaga pimpinan yang dinamakan dengan KORKOM (koordinator komisariat) yang dibentuk di suatu universitas yang mempunyai komisariat lebih dari 2. Tugasnya adalah untuk mengkoordinir dan membantu kerja Pimpinan Cabang di suatu Universitas.

Ketua umum periode 2008-2010 adalah Rusli Halim Fadli.

## **[sunting]** Bibliografi

- Agham, Noor Chozin, Melacak Sejarah Kelahiran dan Perkembangan Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Dari Muktamar I sampai Muktamar V, Jakarta: Yayasan Penerbit Pers Perkasa bersama Penerbit dan Percetakan Dikdasmen PP Muhammadiyah, 1997.
- Batubara, Cosmas, "Kilas Balik Kelahiran Orde Baru dan Peranan Para Mahasiswa" dalam Haris Munandar (Peny.), Pembangunan Politik, Situasi Global, dan Hak Asasi di Indonesia: Kumpulan Esei Guna Menghormati Prof. Miriam Budiardjo, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1994.
- DPP IMM, Tanfidz Keputusan Muktamar VIII IMM, 1995.
- -----, Tanfidz Keputusan Muktamar IX IMM, 1997.
- Fathoni AF, Farid, Kelahiran yang Dipersoalkan, Dua Puluh Enam Tahun Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah 1964-1990, Surabaya: PT Bina Ilmu, 1990.
- Hamid, Almisar et al., Seperempat Abad Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah, Jakarta: DPP IMM, 1989.
- Hasyim, Umar, Muhammadiyah Jalan Lurus dalam Tajdid, Dakwah, Kaderisasi dan Pendidikan: Kritik dan Terapinya, Surabaya: PT Bina Ilmu 1990.
- Noer, Deliar, Partai Islam di Pentas Politik Nasional 1945-1965, Jakarta: Grafiti Pers, 1987.
- Tanja, Victor I., Himpunan Mahasiswa Islam, Sejarah dan Kedudukannya di Tengah Gerakan-gerakan Muslim Pembaharuan di Indonesia, Jakarta: Sinar Harapan, 1982.

# Denyut Politik Muhammadiyah

## Imam Addaruqutni

Mantan Ketua Umum Pemuda Muhammadiyah

Muhammadiyah adalah gerakan dakwah *amar ma'ruf nahi munkar* dan tajdid yang bertujuan untuk

menjunjung tinggi dan menegakkan agama Islam sehingga terwujud masyarakat Islam yang sebenarnya.

Keduanya memerlukan *mindset* pemikiran keislaman yang orisinal. Pertanyaannya adalah seperti apakah konstruk atau tipologi umum pemikiran Islam Muhammadiyah yang menjadi latar belakang gerakan tersebut?

Klaim Muhammadiyah adalah bahwa Islam yang murni dan tidak mengandung anasir takhayul, bid'ah,

*churrafat* (TBC) adalah Islamnya Muhammadiyah. Jika dirunut, maka Islam non-TBC adalah Islam

yang dianut oleh para pemeluk Islam awal yang benar, yaitu mereka yang hidup pada masa Nabi Muhammad SAW.

Secara umum, corak pemikiran Islam penggagas Muhammadiyah, KH Ahmad Dahlan, berkisar pada

penekanan praktik Islam salaf (Alquran dan hadis) sebagai kritik atas Islam tradisional (*taqlid*) yang

bercorak sinkretis karena pengaruh adat istiadat lokal. Jadi singularitas Islam direkonstruksi lagi menjadi Islam sebagaimana mestinya. Karena itu *tajdid* yang secara literal berarti pembaruan, dalam

Muhammadiyah berarti memperbarui pemahaman (Islam) dengan kembali kepada keaslian Islam.

Mengingat ketika Muhammadiyah didirikan pada 1912 NU dan Negara Republik Indonesia belum lahir,

serta oleh karena realitasnya bahwa masyarakat telah diintegrasikan ke dalam negara, maka transformasi sosial kemasyarakatan harus divisikan sebagai upaya menuju transformasi kenegarabangsaan. Dengan demikian, Muhammadiyah sejatinya menggagas juga praktik kepolitikan

sejalan dengan cita-cita ideologisnya meskipun tidak harus menjadi partai politik.

Konstruk pemikiran KH Dahlan pada tahap inisiasi, fondasi, dan formasi ini dapat dikatakan tahap ideologisasi dan penjatidirian persyarikatan yang mengusung harakah *tajdid* dengan corak kultural

akomodatif. Kultural atau politik garam ketika itu adalah politik atau siasat untuk menghindari intimidasi

dan represi pemerintah Hindia Belanda. Sedangkan akomodasi dilakukan karena beliau bisa menerima donasi pemerintah jajahan bagi fasilitasi amal usaha persyarikatan tanpa mengorbankan

pendirian dan prinsip perjuangan.

Corak bijak perjuangan kultural ini sama dengan yang dilakukan Boedi Oetomo bahkan kiranya juga

analog dengan perjuangan sembunyi-sembunyi dan terang-terangan Nabi Muhammad dalam suasana

represi kafir jahiliyah. Di sinilah corak profetik perjuangan KH Dahlan dapat dirunut dan diapresiasi.

## Era Berpolitik

Setelah kepemimpinan KH Ahmad Dahlan dapat kita sebut di antara yang fenomenal adalah Ki Bagoes Hadikusumo, politisi dan negarawan Muhammadiyah yang mewakili Muslim modernis. Beliaulah yang dengan ketajaman visi politiknya mencoba mempertahankan tujuh kata dalam Piagam

Jakarta masuk Preambul UUD'45. Kelegawaan beliau untuk akhirnya menerima bujukan Mr Kasman

Singodimejo, atas permintaan Bung Karno, untuk merelakan tujuh kata tersebut dihilangkan pada

dasarnya agar masyarakat dan bangsa Indonesia mengetahui dengan jelas bahwa Muhammadiyah benar-benar telah memberikan sumbangsih yang sangat besar dan diterminan bagi terwujudnya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Ini juga harus dimengerti bagaimana Muhammadiyah ingin menghargai segala pengorbanan kemerdekaan berupa jiwa-raga dan harta benda yang untuk sebagian besar telah diberikan oleh umat Islam. Kegigihannya dan militansinya dalam memperjuangkan aspirasi keislaman tersebut patut menjadi teladan. Namun, sangat disayangkan bahwa kalangan elite Muhammadiyah sendiri saat ini sering salah paham bahkan secara verbal cenderung menutupinya atau memberangus catatan sejarah kepolitikan Muhammadiyah.

Demikian juga KH Mas Mansur. Beliau menekankan konsolidasi kemuhammadiyah dengan langkah dua belasnya yang terkenal menyangkut *ta'fil Al Islam* sampai dibentuknya Majelis ke-Tarjih-an yang mengurus tata-cara peribadatan. Di era KH Mas Mansur inilah aktivitas politik Muhammadiyah bukan hanya pada diskursus melainkan masuk ke tataran praktis yakni dengan berperan dalam Partai Masyumi yang juga didirikan di gedung Muhammadiyah. Ketika Masyumi dibubarkan, Muhammadiyahlah yang paling merasa kehilangan wadah perpolitikan.

Ketika NU berubah menjadi parpol, Muhammadiyah mendirikan Partai Muslimin Indonesia (Parmusi) di kantor PP Muhammadiyah Jakarta setelah tidak berhasil membujuk Presiden Soeharto untuk menghidupkan kembali Masyumi. Parmusi dipimpin oleh almarhum KH Jarnawi Hadikusumo (ketua umum) dan H Lukman Harun (sekjen) yang kemudian diambil alih oleh HJ Naro dan H Imran Kadir atas dukungun Presiden Soeharto karena terakomodasinya beberapa tokoh Masyumi dalam Parmusi.

Pada era KH AR Fahrudin, Muhammadiyah berjalan dengan membangun kewibawaan antara keteduhan, keteladaan, kesabaran, keikhlasan, dan ketegasan pendirian. Beliau tanpa pamrih dan tidak terobsesi oleh macam-macam *politicking*. Pada kepemimpinan KH A Azhar Basyir, penggiatan pemikiran keislaman semakin mendapat suntikan dengan aroma pengayaan dan penguatan titeratur keilmuan *turats* klasik yang semakin menipis di kalangan Muhammadiyah. Pascakepemimpinan KH A. Azhar Basyir, Muhammadiyah dipimpin oleh Amien Rais dan Syafi'i Ma'arif merefleksikan jati diri genre Muhammadiyah ultramodern.

Pada era inilah Muhammadiyah telah mencapai kematangannya untuk menggulirkan wacana penggantian rezim politik yang berjalan hampir satu dekade (1993) sampai *lengser*-nya Soeharto dari kursi presiden (1998). Ini jelas-jelas menyangkut *power struggle*, praktik proolitik riil, dan Muhammadiyah tidak melarang kalau tidak kita katakan mendukung penuh. Fenomena Pak Amien saat itu adalah fenomena Islam intelektual, aktual, dan struktural. Beliau terlibat dalam penjatuhan rezim politik serta perebutan kekuasaan meskipun kemudian kursi presiden 'diberikan' ke Gus Dur . Berbeda dari Pak Amien, Pak Syafe'i Ma'arif juga merupakan refleksi Muhammadiyah dengan corak Islam historis, intelektual, kultural, dan aktual-plural. Islam yang autentik

pada dasarnya adalah corak Islam historis ini. Kajian Islam historis pastilah akan menuntun kita pada Islam sebagaimana yang dicontohkan dengan sebagaik-baiknya oleh Nabi SAW.

#### **Varian lain**

Adapun beberapa varian corak pemikiran Islam lainnya dapat disebut secara sambil lalu ada pada

Amien Abdullah yang dapat dikatakan sebagai varian Islam filosofis hermeneutis yang potensial memperkaya kedalaman pemahaman melalui jelujur pendekatan multidisipliner dan tata nilai. Pemikiran Munir Mul Khan dapat dikatakan sebagai varian Islam isoteris sosiologis yang potensial memperkaya kedalaman pemahaman melalui jelujur pendekatan sosiokultural-plural.

Pemikiran Yunahar Ilyas dapat dikatakan sebagai varian Islam fundamental yang potensial memperkaya kedalaman pemahaman melalui jelujur Alquran dan sunah. Sedang pandangan Haedar

Nasir dapat dikatakan sebagai varian Islam ( Muhammadiyah) ideologis yang potensial memperkaya

pemahaman melalui pewacanaan konsep-konsep dasar kemuhammadiyah sebagai gerakan dak'wah non-politik saja. Haedar Nasir lah yang paling sering dan paling banyak menyebut kata ideologi serta berwacana tentang ideologi dalam kerangka Muhammadiyah.

Selanjutnya, pertanyaan yang mungkin tertinggal adalah bagaimana dengan Din Syamsuddin dapat

dijelaskan saat ini? Penulis sendiri belum dapat memahami baik arah varian pemikiran maupun aktivisme kepemimpinannya. Apresiasi publik mengatakan bahwa untuk sementara beliau lebih tampak sebagai Muhammadiyah politis daripada varian-varian lainnya. Din lah satu-satunya Ketua

Umum PP Muhammadiyah yang paling banyak melakukan *road show* ke sejumlah parpol bahkan ikut

membidani sayap Islam dalam salah satu parpol.

Lantas timbul spekulasi dan pertanyaan apakah Din berkeinginan maju dalam bursa Pemilihan Presiden 2009 mendatang dan terobsesi ingin jadi wakil presiden? Kata banyak orang kemungkinan

demikian, dan demikian pulalah pertanyaan kritis yang diajukan oleh Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) dan Ikatan Remaja Muhammadiyah (IRM) kepada Din saat Sidang Tanwir yang

lalu. Kalau positif maka ini berarti kemajuan dan dinamisme kepolitikan yang pertama kali ditampilkan

oleh seorang Ketua Umum PP Muhammadiyah.

#### **Ikhtisar**

- Muhammadiyah tak hanya memiliki warna sejarah kultural, tapi juga terlihat ikut mewarnai arena politik.

- Sangat disayangkan, sebagian elite Muhammadiyah saat ini sering salah paham, bahkan secara

verbal cenderung menutupi atau memberangus catatan sejarah kepolitikan Muhammadiyah.

- Ketua Umum PP Muhammadiyah saat ini, Din Syamsuddin, menurut apresiasi publik juga lebih

terlihat sebagai tokoh Muhammadiyah yang politis.

- [Home](#)
- 
- [BERITA](#)

- 
- BULETIN
  - Kumpulan Materi
    - BILA IMAN SUDAH BENAR
    - INDIKATOR PRIBADI MUSLIM
    - Meraih Khusnul Khatimah
  - Ust. Drs. Mulyono
    - Benci dan Cinta Karena Allah
    - Membangun Pola Pikir Islami
    - Mengisi Tahun Baru
    - Mutiara Rohani Kehidupan
    - Tiga Sifat yang Timbul Karena Beragama
  - Ust. Drs. Slamet Santoso
  - Ust. Ihsan Syaifudin
  - Ust. KH. Wahyudin
- 
- HIKMAH
  - Manajemen Qolbu
    - Beratkah berucap Terima Kasih
  - Mar'athus Shalihah
    - Berkomunikasi dengan Pasangan
- 
- LANDASAN
  - Anggaran Dasar Muhammadiyah
  - Anggaran Rumah Tangga
  - Khitah Berbangsa
  - Khitah Perjuangan
  - Matan Keyakinan
  - Muhammadiyah Jelang 1 Abad
  - Muqoddimah Anggaran Dasar
- 
- ORG.OTONOM
  - Ikatan Pelajar Muhammadiyah
  - Kwarda Hizbul Wathan
  - PD 'Aisyiyah
  - PD Nasyiatul 'Aisyiyah
  - Pemuda Muhammadiyah
  - Pimda Tapak Suci
- 
- PROFIL
  - Kantor Sekretariat
  - Lembaga
    - Hukum & HAM
    - Pustaka
    - Seni & Budaya
  - Majelis

- [Dikdasmen](#)
- [Ekonomi & Kewirausahaan](#)
- [Kesehatan & Kesejahteraan Masyarakat](#)
- [Pemberdayaan Masyarakat](#)
- [Pendidikan Kader](#)
- [Tabligh & Dakwah Khusus](#)
- [Tarjih & Tajdid](#)
- [Wakaf & ZIS](#)
- [Pimpinan Cabang](#)
- [Susunan Pengurus](#)
- 
- [SALAM](#)

#### HIKMAH

"Dan Hendaklah diantara kamu ada segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh (berbuat) yang Ma'ruf dan mencegah yang munkar. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung." (QS Ali Imran : 104)

#### KALENDER

September 2009

**M T W T F S S**

[« Jul](#)

1 2 3 4 5 6  
 7 8 9 10 11 12 13  
 14 15 16 17 18 19 20  
 21 22 23 24 25 26 27  
 28 29 30

#### ARSIP

#### FORUM SILATURRAHMI

#### KATEGORI POSTING

- [BERITA](#) (4)
- [HIKMAH](#) (5)
- [KAJIAN MUSLIMAH](#) (9)
- [MAR'ATUSH SHALIHAH](#) (5)
- [OASE IMAN](#) (4)
- [SHIRAH SHOHABIYAH](#) (5)
- [TAUSHIYAH](#) (4)

## [Muhammadiyah Jelang 1 Abad](#)

**KEPUTUSAN MUKTAMAR MUHAMMADIYAH KE-45**

**TENTANG**

**PERNYATAAN PIKIRAN**  
**MUHAMMADIYAH JELANG SATU ABAD**

***(Zhawahir al Afkar al Muhammadiyyah 'Abra Qarn min al –Zaman)***

*Bismillahirrahmanirrahiim*

Bahwa keberhasilan perjuangan Muhammadiyah yang herjalan hampir satu abad pada hakikatnya merupakan rahmat dan karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala yang patut disyukuri oleh seluruh warga Persyarikatan. Dengan modal keikhlasan dan kerja keras segenap anggota disertai dukungan masyarakat luas Muhammadiyah tidak kenal lelah melaksanakan misi da'wah dan tajdid dalam memajukan kehidupan umat, bangsa, dan dunia kemanusiaan. Gerakan kemajuan tersebut ditunjukkan dalam melakukan pembaruan pemahaman Islam, pendidikan, kesehatan, kesejahteraan sosial, serta berperan dalam perjuangan kemerdekaan dan pembangunan bangsa di negeri ini. Namun disadari pula masih terdapat sejumlah masalah atau tantangan yang harus dihadapi dan memerlukan langkah-langkah strategis dalam usianya yang cukup tua itu. Perjuangan Muhammadiyah yang diwarnai dinamika pasang-surut itu tidak lain untuk mencapai tujuan terwujudnya masyarakat Islam yang sebenar-benarnya serta dalam rangka menyebarkan misi kerisalahan Islam sebagai rahmatan lil-`alamin di bumi Allah yang terhampar luas ini.

Karena itu dengan senantiasa mengharapkan ridha dan pertolongan Allah SWT Muhammadiyah dalam usia dan kiprahnya jelang satu abad ini menyampaikan pernyataan pikiran (*zhawahir al-afkar/statement of mind*) sebagai berikut:

**A. Komitmen Gerakan**

1. Muhammadiyah adalah gerakan Islam yang mengemban misi da'wah dan tajdid, berasas Islam, bersumber pada al-Quran dan as-Sunnah, dan bertujuan mewujudkan masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Muhammadiyah sesuai jatidirinya senantiasa istiqamah untuk menunjukkan komitmen yang tinggi dalam memajukan kehidupan umat, bangsa, dan dunia kemanusiaan sebagai wujud ikhtiar menyebarkan Islam yang bercorak rahmatan lil-`alamin. Misi kerisalahan dan kerahmatan yang diemban Muhammadiyah tersebut secara nyata diwujudkan melalui berbagai kiprahnya dalam pengembangan amal usaha, program, dan kegiatan yang sebesar-besarnya membawa pada kemaslahatan hidup di dunia dan akhirat bagi seluruh umat manusia di muka bumi ini.
2. Muhammadiyah dalam usianya jelang satu abad telah banyak mendirikan taman kana-kanak, sekolah, perguruan tinggi, rumah sakit, balai pengobatan, rumah yatim piatu, usaha ekonomi, penerbitan, dan amal usaha lainnya. Muhammadiyah juga membangun masjid, mushalla, melakukan langkah-langkah da'wah dalam berbagai

bentuk kegiatan pembinaan umat yang meluas di seluruh pelosok Tanah Air. Muhammadiyah bahkan tak pernah berhenti melakukan peran-peran kebangsaan dan peran-peran kemanusiaannya dalam dinamika nasional dan global. Kiprah Muhammadiyah tersebut menunjukkan bukti nyata kepada masyarakat bahwa misi gerakan Islam yang diembannya bersifat amaliah untuk kemajuan dan pencerahan yang membawa pada kemaslahatan masyarakat yang seluas-luasnya. Peran kesejarahan yang dilakukan Muhammadiyah tersebut berlangsung dalam dinamika yang beragam. Pada masa penjajahan sejak berdirinya tahun 1330 H/1912 M, Muhammadiyah mengalami cengkeraman politik kolonial sebagaimana halnya dialami oleh seluruh masyarakat Indonesia saat itu, tetapi Muhammadiyah tetap berbuat tak kenal lelah untuk kemerdekaan dan kemajuan bangsa. Setelah Indonesia merdeka pada masa awal dan era Orde Lama Muhammadiyah mengalami berbagai situasi sulit akibat konflik politik nasional yang kompleks, namun Muhammadiyah tetap berkiprah dalam da'wah dan kegiatan kemasyarakatan. Pada era Orde Baru di bawah rezim kekuasaan yang melakukan depolitisasi (pengebirian politik), deideologisasi (pengebirian ideologi), dan kebijakan politik yang otoriter, Muhammadiyah juga terus berjuang mengembangkan amal usaha dan aktivitas da'wah Islam. Sedangkan pada masa reformasi, Muhammadiyah memanfaatkan peluang kondisi nasional yang terbuka itu dengan melakukan revitalisasi dan peningkatan kualitas amal usaha serta aktivitas da'wahnya. Melalui kiprahnya dalam sejarah yang panjang itu Muhammadiyah telah diterima oleh masyarakat luas baik di tingkat lokal, nasional, dan internasional sebagai salah satu pilar kekuatan Islam yang memberi sumbangan berharga bagi kemajuan peradaban umat manusia.

3. Kiprah dan langkah Muhammadiyah yang penuh dinamika itu masih dirasakan belum mencapai puncak keberhasilan dalam mencapai tujuan dan cita-citainya, sehingga Muhammadiyah semakin dituntut untuk meneguhkan dan merevitalisasi gerakannya ke seluruh lapangan kehidupan. Karena itu Muhammadiyah akan melaksanakan tajdid (pembaruan) dalam gerakannya sehingga di era kehidupan modern abad ke-21 yang kompleks ini sesuai dengan Keyakinan dan Kepribadiannya dapat tampil sebagai pilar kekuatan gerakan pencerahan peradaban di berbagai lingkungan kehidupan.

## **B. Pandangan Keagamaan**

1. Muhammadiyah dalam melakukan kiprahnya di berbagai bidang kehidupan untuk kemajuan umat, bangsa, dan dunia kemanusiaan dilandasi oleh keyakinan dan pemahaman keagamaan bahwa Islam sebagai ajaran yang membawa misi kebenaran Ilahiah harus didakwahkan sehingga menjadi rahmatan lil-'alamin di muka bumi ini. Bahwa Islam sebagai Wahyu Allah yang dibawa para Rasul hingga Rasul akhir zaman Muhammad Saw., adalah ajaran yang mengandung hidayah, penyerahan diri, rahmat, kemaslahatan, keselamatan, dan kebahagiaan hidup umat

manusia di dunia dan akhirat. Keyakinan dan paham Islam yang fundamental itu diaktualisasikan oleh Muhammadiyah dalam bentuk gerakan Islam yang menjalankan misi dakwah dan tajdid untuk kemaslahatan hidup seluruh umat manusia.

2. Misi da'wah Muhammadiyah yang mendasar itu merupakan perwujudan dari semangat awal Persyarikatan ini sejak didirikannya yang dijiwai oleh pesan Allah dalam Al-Quran Surat Ali-Imran 104, yang artinya: *"Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf, dan mencegah dari yang munkar, mereka itulah orang-orang yang beruntung"*. Kewajiban dan panggilan da'wah yang luhur itu menjadi komitmen utama Muhammadiyah sebagai ikhtiar untuk menjadi kekuatan Khaira Ummah sekaligus dalam membangun masyarakat Islam yang ideal seperti itu sebagaimana pesan Allah dalam Al-Quran Surat Ali-Imran ayat 110, yang **artinya**: *"Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf, dan mencegah dari yang munkar, dan beriman kepada Allah. Sekiranya Ahli Kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka, di antara mereka ada yang beriman, dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik."*. Dengan merujuk pada Firman Allah dalam Al-Quran Surat Ali Imran 104 dan 110, Muhammadiyah menyebarkan ajaran Islam yang komprehensif dan multiaspek itu melalui da'wah untuk mengajak pada kebaikan (Islam), *al-amr bi al-ma'ruf wa al-nahy `an al-munkar* (mengajak kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar), sehingga umat manusia memperoleh keberuntungan lahir dan batin dalam kehidupan ini. Da'wah yang demikian mengandung makna bahwa Islam sebagai ajaran selalu bersifat transformasional; yakni dakwah yang membawa perubahan yang bersifat kemajuan, kebaikan, kebenaran, keadilan, dan nilai-nilai keutamaan lainnya untuk kemaslahatan serta keselamatan hidup umat manusia tanpa membedakan ras, suku, golongan, agama, dan lain-lain.
3. Kyai Haji Ahmad Dahlan sebagai pendiri Muhammadiyah dikenal sebagai pelopor gerakan tajdid (pembaruan). Tajdid yang dilakukan pendiri Muhammadiyah itu bersifat pemurnian (purifikasi) dan perubahan ke arah kemajuan (dinamisasi), yang semuanya berpijak pada pemahaman tentang Islam yang kokoh dan luas. Dengan pandangan Islam yang demikian Kyai Dahlan tidak hanya berhasil melakukan pembinaan yang kokoh dalam akidah, ibadah, dan akhlak kaum muslimin, tetapi sekaligus melakukan pembaruan dalam amaliah mu'amalat duniawiyah sehingga Islam menjadi agama yang menyebarkan kemajuan. Semangat tajdid Muhammadiyah tersebut didorong antara lain oleh Sabda Nabi Muhammad s.a.w., yang artinya: *"Sesungguhnya Allah mengutus kepada umat manusia pada setiap kurun seratus tahun orang yang memperbarui ajaran agamanya"* (Hadits diriwayatkan oleh Abu Dawud dari Abi Hurairah). Karena itu melalui Muhammadiyah telah diletakkan suatu pandangan keagamaan yang tetap kokoh dalam bangunan keimanan yang berlandaskan pada Al-Quran dan As-Sunnah

sekaligus mengemban tajdid yang mampu membebaskan manusia dari keterbelakangan menuju kehidupan yang berkemajuan dan berkeadaban.

4. Dalam pandangan Muhammadiyah, bahwa masyarakat Islam yang sebenar--benarnya yang menjadi tujuan gerakan merupakan wujud aktualisasi ajaran Islam dalam struktur kehidupan kolektif manusia yang memiliki corak masyarakat tengahan (*ummatan wasatha*) yang berkemajuan baik dalam wujud sistem nilai sosial-budaya, sistem sosial, dan lingkungan fisik yang dibangunnya. Masyarakat Islam adalah masyarakat yang memiliki keseimbangan antara kehidupan lahiriah dan batiniah, rasionalitas dan spiritualitas, aqidah dan muamalat, individual dan sosial, duniawi dan ukhrawi, sekaligus menampilkan corak masyarakat yang mengamalkan nilai-nilai keadilan, kejujuran, kesejahteraan, kerjasama, kerjakeras, kedisiplinan, dan keunggulan dalam segala lapangan kehidupan. Dalam menghadapi dinamika kehidupan, masyarakat Islam semacam itu selalu bersedia bekerjasama dan berlomba-lomba dalam serba kebaikan di tengah persaingan rasar-bebas di segala lapangan kehidupan dalam semangat "berjuang menghadapi tantangan" (*al jihad li al-muwajjahat*) lebih dari sekadar "berjuang melawan musuh" (*al jihad li al-mu'aradhah*). Masyarakat Islam yang dicitacitakan Muhammadiyah memiliki kesamaan karakter dengan masyarakat madani, yaitu masyarakat kewargaan (*civil-society*) yang memiliki keyakinan yang dijiwai nilai-nilai lillahiah, demokratis, berkeadilan, otonom, berkemajuan, dan berakhlak-mulia (*al-akhlaq al-karimah*). Masyarakat Islam yang semacam itu berperan sebagai *syuhada`ala al-nas* di tengah berbagai pergumulan hidup masyarakat dunia. Karena itu, masyarakat Islam yang sebenar-benarnya yang bercorak "madaniyah" tersebut senantiasa menjadi masyarakat yang serba unggul atau utama (*khaira ummah*) dibandingkan dengan masyarakat lainnya. Keunggulan kualitas tersebut ditunjukkan oleh kemampuan penguasaan atas nilai-nilai dasar dan kemajuan dalam kebudayaan dan peradaban umat manusia, yaitu nilai-nilai ruhani (spiritualitas), nilai-nilai pengetahuan (ilmu pengetahuan dan teknologi), nilai-nilai materi (ekonomi), nilai-nilai kekuasaan (politik), nilai-nilai keindahan (kesenian), nilai-nilai normatif berperilaku (hukum), dan nilai-nilai kemasyarakatan (budaya) yang lebih berkualitas. Masyarakat Islam yang sebenar-benarnya bahkan senantiasa memiliki kepedulian tinggi terhadap kelangsungan ekologis (lingkungan hidup) dan kualitas martabat hidup manusia baik laki-laki maupun perempuan dalam relasi-relasi yang menjunjung tinggi kemaslahatan, keadilan, dan serba kebajikan hidup. Masyarakat Islam yang demikian juga senantiasa menjauhkan diri dari perilaku yang membawa pada kerusakan (*fasad fi al-ardh*), kedhaliman, dan hal-hal lain yang bersifat menghancurkan kehidupan.

### C. Pandangan tentang Kehidupan

1. Muhammadiyah memandang bahwa era kehidupan umat manusia saat ini berada dalam suasana penuh paradoks. Kemajuan dalam bidang ilmu pengetahuan dan

teknologi yang sangat luar biasa dibarengi, dengan berbagai dampak buruk seperti lingkungan hidup yang tercemar (polusi) dan mengalami eksploitasi besar-besaran yang tak terkendali, berkembangnya nalar-instrumental yang memperlemah naluri-naluri alami manusia, lebih jauh lagi melahirkan sekularisasi kehidupan yang menyebabkan manusia kehilangan keseimbangan-keseimbangan hidup yang bersifat religius. Kemajuan kehidupan modern yang melahirkan antitesis post-modern juga diwarnai oleh kecenderungan yang bersifat serba-bebas (*supra-liberal*), serba-boleh (*anarkhis*), dan serba-menapikan nilai (*nihilisme*), sehingga memberi peluang semakin terbuka bagi kemungkinan anti-agama (*agnostisme*) dan anti-Tuhan (*atheisme*) secara sistematis. Demokrasi, kesadaran akan hak asasi manusia, dan emansipasi perempuan juga telah melahirkan corak kehidupan yang lebih egaliter dan berkeadilan secara meluas, tetapi juga membawa implikasi pada kebebasan yang melampaui batas dan egoisme yang serba liberal, yang jika tanpa bingkai moral dan spiritual yang kokoh dapat merusak hubungan-hubungan manusia yang harmoni.

2. Dalam memasuki babak baru globalisasi, selain melahirkan pola hubungan positif antarbangsa dan antarnegara yang serba melintasi, pada saat yang sama melahirkan hal-hal negatif dalam kehidupan umat manusia sedunia. Di era global ini masyarakat memiliki kecenderungan penghambaan terhadap egoisme (*ta'bid al-nafs*), penghambaan terhadap materi (*ta'bid al-mawad*), penghambaan terhadap nafsu seksual (*ta'bid al-syahawdt*), dan penghambaan terhadap kekuasaan (*ta'bid al-siyasiyyah*) yang menggeser nilai-nilai fitri (otentik) manusia dalam bertauhid (keimanan terhadap Allah SWT) dan hidup dalam kebaikan di dunia dan akhirat. Globalisasi juga telah mendorong ekstrimisme baru berupa lahirnya fanatisme primordial agama, etnik, dan kedaerahan yang bersifat lokal sehingga membangun sekat-sekat baru dalam kehidupan. Perkembangan global pasca perang-dingin (keruntuhan Komunisme) juga ditandai dengan pesatnya pengaruh Neo-liberalisme yang semakin mengokohkan dominasi Kapitalisme yang lebih memihak kekuatan-kekuatan berjuasi sekaligus kian meminggirkan kelompok-kelompok masyarakat yang lemah (*dhu'afa*) dan tertindas (*mustadh'afin*), sehingga melahirkan ketidakadilan global yang baru. Namun globalisasi dan alam kehidupan modern yang serba maju saat ini juga dapat dimanfaatkan oleh gerakan-gerakan Islam seperti Muhammadiyah untuk memperluas solidaritas umat manusia sejangad baik sesama umat Islam (*ukhuwah islamiyyah*) maupun dengan kelompok lain (*'alaqah insaniyyah*), yang lebih manusiawi dan berkeadaban tinggi.
3. Karena itu Muhammadiyah mengajak seiruh kekuatan masyarakat, bangsa, dan dunia untuk semakin berperan aktif dalam melakukan ikhtiar-ikhtiar pencerahan di berbagai lapangan dan lini kehidupan sehingga kebudayaan umat manusia di alaf baru ini menuju pada peradaban yang berkemajuan sekaligus bermoral tinggi.

#### **D. Tanggungjawab Kebangsaan dan Kemanusiaan**

1. Muhammadiyah memandang bahwa bangsa Indonesia saat ini tengah berada dalam suasana transisi yang penuh pertarungan. Bahwa keberhasilan atau kegagalan dalam menyelesaikan krisis multiwajah akan menentukan nasib perjalanan bangsa ke depan. Masalah korupsi, kerusakan moral dan spiritual, pragmatisme perilaku politik, kemiskinan, pengangguran, konflik sosial, separatisme, kerusakan lingkungan, dan masalah-masalah nasional lainnya jika tidak mampu diselesaikan secara sungguh-sungguh, sistematis, dan fundamental akan semakin memperparah krisis nasional. Wabah masalah tersebut menjadi beban nasional yang semakin berat dengan timbulnya berbagai musibah dan bencana nasional seperti terjadi di Aceh, Nias, dan daerah-daerah lain yang memperlemah daya tahan bangsa. Krisis dan masalah tersebut bahkan akan semakin membebani tubuh bangsa ini jika dipertautkan dengan kondisi sumberdaya manusia, ekonomi, pendidikan, dan infrastruktur nasional maupun lokal yang jauh tertinggal dari kemajuan yang dicapai bangsa lain.
2. Bangsa Indonesia juga tengah berada dalam pertarungan ketika berhadapan dengan perkembangan dunia yang berada dalam cengkeraman globalisasi, politik global, dan berbagai tarik-menarik kepentingan internasional yang diwarnai hegemoni dan ketidakadilan di berbagai bidang kehidupan. Indonesia bahkan menjadi lahan paling subur dan tempat pembuangan limbah sangat mudah dari globalisasi dan pasar bebas yang berwatak neo-liberal. Jika tidak memiliki daya adaptasi, filter, dan integritas kepribadian yang kokoh maka bangsa ini juga akan terombang-ambing dalam hegemoni dan liberalisasi politik global yang penuh konflik dan kepentingan. Pada saat yang sama bangsa ini juga tengah berhadapan dengan relasi-relasi baru yang dibawa oleh multikulturalisme yang memerlukan orientasi kebudayaan dan tatanan sosial baru yang kokoh.
3. Dalam menghadapi masalah dan tantangan internal maupun eksternal itu bangsa Indonesia memerlukan mobilisasi seluruh potensi dan 'kemampuan baik berupa sumberdaya manusia, sumberdaya alam, modal sosial-kultural, dan berbagai dayadukung nasional yang kuat dan dikelola dengan sebaik-baiknya. Dalam kondisi yang sangat penuh pertarungan dan sarat tantangan tersebut maka sangat diperlukan kepemimpinan yang handal dan visioner baik yang didukung kemampuan masyarakat yang mandiri baik di tingkat nasional maupun lokal agar berbagai masalah, tantangan, dan potensi bangsa ini mampu dihadapi serta dikelola dengan sebaik-baiknya.
4. Bangsa Indonesia yang mayoritas muslim juga tidak lepas dari perkembangan yang dihadapi saudara-saudaranya di dunia Islam. Mayoritas dunia Islam selain dililit oleh masalah-masalah nasional masing-masing, pada saat yang sama berada dalam dominasi dan hegemoni politik Barat yang banyak merugikan kepentingan-kepentingan dunia Islam. Sementara antar dunia Islam sendiri selain tidak terdapat persatuan yang kokoh, juga masih diwarnai oleh persaingan dan konflik yang sulit

dipertemukan, sehingga semakin memperlemah posisi umat Islam dalam percaturan internasional. Kendati begitu, masih terdapat secercah harapan ketika Islam mulai berkembang di neger-negeri Barat dan terjadi perkembangan alam pikiran baru yang membawa misi perdamaian, kemajuan, dan menjadikan Islam sebagai rahmat bagi alam semesta.

## **E. Agenda dan Langkah Ke Depan**

1. Dalam menghadapi masalah bangsa, umat Islam, dan umat manusia sedunia yang bersifat kompleks dan krusial sebagaimana digambarkan itu Muhammadiyah sebagai salah satu kekuatan nasional akan terus memainkan peranan sosial-keagamaannya sebagaimana selama ini dilakukan dalam perjalanan sejarahnya. Usia jelang satu abad telah menempa kematangan Muhammadiyah untuk tidak kenal lelah dalam berkiprah menjalankan misi da'wah dan tajdid untuk kemajuan umat, bangsa, dan dunia kemanusiaan. Jika selama ini Muhammadiyah telah menorehkan kepeloporan dalam pemurnian dan pembaruan pemikiran Islam, pengembangan pendidikan Islam, pelayanan kesehatan dan kesejahteraan, serta dalam pembinaan kecerdasan dan kemajuan masyarakat maka pada usianya jelang satu abad ini Muhammadiyah selain melakukan revitalisasi gerakannya juga berikhtiar untuk menjalankan peran-peran baru yang dipandang lebih baik dan lebih bermasalahat bagi kemajuan peradaban.
2. Peran-peran baru sebagai wujud aktualisasi gerakan da'wah dan tajdid yang dapat dikembangkan Muhammadiyah antara lain dalam menjalankan peran politik kebangsaan guna mewujudkan reformasi nasional dan mengawal perjalanan bangsa tanpa terjebak pada politik-praktik (politik kepartaian) yang bersifat jangka pendek dan sarat konflik kepentingan. Dengan bingkai Khittah Ujung Pandang tahun 1971 dan Khittah Denpasar tahun 2002, Muhammadiyah secara proaktif metajalankan peran dalam pemberantasan korupsi, penegakan supremasi hukum, memasyarakatkan etika berpolitik, pengembangan sumberdaya manusia, penyyclamatan lingkungan hidup dan sumberdaya alam, memperkokoh integrasi nasional, membangun karakter dan moral bangsa, serta peran-peran kebangsaan iainnya yang bersifat pencerahan. Muhammadiyah juga akan terus menjalankan peran dan langkah-langkah sistematis dalam mengembangkan kehidupan masyarakat madani (civil society) melalui aksi-aksi da'wah kultural yang mengrah pada pembentukan masyarakat Indonesia yang demokratis, otonom, berkeadilan, dan berakhlak mulia.
3. Dalam pergaulan internasional dan dunia Islam, Muhammadiyah juga terpanggil untuk menjalankan peran global dalam membangun tatanan dunia yang lebih damai, adil, maju, dan berkeadaban. Muhammadiyah menyadari pengaruh kuat globalisasi dan ekspansi neo-liberal yang sangat mencengkeram perkembangan masyarakat dunia saat ini. Dalam perkembangan dunia yang sarat permasalahan

dan tantangan yang kompleks di abad ke-21 itu Muhammadiyah dituntut untuk terus aktif memainkan peran kerisalahannya agar umat manusia sedunia tidak terseret pada kehancuran oleh keganasan globalisasi dan neo-liberal, pada saat yang sama dapat diarahkan menuju pada keselamatan hidup yang lebih hakiki serta memiliki peradaban yang lebih maju dan berperadaban mulia.

4. Khusus bagi umat Islam baik di tingkat lokal, nasional, maupun global Muhammadiyah dituntut untuk terus memainkan peran da'wah dan tajdid secara lebih baik sehingga kaum muslimin menjadi kekuatan penting dan menentukan dalam perkembangan kebudayaan dan peradaban di era modern yang penuh tantangan ini. Era kebangkitan Islam harus terus digerakkan ke arah kemajuan secara signifikan dalam berbagai bidang kehidupan umat Islam. Umat Islam harus tumbuh menjadi khaira ummah yang memiliki martabat tinggi di hadapan komunitas masyarakat lain di tingkat lokal, nasional, dan global. Di tengah dinamika umat Islam yang semacam itu Muhammadiyah harus tetap istiqamah dan terus melakukan pembaruan dalam menjalankan dan mewujudkan misi Islam sebagai rahmatan lil-'alamin di bumi Allah yang tercinta ini.

Demikian Pernyataan Pikiran Muhammadiyah Jelang Satu Abad sebagai ungkapan keyakinan, komitmen, pemikiran, sikap, dan ikhtiar mengenai kehadiran dirinya sebagai Gerakan Islam yang mengemban misi da'wah dan tajdid dalam memasuki usianya hampir seratus tahun. Pernyataan Pikiran Muhammadiyah Jelang Satu Abad tersebut menjadi bingkai dan arah bagi segenap anggota dan pimpinan Persyarikatan baik dalam menghadapi perkembangan kehidupan maupun dalam melaksanakan usaha-usaha menuju tercapainya tujuan Muhammadiyah yaitu menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam sehingga terwujud masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Akhirnya, dengan senantiasa memohon ridha dan karunia Allah SWT., semoga kiprah Muhammadiyah di pentas sejarah ini membawa kemaslahatan bagi hidup umat manusia dan menjadi rahmat bagi alam semesta. *Nashr* min Allah *wa fath qarib*.

#### LINK SEKOLAH

- [SMK Muh 1 Sukoharjo](#)
- [SMK Muh 2 Sragen](#)
- [SMK Muh 3 Yogya](#)

#### LINK SITUS DAKWAH

- [Al Dakwah](#)
- [Elfata Online](#)
- [Eramuslim](#)
- [Hidayatullah](#)
- [Islam House](#)
- [Jilbab Online](#)

- [Majalah Ummi](#)
- [muhammadiyah](#)
- [Pusat Informasi Palestina](#)
- [Situs Akhwat](#)
- [Situs Ikhwan](#)
- [Situs Muslimah](#)
- [SMK Muh 2 Sragen](#)
- [SMK Muh 2 Sragen](#)
- [SMK Muh 3 Yogya](#)
- [Toko Jilbab](#)

Search for:

 Search

[Log in](#)

Copyright © 2009 . All Rights Reserved.

Powered by [WordPress](#) and LeadCamp [bride wordpress themes](#)

Free Theme Sponsored by [mac refurbished](#)

## **Muhammadiyah dan Masyarakat Yang Diinginkan**

Kamis, 13 November 2008 08:19:12 - oleh : admin

(WHANDI.NET) Siapakah yang tidak tahu Muhammadiyah, organisasi modernis Islam tertua di Indonesia. Muhammadiyah didirikan oleh KH Ahmad Dahlan tanggal 8 Dzulhijjah 1330 H atau 18 November 1912 di Yogyakarta. Organisasi ini lahir sebagai perwujudan keprihatinan karena melihat kenyataan umat Islam di Indonesia dalam cara menjalankan perintah-perintah agama Islam banyak yang tidak bersumber dari ajaran Al Quran dan tuntunan Rasulullah SAW. Dalam pada itu KH Ahmad Dahlan menghendaki agar dengan Muhammadiyah, orang-orang Islam mengamalkan dan menggerakkan Islam dengan berorganisasi.

Muhammadiyah mencita-citakan terwujudnya masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Dalam arsip Anggaran Dasar dapat dibaca, “Menggembirakan dan memajukan pelajaran dan pengajaran Islam serta memajukan dan menggembirakan hidup sepanjang kemauan agama Islam”.

Prof. Dr. Hamka mencatat tiga faktor yang mendorong lahirnya Muhammadiyah. Pertama, keterbelakangan dan kebodohan umat Islam Indonesia dalam hampir semua bidang kehidupan. Kedua, kemiskinan yang parah yang diderita umat Islam dalam suatu negeri kaya seperti Indonesia. Ketiga, kondisi pendidikan Islam yang sudah sangat kuno seperti yang terlihat pada pesantren masa itu. Ucapan KH Ahmad Dahlan yang amat berkesan, “Tidak mungkin Islam lenyap dari seluruh dunia, tapi tidak mustahil Islam

hapus dari bumi Indonesia. Siapakah yang bertanggung jawab?"

Muhammadiyah mencita-citakan terwujudnya masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Dalam arsip Anggaran Dasar dapat dibaca, "Menggembirakan dan memajukan pelajaran dan pengajaran Islam serta memajukan dan menggembirakan hidup sepanjang kemauan agama Islam". Hal itu ingin dicapai dengan kembali pada Al Quran dan Sunnah serta membersihkan Islam dari bid'ah, khurafat dan tahayul yang terdapat di kalangan umatnya.

Pada awal perkembangannya Muhammadiyah mendapat tantangan yang hebat sekali karena umat telah dibelenggu oleh taklid dan kesalah-pahaman terhadap tajdid (pembaharuan) yang merupakan soko-guru gerakan Muhammadiyah. Tajdid dalam perspektif Muhammadiyah mempunyai makna kembali pada ajaran pokok yang asli dan esensialitas Islam. Muhammadiyah tidak bersikap anti secara mutlak terhadap budaya dan tradisi, tetapi tidak dapat menerima budaya dan tradisi yang merusak kejernihan agama terutama menyangkut hubungan manusia dengan Tuhan.

Perkembangan dan gerak Muhammadiyah bermula dari Kauman, dekat Kraton Yogyakarta, tempat tinggal KH Ahmad Dahlan yang terkenal sebagai pemukiman santri. Perjuangan dan jihad KH Ahmad Dahlan membangun Muhammadiyah ditopang sepenuhnya oleh Nyai Ahmad Dahlan yang turut memberikan andil dengan terbentuknya sayap organisasi Muhammadiyah untuk kaum perempuan yaitu Aisyiyah.

Perkembangan Muhammadiyah paling pesat di luar Yogyakarta yang pertama ialah di Minangkabau (Sumatera Barat) sehingga di kota Padang Panjang juga ada kampung Kauman, tempat berdirinya sekolah Muhammadiyah yang pertama di Sumatera. Buya A.R. Sutan Mansur yang pernah menjabat Ketua Umum Muhammadiyah (1953-1959) adalah ideolog Muhammadiyah yang memiliki peranan dan jasa yang besar dalam membesarkan dan menyebarkan Muhammadiyah di luar Jawa. Pada 1930 kota Bukittinggi menjadi tempat berlangsungnya Kongres Muhammadiyah ke-19 atau kongres pertama yang dilaksanakan di luar Jawa.

### **Metode Dakwah KH Ahmad Dahlan**

James L Peacock, antropolog Amerika dari Harvard University yang menulis mengenai pembaharu dan pembaharuan agama, mencatat peran Muhammadiyah sebagai organisasi kesejahteraan dan pendidikan swasta dan non-Kristen yang paling menonjol di Indonesia.

Metode dakwah KH Ahmad Dahlan sangat sederhana, tetapi mengena. Ia memberi pengajian Subuh di masjid berulang-ulang mengupas surat Al Ma'un saja. Dimintanya perhatian hadirin bagaimana melaksanakan ayat-ayat itu. Meski semua telah hafal, namun belum tentu mengamalkannya. Lalu ia menjelaskan maksud mendirikan Muhammadiyah yaitu hendak menyusun tenaga kaum muslimin untuk melaksanakan perintah agama.

Dalam rangka mengamalkan surat Al-Ma'un, KH Ahmad Dahlan mengajak untuk mencari orang miskin di sekitar tempat tinggal masing-masing. Jika menemukan orang

miskin dan anak yatim agar dibawa pulang ke rumah masing-masing, dimandikan dengan sabun dan diberi sikat gigi yang baik, diberi pakaian seperti yang biasa mereka pakai, diberi makan dan minum serta tempat tidur yang layak. Dari situlah embrio pengelolaan zakat mal dan zakat fitrah untuk dibagikan kepada fakir miskin. Lalu atas prakarsa KH Ahmad Dahlan didirikan penampungan fakir miskin, panti asuhan yatim piatu, dan Rumah Sakit PKU Muhammadiyah di Yogyakarta. Langkah Muhammadiyah mendirikan Rumah Sakit Islam dan membangun panti asuhan anak yatim piatu merupakan terobosan luar biasa dan yang pertama dilakukan oleh pergerakan Islam di Indonesia.

KH Ahmad Dahlan wafat tahun 1923 dan dianugerahi penghargaan Pahlawan Nasional. Ia tidak segan-segan mengeluarkan sebagian besar hartanya untuk mencukupi keperluan dana bagi gerakan Muhammadiyah. Ia berpesan kepada warga Muhammadiyah, “Janganlah mencari penghidupan dalam persyarikatan Muhammadiyah, tetapi hidup-hidupkanlah Muhammadiyah.”

**Tidak Bermazhab**  
Menurut Prof. Dr. H.A. Mukti Ali, aktivitas Muhammadiyah meliputi empat hal. Pertama, Kedua, reformulasi doktrin-doktrin Islam dengan pandangan alam pikiran modern. Ketiga, reformasi ajaran dan pendidikan Islam. Keempat, mempertahankan Islam dari pengaruh dan serangan dari luar. membersihkan Islam di Indonesia dari pengaruh dan kebiasaan bukan Islam.

Watak puritan Muhammadiyah, menurut Prof. Dr. Faisal Ismail tercermin dalam sikap Muhammadiyah yang tidak mengapresiasi praktik-praktik semacam tarekat, tahlil, dan Muhammadiyah tidak terikat dengan satu mazhab tertentu dalam pengambilan hukum agama, makanya sering disebut Muhammadiyah tidak bermazhab. Muhammadiyah tidak mentolerir taklid yang menjadi pangkal kebekuan umat dalam menjalankan agama, tapi justru menganjurkan ittiba' dan ijtihad sebagai tulang punggung gerakan dakwahnya. tawasul.

Dalam kaitan ini menarik disimak penuturan Dr. H. Anwar Harjono yang pernah menanya pandangan pemimpin Nahdlatul Ulama (NU) KHA Wahid Hasjim mengenai perbedaan antara NU dengan Muhammadiyah? Menurut Wahid Hasjim, “Tidak ada. Kalau pun ada perbedaan, itu hanya terbatas pada soal metode pengambilan kesimpulan hukum. Kalau Muhammadiyah melihat masalah dari atas ke bawah; Quran, Sunnah, baru pendapat ulama. NU melihat masalah dari bawah ke atas; pendapat ulama, Sunnah, baru Quran.”

**Sedikit Bicara, Banyak Bekerja**  
James L Peacock, antropolog Amerika dari Harvard University yang menulis mengenai pembaharu dan pembaharuan agama, mencatat peran Muhammadiyah sebagai organisasi kesejahteraan dan pendidikan swasta dan non-Kristen yang paling menonjol di Indonesia.

Penilaian tersebut didukung oleh fakta bahwa selama ini Muhammadiyah bukan saja gerakan dakwah dan tajdid (pembaharuan), tetapi juga sebagai gerakan sosial, pendidikan, ekonomi, serta juga gerakan kebangsaan. Para pemimpin Muhammadiyah

dari dulu memiliki motto “sedikit bicara banyak bekerja”. Tapi andaikata ketika berdirinya menyatakan diri sebagai gerakan politik atau partai politik, mungkin Muhammadiyah tidak akan berusia panjang.

Dalam setting sejarah Indonesia modern, Muhammadiyah adalah pelopor penggunaan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Sebelum Sumpah Pemuda (1928), Muhammadiyah telah lebih dahulu menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa komunikasi dalam organisasi. Muhammadiyah merupakan organisasi pertama di tanah air yang menggunakan bahasa Indonesia dalam kongresnya tahun 1923.

Sejak bangsa Indonesia dalam belenggu penjajahan, Muhammadiyah telah menanamkan rasa kebangsaan dan rasa bertanah air, di samping mempertebal rasa keislaman. Pada 1918 Muhammadiyah mendirikan gerakan kepanduan Hizbul Wathan yang artinya Pembela Tanah Air. Salah satu alumni Hizbul Wathan yaitu Bapak TNI, Panglima Besar Sudirman. Dalam milestone sejarah NKRI, pemimpin Muhammadiyah yaitu Abdul Kahar Muzakir dan Ki Bagus Hadikusumo mempunyai peranan yang besar pada waktu merumuskan Undang-Undang Dasar 1945 dan menerima dasar negara Pancasila.

Sebagaimana diketahui amal usaha Muhammadiyah mencakup bidang agama dalam arti yang luas. Karena itu pengembangan ekonomi, kewanitaan dan kepemudaan juga mendapat tempat yang penting dalam lingkungan Muhammadiyah. Dalam bidang pendidikan, Muhammadiyah sekarang ini memiliki ribuan sekolah dan ratusan Perguruan Tinggi, seperti Akademi dan Universitas, di seluruh Indonesia, dan beberapa di antaranya masuk dalam peringkat perguruan tinggi swasta terkemuka di Indonesia. Sekolah-sekolah Muhammadiyah pertama kali didirikan oleh KH Ahmad Dahlan. Di samping itu ia juga berupaya memasukkan pelajaran agama di sekolah umum yang didirikan oleh pemerintah kolonial Belanda. Muhammadiyah dewasa ini diakui sebagai gerakan Islam yang kokoh, dengan cabang dan ranting organisasi yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, bahkan di luar negari.

Menjelang satu abad Muhammadiyah, dirasakan berkurangnya ulama di kalangan organisasi besar ini. Untuk itu kaderisasi ulama perlu digarap secara serius oleh Muhammadiyah, di samping upaya lain seperti memperbanyak dan mempertinggi mutu amal, mempertinggi mutu anggota, membentuk kader serta mempererat ukhuwah antara sesama organisasi Islam. Tantangan dakwah saat ini menunjukkan masih banyak orang Islam yang belum paham Islam secara baik sehingga mudah terperosok ke dalam sikap beragama yang salah. Liberalisme pemikiran Islam dan gerakan feminisme sekuler adalah juga tantangan aktual yang perlu disikapi serius oleh organisasi-organisasi Islam termasuk Muhammadiyah.

Untuk itu diperlukan ulama-ulama yang tangguh serta pejuang-pejuang dakwah dan sosial yang istiqamah, yang sanggup mewujudkan masyarakat yang diinginkan yaitu masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Itulah cita-cita Muhammadiyah dari awal.  
[\(ATAUFIQUR\)](#)

## **Format Ulang Gerakan Politik Perempuan**

Written by Mashudi SR | Peminat masalah Sosial Politik dan Wakil Ketua Pemuda Muhammadiyah Aceh.

Friday, 17 April 2009 08:43 - Last Updated Thursday, 30 April 2009 12:00

IDDAILY.NET

**KEMAJUAN** demokrasi negeri ini ternyata belum sepenuhnya berdampak pada pengakuan

terhadap hak-hak politik perempuan. Posisi mereka sejauh ini masih tetap berada dipinggir

pembuat kebijakan. Masih terlalu sempit ruang yang ada untuk bisa masuk ke pusaran

kekuasaan. Akses politik yang tersedia masih kental dengan semangat maskulinitas.

Kanal demokrasi berupa pemilihan mengkonfirmasi masih timpangnya relasi politik laki-laki

dan perempuan. Pemilu pada akhirnya berlaku diskriminatif terhadap hak-hak politik kaum

hawa ini. Lihat saja betapa beratnya perjuangan calon legislatif (caleg) perempuan berebut

suara di kantong-kantong suara yang didominasi caleg laki-laki. Mereka dipaksa bertarung

dalam arena yang masih diselubungi pandangan yang melihat dunia politik adalah dunianya para

lelaki. Perempuan tidak pantas menceburkan diri di dalamnya.

Pandangan seperti ini, harus diakui masih tumbuh subur dimasyarakat bangsa yang dihuni

mayoritas muslim. Persoalan hak politik perempuan masih menjadi perdebatan yang nyaris

tanpa ujung. Hambatan kultural, patriarki dan ekonomi pun terus terjadi. Terlebih jika ditarik

dalam ranah agama, maka perdebatannya akan semakin panjang. Meskipun, sebetulnya secara normative, dijumpai banyak dalil yang mengakui hak-hak politik perempuan. Tetapi terasa begitu sulit untuk mengakui bahwa makhluk yang berjenis kelamin perempuan ini memiliki hak dan kewajiban yang sama dengan laki-laki. Ruang politik bagi kaum perempuan sebagai wadah memperjuangkan aspirasi masyarakat begitu sulit diberikan. Kebijakan politik elit bangsa ini belum melihat perempuan sebagai sebuah entitas politik yang harus diberdayakan. Sebaliknya kaum perempuan dijadikan sebagai objek politik yang didatangi setiap lima tahun sekali.

### **Kandas Sebelum Berlayar**

Paska keputusan Mahkamah Konstitusi yang membatalkan keberlakuan Pasal 214 UU No.10/2008, gerakan politik perempuan kembali membentur tembok. Penentuan nomor urut caleg dengan sistim *zipper*, yang diharapkan bisa menjadi tindakan penyelamatan perempuan untuk bisa duduk di parlemen, tidak lagi menjadi “garansi politik” yang menjanjikan. Perjuangan politik yang sudah begitu lama dirancang-bangun kandas sebelum mencapai hasil. Dampaknya, a *ffirmative action* sebagai sebuah strategi perjuangan politik kehilangan tempat berpijak.

Ini tentu pukulan telak terhadap gerakan politik perempuan. Sebab ruh *affirmative action* itu

Written by Mashudi SR | Peminat masalah Sosial Politik dan Wakil Ketua Pemuda Muhammadiyah Aceh.

Friday, 17 April 2009 08:43 - Last Updated Thursday, 30 April 2009 12:00

sebetulnya berada pada pasal 214 UU No.10/2008. Inilah celah yang bisa mendongkrak jumlah kursi yang pada pemilu 2004 lalu sebanyak 11,7% dari 550 jumlah kursi DPR. Di samping menerapkan strategi lain dalam melakukan penetrasi politik merebut suara pemilih yang mayoritas adalah kaum perempuan sendiri. Persoalannya, apakah angka ini bisa bertambah atau setidaknya bertahan, bergantung pada seberapa besar daya juang caleg dan gerakan perempuan “melawan” realitas politik yang masih didominasi laki-laki. Tersedia banyak variabel yang mendukung seberapa besar impuls yang dihasilkan untuk mendobrak realitas tersebut. Diantaranya ketokohan, sokongan dana, jejaring yang solid dan kemasan isu yang tepat dan menarik, serta pemetaan wilayah garapan yang potensial.

### **Apa yang mesti dilakukan?**

Berapapun hasil yang diperoleh pada pemilu ini, sudah saatnya kelompok gerakan perempuan menata ulang kembali format gerakan politik yang selama ini dijalankan.

Sehingga ketiadaan *affirmative action*

yang bisa memberi “discount” bagi perjuangan politik perempuan utamanya dalam mengisi parlemen, bisa dihadirkan kembali. Lebih dari itu struktur politik yang selama orde baru sampai saat ini tidak memberi ruang bebas bagi perempuan bisa diintervensi.

Politik di era reformasi, menurut Ani Sucipto (2000), harus diartikan sebagai partisipasi yang lebih besar dari masyarakat, representasi dan kedaulatan rakyat. Ini artinya, partisipasi perempuan memegang peranan strategis, sehingga jika ikut dalam membuat dan mengambil kebijakan, akan menjadikan wajah politik negeri ini terlihat humanis, tidak garang, berkeadilan, anti kekerasan dan tentunya akan semakin dekat dengan problem keseharian masyarakat.

Karena itu, menghitung kembali modal sosial dan politik paska keluarnya keputusan MK tersebut, menjadi tugas yang mestinya segera dituntaskan. Ini penting untuk bisa diproyeksikan strategi seperti apa sebetulnya yang tepat digunakan untuk menembus sekat politik dalam tubuh parpol. Muara akhirnya tentu saja lahir kembali payung hukum baru yang memberi keberpihakan sementara bagi perjuangan politik perempuan menuju parlemen. Sekaitan dengan itu, pembangunan partisipasi politik perempuan terus dilakukan. Sinergisitas antar elemen masyarakat menjadi kunci sukses dari membesarnya partisipasi ini. Diakui atau tidak, selama ini, gerakan politik perempuan terkadang melenggang sendiri, tanpa ada upaya yang maksimal menggandeng kelompok diluar perempuan untuk kemudian mengorganisirnya secara massif. Padahal merajut kekuatan melintasi kelompok sejenis, menjalin komunikasi dengan berbagai pihak luar, menjadi kunci sukses dalam sebuah gerakan.

Banyak komunitas-komunitas kecil yang peduli terhadap nasib buruk perempuan , tercecer disana-sini. Mereka ini adalah energy potensial yang jika berhasil dihimpun dalam sebuah entitas yang pro dan turut berjuang, bisa menjadi kekuatan politik yang mempunyai daya dobrak yang luar biasa besar.

### **Penutup**

Hal yang perlu menjadi catatan bahwa kendala yang acapkali dihadapi perempuan ketika

2 / 3

### **Format Ulang Gerakan Politik Perempuan**

Written by Mashudi SR | Peminat masalah Sosial Politik dan Wakil Ketua Pemuda Muhammadiyah Aceh.

Friday, 17 April 2009 08:43 - Last Updated Thursday, 30 April 2009 12:00

berhadapan dengan realitas politik, adalah persoalan sikap mental yang lemah, *budgeting* politik yang minim, serta posisi yang marginal. Tiga sebab ini telah secara nyata membuat nilai tawar politik perempuan dihadapan politisi laki-laki menjadi rendah, baik di dalam partai politik maupun dalam parlemen. Dengan demikian sangat sulit untuk menelurkan sebuah terobosan yang bersifat institusional atau kelembagaan. Proses penyusunan UU No.10/2008 tentang Pemilu Legislatif dimana di dalamnya harus termuat ketentuan *affirmative action*, yang menguras energy yang cukup banyak, menjadi catatan berharga. Karena itulah agar perjuangan politik perempuan tidak membentur tembok tebal, saatnya menyusun kembali strategi baru guna menghadapi

gelombang politik yang semakin tinggi.

**Mashudi SR | Peminat masalah Sosial Politik dan Wakil Ketua Pemuda Muhammadiyah**

**Aceh.**

**Hak Cipta Terlindungi © Copyrights by The Aceh Institute | Dilarang keras mengutip, mengacu, mendownload, menggunakan, dan menyebarkan isi website ini tanpa seizin penulis asli dan "Aceh Institute" sebagai sumber.**

3 / 3

## Revitalisasi Gerakan Muhammadiyah

Rabu, 2 Mei 2007 - 09:44 wib

TEXT SIZE :  



*DR HAEDAR NASHIR - Okezone*

**Oleh: DR HAEDAR NASHIR**

Sidang Tanwir Muhammadiyah yang berlangsung tanggal 26-29 April 2007 di Yogyakarta beberapa hari lalu memiliki makna penting bagi gerakan Islam yang didirikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan ini.

Perhatian yang besar dari banyak pihak termasuk kawan-kawan media massa begitu rupa tingginya. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ketika membuka Tanwir bahkan memberikan harapan khusus agar Muhammadiyah mengembangkan tradisi kewirausahaan sebagaimana pernah jaya di masa lalu. Muhammadiyah memang perlu memperkuat kembali banyak lini gerakannya agar mampu memainkan peranan yang lebih signifikan dalam memajukan kehidupan bangsa dan menyebarkan risalah dakwahnya di alam semesta. Muhammadiyah dalam usianya jelang satu abad diakuitelah mengukir sejumlah kisah sukses dalam gerakannya.

Kehadirannya sebagai gerakan pembaruan Islam telah menorehkan alam pikiran modern di kalangan umat Islam. Amal usahanya di bidang pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial bahkan sangat menonjol dan telah memberikan sumbangsih yang cukup besar bagi masyarakat luas. Kiprahnya dalam pergerakan nasional bersama komponen bangsa lainnya hingga negeri ini merdeka sangatlah berharga sehingga menjadikannya sebagai kekuatan nasional yang penting dan strategis. Muhammadiyah sebagaimana Nahdlatul Ulama bahkan telah tumbuh menjadi sayap Islam yang bercorak kultural, yang masing-masing berbasis sosial kokoh di perkotaan dan pedesaan.

Kini dalam usianya yang ke-98 Muhammadiyah menghadapi tantangan yang tidak ringan. Sebagaimana gerakan-gerakan yang tumbuh menjadi besar selalu mengalami beban di dalam dirinya, ditambah beban dari luar yang selalu hadir penuh dinamika. Sebagai gerakan Islam arus-tengah (moderat) yang kehadirannya cukup terbuka dan inklusif, Muhammadiyah laksana melting pot yang di dalamnya tumbuh beragam orang yang ingin berkisah untuk membesarkannya. Namun risikonya, tidak jarang rumah besar

Muhammadiyah yang terbuka ini membawa konsekuensi bagitumbuhnya beragam kepentingan yang tidak selamanya koheren atau sinergi dengankepentingan dan misi gerakan Islam ini.

Muhammadiyah yang besar itudalam batas tertentu seolah menjadi pasar tempat lalu lalangnya banyakkepentingan praktis hingga pragmatis. Orang masuk ke dalam Muhammadiyah bukankarena misi atau idealismenya, tetapi karena amal usahanya atau karenakepentingan mobilitas politik tertentu. Fenomena pasar tersebut hingga batastertentu wajar adanya, tetapi menjadi suatu kerugian karena Muhammadiyah tidakdapat memobilisasi potensinya secara optimal dan total untuk kepentingan misidan idealisme gerakan. Orang-orang yang berada di dalamnya menjadi demikianlonggar.

Sejauh adakepentingan-kepentingan praktis atau pragmatis, sejauh itu pula merekaberkerumun dalam Muhammadiyah. Manakala kepentingan kegunaannya hilang, makaMuhammadiyah sekadar tempat mampir belaka. Pelemahan potensi Muhammadiyahdatang pula dari tarikan politik, terutama partai politik, termasuk politikberbasis agama. Kecenderungan politik yang demikian sebenarnya wajar adanyadilihat dari kepentingan partai politik mana pun, baik karena alasan agama ataumurni politik atau campuran keduanya. Partai politik mana pun selalu menghimpundan memobilisasi dukungan demi capaian politiknya.

Mana ada partai politikyang tak mencari dukungan massa.Namun masalahnya, memang menjadi rumit manakala kepentingan politik bersilangandengan agama dan lain-lainnya sehingga melahirkan *cross cutting of interest* yang semakin kompleks. Politik danrelasinya menjadi sarat beban. Muhammadiyah sendiri sebenarnya tidak terlalumemaksakan diri dalam menghadapi persoalan tersebut, apalagi secara berlebihan.Masalah tersebut ditempatkan sebagai sebuah dinamika yang dapat kembali normaldan menemukan keseimbangan baru, siapa tahu banyak pihak dapat saling mengambilhikmah.

Semangat ukhuwah dengansesama komponen umat dan bangsa tetap harus diutamakan. Dibutuhkan sikap salingtoleran serta menempatkan posisi masing-masing secara lebih matang dan dewasadengan mengedepankan kemaslahatan umum. Persentuhan politik dan agama bukanlagi menyangkut boleh atau tidak boleh, kepentingan pragmatis atau idealisme,tetapi juga masuk ke wilayah relasi antarkelompok di tubuh sesama umat dankomponen bangsa, yang memerlukan rasionalitas sekaligus kearifan. Tidak semuamaksud baik akan bermakna baik dan menghasilkan kebaikan bersama karenademikian kompleksnya realitas kehidupan yang dihadapi dengan segala macamikutannya.

Karena itu, Muhammadiyahsendiri pasca-Tanwir di Yogyakarta itu akanlebih berkonsentrasi pada peneguhan dan pencerahan diri di tubuh gerakanyadengan orientasi kerja untuk sebesar-besarnya berkhidmat bagi kemajuan umat,bangsa, dan dunia kemanusiaan secara lebih optimal. Pada titik inilah makasidang Tanwir Muhammadiyah mengambil langkah muhasabah dengan melakukanrevitalisasi gerakan secara simultan.

Pertama, melakukanrevitalisasi ideologis, yakni memperkokoh kembali setiap anggotanya akanidealisme, misi, usaha, cita-cita, khittah, dan kepentingan gerakanMuhammadiyah. Muhammadiyah juga melakukan revitalisasi organisasi ke seluruhhuni dengan konsentrasi pada pemberdayaan cabang dan ranting yang berbasispengajian serta gerakan jamaah dan dakwah jamaah. Revitalisasi juga ditekankanpada peningkatan kualitas usaha melalui amal usaha, program,dan kegiatanalternatif yang bersifat unggulan di berbagai bidangnya yang selama ini menjadiciri khas gerakan Muhammadiyah, seperti pemberdayaan petani, revitalisasi pendidikan, intensifikasi lembaga-lembaga kesehatan, dan sebagainya.

Gerakan perempuan Muhammadiyah melalui Aisyiyah juga terus ditingkatkan hingga meluas ke segenap segmen sosial di akar rumput. Ditingkatkan pula kaderisasi dan peningkatan kualitas sumber daya manusia sebagaimana selama ini menjadi salah satu kelebihan Muhammadiyah. Sedangkan dalam tabligh atau dakwah khusus semakin intensifkan langkah-langkah membimbing umat secara lebih terprogram, yang berorientasi pada penanaman nilai-nilai Islam berbasis pemurnian dan pembaruan.

Muhammadiyah juga perlu semakin kebal dari godaan politik sesaat dan kokoh dengan khitahnya, dengan asumsi berikanlah kesempatan kepada partai politik untuk berkiprah optimal dalam perjuangan kekuasaan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Lebih jauh lagi Muhammadiyah akan bekerja keras dalam peningkatan kualitas peran keutamaan, kebangsaan, dan peran global dengan semangat menampilkan Islam yang berkemajuan (din al-hadarah) sekaligus menyebarkan risalah rahmatan lil-alamin. (\*)

**DR HAEDAR NASHIR**  
Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah

ENTREPRENEURSHIP MEMBANGUN KEMANDIRIAN  
GERAKAN KADER

PDF PRINT EMAIL

Written by Administrator  
Friday, 17 October 2008

**Oleh: Tito Siswanto**

*Gaya hidup materialisme yang direngkuh dengan cara instan, telah mewarnai pula kehidupan masyarakat. Justru gaya hidup seperti itu dipertontonkan oleh elit bangsa kita, tidak kecuali kaum politis yang tiba-tiba menjadi orang kaya baru (Mukhaer Pakkana: 2005)*

## **Pendahuluan**

Istilah kader, umumnya menunjukkan pada pengertian kelompok elite atau inti sebagai bagian kelompok atau jama'ah yang terpenting dan yang telah lulus dalam proses seleksi. Adapun pengertian kader yang lebih operasional adalah seseorang yang telah menyetujui dan meyakini kebenaran suatu tujuan dari suatu kelompok atau jama'ah tertentu, kemudian secara terus menerus dan setia turut berjuang dalam proses pencapaian tujuan yang telah disetujui dan diyakini itu (Imawan Wahyudi, 2002:9).

Pertanyaan yang seyogyanya diajukan adalah mengapa *trend* masyarakat semakin digeluti oleh budaya Instan? Bisa jadi hal ini dilatari oleh kemalasan untuk bekerja dan berinovasi, yang akhirnya melemahkan tingkat produktivitas kader. Dalam hal ini kita

tidak bisa dikatakan sebagai faktor produksi, tapi ia harus dilihat dari sisi kemandirian dalam mengelola dirinya (*self manage*).

Tentu saja seorang kader perlu membudayakan kemandirian atau budaya kewirausahaan yang senantiasa berinternalisasi bagi setiap individu, sebab kewirausahaan berarti kemandirian. Secara bahasa *Wira* artinya utama, sementara *swasta* berdiri diatas kaki sendiri atau berdiri diatas kemampuan sendiri. Kemandirian Ikatan hanya bisa dilakukan dengan membangun budaya berwirausaha (*Entrepreneurship*).

### **Ahmad Dahlan Tauladan Entrepreneur**

Sosok Ahmad Dahlan sangat sederhana, bersahaja dan memiliki jiwa wirausaha yang tinggi. Disamping kegiatan sehari-harinya sebagai guru mengaji dan khatib, beliau juga seorang pedagang (*Entrepreneur*). Ahmad Dahlan sering melakukan perjalanan ke berbagai kota untuk berdagang. Dalam perjalanan bisnisnya beliau selalu membawa misi dakwah Islamiyah. Sehingga tingkah lakunya dicontoh dan menjadi inspirasi bagi pengikutnya, tentu dalam aktivitas bisnisnya disinari oleh ajaran Islam.

Ahmad Dahlan selalu berpesan kepada rekan aktivis organisasinya "*Hidup-hidupilah Muhammadiyah jangan mencari kehidupan di Muhammadiyah*" pesan ini yang harus kita teladani sebagai Kader Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) sebagai organisasi yang berada dalam naungan salah satu organisasi Islam terbesar di Indonesia bahkan di Dunia. Yang sampai saat ini memiliki amal usaha antara lain: bidang pendidikan (TK= 3.980; SD= 6.728; SMP= 3.279; SMA= 2.776; Kejuruan= 101; Pesantren= 32; Perguruan Tinggi= 176, jumlah 17.072 buah serta memiliki tanah wakaf 29.808.164,60 ha. Selain itu juga memiliki amal usaha di bidang kesehatan yakni PKU= 47; Poliklinik= 217; Kelinik Bersalin= 70 dan Akademik Perawat= 62 Buah. (Data: [www.muhamadiyah.or.id](http://www.muhamadiyah.or.id))

Sangat sulit bagi kita, bila kita memahami pesan dari Ahmad Dahlan sebagai mana disebutkan diatas bila kita melihat aset Muhammadiyah yang bisa dikategorikan berlimpah, dalam hati kecil mungkin bertanya-tanya "Kita yang menghidupi

Muhammadiyah atau sebaliknya?” hingga sekarang hal ini masih menjadi teka-teki yang belum bisa terjawab bila IMM sebagai kader hanya bisa mengemis atau meminta-minta tanpa melakukan tindakan konkret dengan membuka usaha baru (*berwirausaha*).

KH. Ahmad Dahlan juga selalu mengajarkan dalam pengajiannya bahwa Islam tidak hanya bersifat ucapan, akan tetapi harus diaplikasikan dalam serangkaian aksi nyata berupa amalan yang konkret diberbagai bidang tak terkecuali dibidang ekonomi. Disisi gerakan ekonomi, Ahmad Dahlan telah mengajarkan kepada kita semua tentang kerja keras dan kemandirian, disamping kerja ikhlas dan kerja cerdas.

Dalam tulisan Darmawa (1995) mengemukakan bahwa untuk memperjuangkan kepentingan ekonominya, warga muhammadiyah juga harus memajukan usahanya agar bisa membayar zakat, shadaqah, infaq atau memberi wakaf, warga Muhammadiyah harus menengaok keorganisasi lain.

Warga Muhammadiyah di kota-kota industeri, seperti Yogyakarta, Pekalongan, Solo, Tasik Malaya, Tulungagung, dan kota lainnya merupakan tulang punggung gerakan koprasi. Dari sini jelas bahwa Muhammadiyah lahir dari para pedagang (*Entrepreneur*), dan ternyata para pengurus Muhammadiyah didominasi oleh para pebisnis yang memiliki misi yang jelas terhadap perjuangan *amar ma'ruf nahi munkar*. (Sutia Budi: 2007)

### **Gerakan Intelektual, Gerakan Anti Pengangguran**

Statistik krisis ekonomi menghasilkan 1.4 juta orang kehilangan pekerjaan ditahun 1998, sementara pekerja disektor informal meningkat 3.6 juta ditahun yang sama (Sukernas 1999). BPS tahun 2002 mencatat angkakerja sebesar 100.8 juta orang diantaranya 2.7% adalah lulusan Universitas dengan struktur pekerja sebesar 91.6 juta. Namun dilain pihak kesempatan kerja formal hanya tersedia 27.8 juta. Kemana sisa sekitar 73 juta? Gambaran semakin menakutkan dengan angka kemiskinan dari pemerintah yang telah mencapai 37.4 juta orang.(Sumber Data: BPS, 2003, Jakarta )

Pada umumnya, bagi sementara IMM yang merasa teridik atau merasa berpengetahuan akan segera memulai melakukan analisa masalah dengan logikanya. Masalah demi

masalah dibedah hingga merasa mengetahui akar masalahnya (*the root of problem*) dengan cara berdiskusi analisa sosial, beradu pendapat dengan menyalah-nyalahkan pemimpin, penegak hukum, lingkungan dan lain-lain sampai akhirnya jenuh, lelah dan menyadarkan.

Langkah sistematis harus dilakukan berpegang teguh pada tujuan bersama dilandaskan saling percaya, bahu membahu membangun kemajuan umat dan ikatan. Perlu penyesuaian dalam sistem pengkaderan. Pendekatan dogmatis dan hafalan sudah saatnya digantikan dengan pendekatan partisipatif dan ekspresif untuk merangsang kreatifitas dan percaya diri. Dakwah dengan modal sosial secara konvensional telah kita miliki, kemampuan berbicara, menganalisa serta keintelektualan sudah menjadi suatu keharusan bahkan menjadi santapan sehari-hari *skill* yang merupakan dasar dari IMM, tinggal bagaimana keintelektualan yang menjadi bagian kompetensi dapat menghasilkan sebuah tindakan konkret mendorong terciptanya kader yang berjiwa *Entrepreneur* yang mampu membangun masyarakat serta kader IMM pada khususnya menjadi kader yang mandiri serta luput dari pengangguran dengan cara berwirausaha.

### **Kebutuhan akan wirausaha**

Untuk tidak jauh larut, mari kita mencari potensi yang telah ada di sekitar. Penyelamat bangsa ini ternyata adalah sesuatu yang disebut UKM. UKM saat ini ternyata mampu menyerap 79 juta orang tenaga kerja. Tahun 2003 sumbangan terhadap PDB mencapai 56,7% dimana usaha besar hanya 43,3% saja. Statistik BPS tahun 2003 menunjukkan jumlah UKM di Indonesia mencapai 42,4 juta unit, dimana 41,8 jutanya berupa usaha mikro, 1,36 juta usaha kecil dan 62 ribu merupakan usaha menengah. Bandingkan jumlahnya dengan usaha kategori besar yang hanya berkisar 2 ribu unit saja. Tidak heran bahwa kementerian koperasi dan UKM sangat serius mendorong pengembangan kewirausahaan karena melihat ini sebagai resep utama penyelamatan bangsa dengan menargetkan lahirnya 20 juta wirausaha baru untuk Indonesia dapat berpotensi sejajar dengan negara tetangga seperti Malaysia dan India. Diluar kebutuhan akan pengkajian lebih mendalam tentang daya saing, masalah struktural penyebaran dan faktor-faktor kritis yang terlibat, jelas sudah bahwa budaya kewirausahaan yang akan melahirkan

wirausaha-wirausaha adalah satu jawaban penting keterpurukan kita.(Data: Biro Pusat Statistik: 2003)

Dari variabel yang berbeda, tentu dengan berwirausaha, kemandirian dalam pergerakan akan tercipta baik secara individu maupun secara organisasi. Ketika kita sadari kebutuhan dari pada duniawi pastinya berorientasi pada profit atau uang, karna dengan uang segala hal dapat kita lakukan, pepatah Cina yang berbunyi: *"Yu Chien Se Te' Kui Thui Mo"* yang artinya "bila ada uang, setanpun bisa kita perbudak" dan itu adalah kebenaran praktis. Tulisan ini tidak mengajarkan kita menjadi seorang kapitalis tetapi tentu saja untuk membawa kita kepada kemandirian dan tidak perlu ada ketergantungan dalam berkreasi. Dengan banyaknya uang kita bisa melakukan segala macam perbuatan baik seperti memakmurkan kader-kader IMM, menyelenggarakan kegiatan (DAD, DAM, DAP) tanpa menjual proposal ke orang lain atau kepada elit politik dengan perjanjian, membayar zakat, infak, shadakah, bersekolah, menyekolahkan sanak keluarga dan lain-lain.

Dari pemaparan di atas muncullah suatu pertanyaan "lalu apa yang harus kita lakukan untuk mewujudkan suatu kemandirian?". jawabanya adalah "bekerja", namun tinggal bagaimana keinginan kita dalam bekerja "bekerja pada orang lain atau memperkerjakan diri sendiri dan orang lain".

### **Realitas dan Realisasi Gerakan**

Dari hasil perdiskusian warung kopi yang kami lakukan bersama rekan- rekan IMM yang masih menduduki di Komisariat se usai melakukan diskusi rutin kajian ekonomi Bidang Hikmah dimana pertemuan sebelumnya diskusi yang kami lakukan bertajuk politik. Dari situ kami sadar bahwa kebanyakan kader IMM sepertinya belum dapat melakukan tindakan konkret baik terhadap Ikatan terlebih terhadap Persyarikatan dan Bangsa. Suatu gagasan hanya sebuah retorika semata. Teori Strukturasi Menurut Anthony Giddens "tidak ada aksi tanpa adanya teori" itu benar, walaupun ada kebanyakan orang berpendapat "yang penting aksi, bukan teori" itupun tidak salah, disitu ia berperan tentang bagaimana menyeimbangkan keduanya. Tentu keduanya menjadi sesuatu yang

tidak bisa dipisahkan, namun yang dikhawatirkan bila teori tersebut dipelesetkan oleh segelintir orang yang merasa jenuh dengan ketidakpastian IMM. Bisa saja teori tersebut dirubah menjadi “tidak ada aksi, walau banyak teori”.

Disadari bahwa karakter pergerakan di tubuh IMM seakan lenyap pelan-pelan. Pergerakan tersebut dikalahkan oleh syahwat politik yang sesungguhnya mengkerdikan Ikatan dan pribadi-pribadi mereka sendiri. Terlebih ketika IMM kergutatan pada permasalahan intern tanpa peduli dengan permasalahan-permasalahan Bangsa, tentang kebijakan pemerintah yang tidak memihak pada masyarakat lemah atau kemasabodoan terhadap kader-kader yang dalam tahap pemula.

Dalam menghadapi tantangan globalisasi yang penuh persaingan, orientasi kearah terbentuknya kader IMM yang berwawasan dan mampu bersaing harus segera dibentuk sejak dini, tentunya IMM harus menjadi subjek bukan objek, Jika perlu IMM seharusnya menjadi ‘Maha’ dalam merealisasi Teori Strukturasi. Namun dalam aksi tentu menjadi masalah ketika kita harus terhambat pada permasalahan permodalan secara finansial yang menyebabkan pergerakan menjadi tidak independen atau ditunggangi oleh segelintir orang (dalang) yang memiliki kepentingan dalam pergerakan tersebut.

Sebagai formula, untuk dapat keluar dari jeratan gerakan ketergantungan tentu IMM harus bisa mendatangkan profit dan menghasilkan income dengan cara berwirausaha. Namun menjadi sebuah permasalahan baru ketika kader-kader IMM buta akan bagaimana mengawali berwirausaha. Beberapa hal yang perlu kita analisa dan dilakukan IMM untuk menangani berbagai macam permasalahan tersebut., antara lain:

#### 1. Evaluasi pengkaderan

Perlu dilakukan dalam pengkaderan baik formal maupun non formal, terutama pada tingkatan dasar (komisariat), apakah pengkaderan yang selama ini telah berbicara tentang ekonomi atau ketenagakerjaan yang selama ini sedang kritis. Tentu semua itu perlu ditanamkan disetiap bentuk pengkaderan terutama pada tahapan pemula, karna tentunya kita tidak dapat lepas dari semua itu.

Tidak ada jaminan bagi siapapun untuk dapat menghasilkan income bila hanya mengharapkan dapat bekerja saat kuliah atau setelah kuliah kepada perusahaan yang sudah ada. Sebagai contoh lihat saja hasil analisa yang dilakukan oleh DEPNAKERTRANS tentang perbandingan jumlah lowongan kerja, pelamar dan pelamar yang diterima berikut ini:

Jumlah Lowongan : 3

Jumlah Pelamar : 10

Jumlah Pelamar yang diterima : 2

Tentu ini penting untuk dikaji sebagai motivasi untuk tidak lagi bergantung pada perusahaan yang selama ini sudah mewarnai di dunia usaha.

Memang tidak salah ketika pengkaderan dilakukan dengan sistem penanaman ideologi, menggali keintelektualan, pengembangan pola berpikir yang lebih luas. Tetapi alangkah lebih baik dalam pengkaderan juga ditanamkan jiwa- jiwa Entrepreneur. (Sumber Data: BPS, DEPNAKERTRANS Februari 2006).

## 2. Melakukan Pelatihan (*Training*)

Sekali setiap akhir atau menjelang kepengurusan baru bagi IMM tentu tidak asing tidak asing kita mendengar dan menyaksikan suatu hajatan besar yaitu Musyawarah Komisariat (MUSKOM), Musyawarah Cabang (MUSCAB), Musyawarah Daerah (MUSDA) dan Muktamar pada tingkatan pusat. Tentu hajatan ini menjadi peristiwa bersejarah bagi IMM dimana pada musyawarah ada segelintir golongan yang akan mengakhiri masa bakti dan disatu sisi akan mengawalinya. Dengan rangkaian yang berpariatif, dengan mekanisme persidangan seperti layaknya rapat paripurna anggota DPR RI.

Disetiap rapat komisi dalam Musyawarah lakukan rekomendasi bagi IMM untuk kiranya melakukan pelatihan- pelatihan Kewirausahaan (Entrepreneur) tanpa terkecuali dalam tingkatan apapun. Jika perlu dalam tingkatan komisariat sebagai

langkah mengawali IMM, bentuk kelompok belajar serta lakukan pelatihan-pelatihan kewirausahaan secara terus menerus disamping melakukan aktivitas dakwah *amar ma'ruf nahi munkar* dan aktivitas lain, dan kemudian jadikan program dalam rapat kerja pengurus dan jalankan selama kepengurusan.

### 3. Menjadi Wirausaha di tempat 'Bekerja' (Belajar dan Aktivis).

Waktu dan peluang hanya datang satu kali, ya itu benar. Dari pemahaman yang berbeda sesungguhnya waktu dan peluang selalu datang berkali-kali karna Tuhan maha pengasih dan tidak pernah berhenti mengasihi hamba-Nya, tetapi justru keberanian kita yang belum ada untuk 'mengambil peluang' tersebut. Maka segera setelah memahami arti pentingnya berwirausaha, lakukan dalam bentuk praktek. Badan Usaha Milik Ikatan (BUMI) yang selama ini antara ada dan tiada bisa dikembangkan dalam bentuk usaha-usaha kecil seperti:

- Membuka Jasa Pengetikan disekitar kampus.
- Membuka koperasi mahasiswa berbentuk eceran.
- Membentuk Bazar dalam setiap kegiatan yang dilakukan (seminar, pameran, pelatihan, dll.)
- Membuka Lembaga Pendidikan Luar Sekolah (Kursus dan Sejenisnya).

Atau bentuk lain yang lebih kreatif sesuai dengan kebutuhan pasar. Contoh ini merupakan gagasan konyol tetapi masuk akal, karna berdasarkan teori sesuatu yang besar perlu diawali dengan hal-hal yang kecil dan kita tidak akan bisa melakukan hal yang besar bila tidak bisa melakukan hal yang kecil.

Permasalahan permodalan yang sering kali menjadi sandungan dalam berwirausaha menjadikan kemandegan dan ketakutan untuk memulai. Sesungguhnya yang utama dalam memulai berwirausaha bukanlah modal melainkan *ide*. Menurut Sudar Siandes (2007) ada 3 (tiga) 'B' sebagai Konsep permodalan dalam memulai berwirausaha, yaitu **BOTOL, BOBOL, BODOL**.

- **BOTOL** : Berani, Optimis, Tenaga Orang Lain.

Konsep ini adalah sistem pemanfaatan orang lain yang ahli dalam bidang tertentu dan kita hanya menggunakan ide yang kita punya,

• **BOBOL** : Berani, Optimis, Bisnis orang lain.

Dalam konsep ini membawa kita untuk mencapai tujuan kita menggunakan bisnis orang lain, paling tidak dalam konsep ini kita hanya menjadi perantara dan mendapat keuntungan tanpa modal.

• **BODOL** : Berani, Optimis, Duit Orang Lain.

Dengan modal orang dan keberanian yang kita punya serta *skill* yang cukup kita dapat menciptakan usaha dengan konsep ini. Tentu ini beresiko, namun justru disinilah jiwa Entrepreneurship kita diuji.

Dari sini sesungguhnya tidak ada lagi keraguan bagi kita sebagai kader yang memiliki potensi cukup lumayan, segala bentuk tentang pemahaman kewirausahaan telah kita miliki. Uang bukan suatu hambatan untuk menghasilkan uang terkecuali jika memang IMM ingin menciptakan komunitas PESANTREN (Pengangguran Santai Tapi Keren).

## **Penutup**

Cara berpikir yang penuh dengan penilaian bukan perancangan (Edwar de Bono, 2003). Logika yang baik dengan persepsi keliru menghasilkan arah keliru kita luput menyadari kedudukan dan potensi diri sebagai subjek yang diberikan Allah SWT. Mulailah dari perubahan diri sendiri diporsi, tempat, peran dan waktunya sendiri-sendiri. Memiliki motivasi yang kuat, untuk berfikir kreatif dan konstruktif. Berbagai studi tentang keberhasilan individu telah membuktikan bahwa aspek metafisik bukan fisik yang menentukan keberhasilan.

Thomas A. Edition mengemukakan bahwa keberuntungan terjadi ketika kesempatan bertemu dengan kesiapan. Semua kategori telah kita miliki, tinggal bagaimana kita melakukan tindakan konkret menuju kemandirian ditengah Kondisi Indonesia saat ini dan dimasa depan sangat membutuhkan manusia dengan jiwa wirausaha yang mampu menjadi pengusaha maupun profesional kompetitif menghadapi segala perubahan

lingkungan.

IMM harus bisa menjawab semua tantangan itu, kader IMM harus bisa menjadi penghidup organisasi dan bukan mencari kehidupan di organisasi. Mari kita bangun sebuah gerakan kemandirian. Gerakan ini adalah gerakan ENTREPRENEURSHIP.

[Pernyataan Muhammadiyah jelang seabad](#)

Mar 22, '08 12:02 PM  
for everyone

Zhawāhir al-Afkār al-Muhammadiyah 'Abra Qarn min al-Zamān

Administrator

Kamis, 23 Maret 2006

*Bismillahirrahmanirrahim*

Bahwa keberhasilan perjuangan Muhammadiyah yang berjalan hampir satu abad pada hakikatnya merupakan rahmat dan karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala yang patut disyukuri oleh seluruh warga Persyarikatan. Dengan modal keikhlasan dan kerja keras segenap anggota disertai dukungan masyarakat luas Muhammadiyah tidak kenal lelah melaksanakan misi da'wah dan tajdid dalam memajukan kehidupan umat, bangsa, dan dunia kemanusiaan. Gerakan kemajuan tersebut ditunjukkan dalam melakukan pembaruan pemahaman Islam, pendidikan, kesehatan, kesejahteraan sosial, serta berperan dalam perjuangan kemerdekaan dan pembangunan bangsa di negeri ini. Namun disadari pula masih terdapat sejumlah masalah atau tantangan yang harus dihadapi dan memerlukan langkah-langkah strategis dalam usianya yang cukup tua itu. Perjuangan Muhammadiyah yang diwarnai dinamika pasang-surut itu tidak lain untuk mencapai tujuan terwujudnya masyarakat Islam yang sebenar-benarnya serta dalam rangka menyebarkan misi kerisalahan Islam sebagai rahmatan lil-'alamin di bumi Allah yang terhampar luas ini.

Karena itu dengan senantiasa mengharapkan ridha dan pertolongan Allah SWT Muhammadiyah dalam usia dan kiprahnya jelang satu abad ini menyampaikan pernyataan pikiran (*zhawāhir al-afkār/statement of mind*) sebagai berikut:

#### **A. Komitmen Gerakan**

1. Muhammadiyah adalah gerakan Islam yang mengemban misi da'wah dan tajdid, berasas Islam, bersumber pada al-Quran dan as-Sunnah, dan bertujuan mewujudkan masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Muhammadiyah sesuai jatidirinya senantiasa istiqamah untuk menunjukkan komitmen yang tinggi dalam memajukan kehidupan umat, bangsa, dan dunia kemanusiaan sebagai wujud ikhtiar menyebarkan Islam yang bercorak *rahmatan lil-'alamin*. Misi

- kerisalahan dan kerahmatan yang diemban Muhammadiyah tersebut secara nyata diwujudkan melalui berbagai kiprahnya dalam pengembangan amal usaha, program, dan kegiatan yang sebesar-besarnya membawa pada kemaslahatan hidup di dunia dan akhirat bagi seluruh umat manusia di muka bumi ini.
2. Muhammadiyah dalam usianya jelang satu abad telah banyak mendirikan taman kana-kanak, sekolah, perguruan tinggi, rumah sakit, balai pengobatan, rumah yatim piatu, usaha ekonomi, penerbitan, dan amal usaha lainnya. Muhammadiyah juga membangun masjid, mushalla, melakukan langkah-langkah da'wah dalam berbagai bentuk kegiatan pembinaan umat yang meluas di seluruh pelosok Tanah Air. Muhammadiyah bahkan tak pernah berhenti melakukan peran-peran kebangsaan dan peran-peran kemanusiaannya dalam dinamika nasional dan global. Kiprah Muhammadiyah tersebut menunjukkan bukti nyata kepada masyarakat bahwa misi gerakan Islam yang diembannya bersifat amaliah untuk kemajuan dan pencerahan yang membawa pada kemaslahatan masyarakat yang seluas-luasnya. Peran kesejarahan yang dilakukan Muhammadiyah tersebut berlangsung dalam dinamika yang beragam. Pada masa penjajahan sejak berdirinya tahun 1330 H/1912 M., Muhammadiyah mengalami cengkeraman politik kolonial sebagaimana halnya dialami oleh seluruh masyarakat Indonesia saat itu, tetapi Muhammadiyah tetap berbuat tak kenal lelah untuk kemerdekaan dan kemajuan bangsa. Setelah Indonesia merdeka pada masa awal dan era Orde Lama Muhammadiyah mengalami berbagai situasi sulit akibat konflik politik nasional yang kompleks, namun Muhammadiyah tetap berkiprah dalam da'wah dan kegiatan kemasyarakatan. Pada era Orde Baru di bawah rezim kekuasaan yang melakukan depolitisasi (pengebirian politik), deideologisasi (pengebirian ideologi), dan kebijakan politik yang otoriter, Muhammadiyah juga terus berjuang mengembangkan amal usaha dan aktivitas da'wah Islam. Sedangkan pada masa reformasi, Muhammadiyah memanfaatkan peluang kondisi nasional yang terbuka itu dengan melakukan revitalisasi dan peningkatan kualitas amal usaha serta aktivitas da'wahnya. Melalui kiprahnya dalam sejarah yang panjang itu Muhammadiyah telah diterima oleh masyarakat luas baik di tingkat lokal, nasional, dan internasional sebagai salah satu pilar kekuatan Islam yang memberi sumbangan berharga bagi kemajuan peradaban umat manusia.
  3. Kiprah dan langkah Muhammadiyah yang penuh dinamika itu masih dirasakan belum mencapai puncak keberhasilan dalam mencapai tujuan dan cita-citanya, sehingga Muhammadiyah semakin dituntut untuk meneguhkan dan merevitalisasi gerakannya ke seluruh lapangan kehidupan. Karena itu Muhammadiyah akan melaksanakan tajdid (pembaruan) dalam gerakannya sehingga di era kehidupan modern abad ke-21 yang kompleks ini sesuai dengan Keyakinan dan Kepribadiannya dapat tampil sebagai pilar kekuatan gerakan pencerahan peradaban di berbagai lingkungan kehidupan.

## **B. Pandangan Keagamaan**

1. Muhammadiyah dalam melakukan kiprahnya di berbagai bidang kehidupan untuk kemajuan umat, bangsa, dan dunia kemanusiaan dilandasi oleh keyakinan dan

pemahaman keagamaan bahwa Islam sebagai ajaran yang membawa misi kebenaran Ilahiah harus didakwahkan sehingga menjadi rahmatan lil-'alamin di muka bumi ini. Bahwa Islam sebagai Wahyu Allah yang dibawa para Rasul hingga Rasul akhir zaman Muhammad Saw., adalah ajaran yang mengandung hidayah, penyerahan diri, rahmat, kemaslahatan, keselamatan, dan kebahagiaan hidup umat manusia di dunia dan akhirat. Keyakinan dan paham Islam yang fundamental itu diaktualisasikan oleh Muhammadiyah dalam bentuk gerakan Islam yang menjalankan misi dakwah dan tajdid untuk kemaslahatan hidup seluruh umat manusia.

2. Misi da'wah Muhammadiyah yang mendasar itu merupakan perwujudan dari semangat awal Persyarikatan ini sejak didirikannya yang dijiwai oleh pesan Allah dalam Al-Quran Surat Ali-Imran 104, yang artinya: "Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf, dan mencegah dari yang munkar, mereka itulah orang-orang yang beruntung". Kewajiban dan panggilan da'wah yang luhur itu menjadi komitmen utama Muhammadiyah sebagai ikhtiar untuk menjadi kekuatan Khaira Ummah sekaligus dalam membangun masyarakat Islam yang ideal seperti itu sebagaimana pesan Allah dalam Al-Quran Surat Ali-Imran ayat 110, yang artinya: "Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf, dan mencegah dari yang munkar, dan beriman kepada Allah. Sekiranya Ahli Kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka, di antara mereka ada yang beriman, dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik.". Dengan merujuk pada Firman Allah dalam Al-Quran Surat Ali Imran 104 dan 110, Muhammadiyah menyebarkan ajaran Islam yang komprehensif dan multiaspek itu melalui da'wah untuk mengajak pada kebaikan (Islam), al-amr bi al-ma'ruf wa al-nahy 'an al-munkar (mengajak kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar), sehingga umat manusia memperoleh keberuntungan lahir dan batin dalam kehidupan ini. Da'wah yang demikian mengandung makna bahwa Islam sebagai ajaran selalu bersifat transformasional; yakni dakwah yang membawa perubahan yang bersifat kemajuan, kebaikan, kebenaran, keadilan, dan nilai-nilai keutamaan lainnya untuk kemaslahatan serta keselamatan hidup umat manusia tanpa membedakan ras, suku, golongan, agama, dan lain-lain.
3. Kyai Haji Ahmad Dahlan sebagai pendiri Muhammadiyah dikenal sebagai pelopor gerakan tajdid (pembaruan). Tajdid yang dilakukan pendiri Muhammadiyah itu bersifat pemurnian (purifikasi) dan perubahan ke arah kemajuan (dinamisasi), yang semuanya berpijak pada pemahaman tentang Islam yang kokoh dan luas. Dengan pandangan Islam yang demikian Kyai Dahlan tidak hanya berhasil melakukan pembinaan yang kokoh dalam akidah, ibadah, dan akhlak kaum muslimin, tetapi sekaligus melakukan pembaruan dalam amaliah mu'amalat duniawiyah sehingga Islam menjadi agama yang menyebarkan kemajuan. Semangat tajdid Muhammadiyah tersebut didorong antara lain oleh Sabda Nabi Muhammad s.a.w., yang artinya: "Sesungguhnya Allah mengutus kepada umat manusia pada setiap kurun seratus tahun orang yang memperbaiki ajaran agamanya" (Hadits diriwayatkan oleh Abu Dawud dari Abi Hurairah). Karena itu melalui Muhammadiyah telah diletakkan suatu pandangan keagamaan

- yang tetap kokoh dalam bangunan keimanan yang berlandaskan pada Al-Quran dan As-Sunnah sekaligus mengemban tajdid yang mampu membebaskan manusia dari keterbelakangan menuju kehidupan yang berkemajuan dan berkeadaban.
4. Dalam pandangan Muhammadiyah, bahwa masyarakat Islam yang sebenarnya yang menjadi tujuan gerakan merupakan wujud aktualisasi ajaran Islam dalam struktur kehidupan kolektif manusia yang memiliki corak masyarakat tengahan (ummatan wasatha) yang berkemajuan baik dalam wujud sistem nilai sosial-budaya, sistem sosial, dan lingkungan fisik yang dibangunnya. Masyarakat Islam adalah masyarakat yang memiliki keseimbangan antara kehidupan lahiriah dan batiniah, rasionalitas dan spiritualitas, aqidah dan muamalat, individual dan sosial, duniawi dan ukhrawi, sekaligus menampilkan corak masyarakat yang mengamalkan nilai-nilai keadilan, kejujuran, kesejahteraan, kerjasama, kerjakeras, kedisiplinan, dan keunggulan dalam segala lapangan kehidupan. Dalam menghadapi dinamika kehidupan, masyarakat Islam semacam itu selalu bersedia bekerjasama dan berlomba-lomba dalam serba kebaikan di tengah persaingan pasar-bebas di segala lapangan kehidupan dalam semangat "berjuang menghadapi tantangan" (al-jihad li al-muwajjahat) lebih dari sekadar "berjuang melawan musuh" (al-jihad li al-mu'aradhah). Masyarakat Islam yang dicita-citakan Muhammadiyah memiliki kesamaan karakter dengan masyarakat madani, yaitu masyarakat kewargaan (civil-society) yang memiliki keyakinan yang dijiwai nilai-nilai Ilahiah, demokratis, berkeadilan, otonom, berkemajuan, dan berakhlak-mulia (al-akhlaq al-karimah). Masyarakat Islam yang semacam itu berperan sebagai syuhada 'ala al-nas di tengah berbagai pergumulan hidup masyarakat dunia. Karena itu, masyarakat Islam yang sebenarnya yang bercorak "madaniyah" tersebut senantiasa menjadi masyarakat yang serba unggul atau utama (khaira ummah) dibandingkan dengan masyarakat lainnya. Keunggulan kualitas tersebut ditunjukkan oleh kemampuan penguasaan atas nilai-nilai dasar dan kemajuan dalam kebudayaan dan peradaban umat manusia, yaitu nilai-nilai ruhani (spiritualitas), nilai-nilai pengetahuan (ilmu pengetahuan dan teknologi), nilai-nilai materi (ekonomi), nilai-nilai kekuasaan (politik), nilai-nilai keindahan (kesenian), nilai-nilai normatif berperilaku (hukum), dan nilai-nilai kemasyarakatan (budaya) yang lebih berkualitas. Masyarakat Islam yang sebenarnya bahkan senantiasa memiliki kepedulian tinggi terhadap kelangsungan ekologis (lingkungan hidup) dan kualitas martabat hidup manusia baik laki-laki maupun perempuan dalam relasi-relasi yang menjunjungtinggi kemaslahatan, keadilan, dan serba kebajikan hidup. Masyarakat Islam yang demikian juga senantiasa menjauhkan diri dari perilaku yang membawa pada kerusakan (*fasad fi al-ardh*), kedhaliman, dan hal-hal lain yang bersifat menghancurkan kehidupan.

### **C. Pandangan tentang Kehidupan**

1. Muhammadiyah memandang bahwa era kehidupan umat manusia saat ini berada dalam suasana penuh paradoks. Kemajuan dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang sangat luar biasa dibarengi dengan berbagai dampak buruk seperti

- lingkungan hidup yang tercemar (polusi) dan mengalami eksploitasi besar-besaran yang tak terkendali, berkembangnya nalar-instrumental yang memperlemah naluri-naluri alami manusia, lebih jauh lagi melahirkan sekularisasi kehidupan yang menyebabkan manusia kehilangan keseimbangan-keseimbangan hidup yang bersifat religius. Kemajuan kehidupan modern yang melahirkan antitesis post-modern juga diwarnai oleh kecenderungan yang bersifat serba-bebas (supra-liberal), serba-boleh (anarkhis), dan serba-menapikan nilai (nihilisme), sehingga memberi peluang semakin terbuka bagi kemungkinan anti-agama (agnostisme) dan anti-Tuhan (atheisme) secara sistematis. Demokrasi, kesadaran akan hak asasi manusia, dan emansipasi perempuan juga telah melahirkan corak kehidupan yang lebih egaliter dan berkeadilan secara meluas, tetapi juga membawa implikasi pada kebebasan yang melampaui batas dan egoisme yang serba liberal, yang jika tanpa bingkai moral dan spiritual yang kokoh dapat merusak hubungan-hubungan manusia yang harmoni.
2. Dalam memasuki babak baru globalisasi, selain melahirkan pola hubungan positif antarbangsa dan antarnegara yang serba melintasi, pada saat yang sama melahirkan hal-hal negatif dalam kehidupan umat manusia sedunia. Di era global ini masyarakat memiliki kecenderungan penghambaan terhadap egoisme (ta'bid al-nafs), penghambaan terhadap materi (ta'bid al-mawād), penghambaan terhadap nafsu seksual (ta'bid al-syahawāt), dan penghambaan terhadap kekuasaan (ta'bid al-siyasiyyah) yang menggeser nilai-nilai fitri (otentik) manusia dalam bertauhid (keimanan terhadap Allah SWT) dan hidup dalam kebaikan di dunia dan akhirat. Globalisasi juga telah mendorong ekstrimisme baru berupa lahirnya fanatisme primordial agama, etnik, dan kedaerahan yang bersifat lokal sehingga membangun sekat-sekat baru dalam kehidupan. Perkembangan global pasca perang-dingin (keruntuhan Komunisme) juga ditandai dengan pesatnya pengaruh Neo-liberalisme yang semakin mengokohkan dominasi Kapitalisme yang lebih memihak kekuatan-kekuatan berjuasi sekaligus kian meminggirkan kelompok-kelompok masyarakat yang lemah (dhu'afā) dan tertindas (mustadh'afin), sehingga melahirkan ketidak-adilan global yang baru. Namun globalisasi dan alam kehidupan modern yang serba maju saat ini juga dapat dimanfaatkan oleh gerakan-gerakan Islam seperti Muhammadiyah untuk memperluas solidaritas umat manusia sejagad baik sesama umat Islam (ukhuwah islamiyyah) maupun dengan kelompok lain ('alāqah insāniyyah), yang lebih manusiawi dan berkeadaban tinggi.
  3. Karena itu Muhammadiyah mengajak seluruh kekuatan masyarakat, bangsa, dan dunia untuk semakin berperan aktif dalam melakukan ikhtiar-ikhtiar pencerahan di berbagai lapangan dan lini kehidupan sehingga kebudayaan umat manusia di alaf baru ini menuju pada peradaban yang berkemajuan sekaligus bermoral tinggi.

#### **D. Tanggungjawab Kebangsaan dan Kemanusiaan**

1. Muhammadiyah memandang bahwa bangsa Indonesia saat ini tengah berada dalam suasana transisi yang penuh pertarungan. Bahwa keberhasilan atau

- kegagalan dalam menyelesaikan krisis multiwajah akan menentukan nasib perjalanan bangsa ke depan. Masalah korupsi, kerusakan moral dan spiritual, pragmatisme perilaku politik, kemiskinan, pengangguran, konflik sosial, separatisme, kerusakan lingkungan, dan masalah-masalah nasional lainnya jika tidak mampu diselesaikan secara sungguh-sungguh, sistematis, dan fundamental akan semakin memperparah krisis nasional. Wabah masalah tersebut menjadi beban nasional yang semakin berat dengan timbulnya berbagai musibah dan bencana nasional seperti terjadi di Aceh, Nias, dan daerah-daerah lain yang memperlemah dayatahan bangsa. Krisis dan masalah tersebut bahkan akan semakin membebani tubuh bangsa ini jika dipertautkan dengan kondisi sumberdaya manusia, ekonomi, pendidikan, dan infrastruktur nasional maupun lokal yang jauh tertinggal dari kemajuan yang dicapai bangsa lain.
2. Bangsa Indonesia juga tengah berada dalam pertarungan ketika berhadapan dengan perkembangan dunia yang berada dalam cengkeraman globalisasi, politik global, dan berbagai tarik-menarik kepentingan internasional yang diwarnai hegemoni dan ketidakadilan di berbagai bidang kehidupan. Indonesia bahkan menjadi lahan paling subur dan tempat pembuangan limbah sangat mudah dari globalisasi dan pasar bebas yang berwatak neo-liberal. Jika tidak memiliki daya adaptasi, filter, dan integritas kepribadian yang kokoh maka bangsa ini juga akan terombang-ambing dalam hegemoni dan liberalisasi politik global yang penuh konflik dan kepentingan. Pada saat yang sama bangsa ini juga tengah berhadapan dengan relasi-relasi baru yang dibawa oleh multikulturalisme yang memerlukan orientasi kebudayaan dan tatanan sosial baru yang kokoh.
  3. Dalam menghadapi masalah dan tantangan internal maupun eksternal itu bangsa Indonesia memerlukan mobilisasi seluruh potensi dan kemampuan baik berupa sumberdaya manusia, sumberdaya alam, modal sosial-kultural, dan berbagai dayadukung nasional yang kuat dan dikelola dengan sebaik-baiknya. Dalam kondisi yang sangat penuh pertarungan dan sarat tantangan tersebut maka sangat diperlukan kepemimpinan yang handal dan visioner baik yang didukung kemampuan masyarakat yang mandiri baik di tingkat nasional maupun lokal agar berbagai masalah, tantangan, dan potensi bangsa ini mampu dihadapi serta dikelola dengan sebaik-baiknya.
  4. Bangsa Indonesia yang mayoritas muslim juga tidak lepas dari perkembangan yang dihadapi saudara-saudaranya di dunia Islam. Mayoritas dunia Islam selain dililit oleh masalah-masalah nasional masing-masing, pada saat yang sama berada dalam dominasi dan hegemoni politik Barat yang banyak merugikan kepentingan-kepentingan dunia Islam. Sementara antar dunia Islam sendiri selain tidak terdapat persatuan yang kokoh, juga masih diwarnai oleh persaingan dan konflik yang sulit dipertemukan, sehingga semakin memperlemah posisi umat Islam dalam percaturan internasional. Kendati begitu, masih terdapat secercah harapan ketika Islam mulai berkembang di neger-negeri Barat dan terjadi perkembangan alam pikiran baru yang membawa misi perdamaian, kemajuan, dan menjadikan Islam sebagai rahmat bagi alam semesta.

## **E. Agenda dan Langkah Ke Depan**

1. Dalam menghadapi masalah bangsa, umat Islam, dan umat manusia sedunia yang bersifat kompleks dan krusial sebagaimana digambarkan itu Muhammadiyah sebagai salah satu kekuatan nasional akan terus memainkan peranan sosial-keagamaannya sebagaimana selama ini dilakukan dalam perjalanan sejarahnya. Usia jelang satu abad telah menempa kematangan Muhammadiyah untuk tidak kenal lelah dalam berkiprah menjalankan misi da'wah dan tajdid untuk kemajuan umat, bangsa, dan dunia kemanusiaan. Jika selama ini Muhammadiyah telah menorehkan kepeloporan dalam pemurnian dan pembaruan pemikiran Islam, pengembangan pendidikan Islam, pelayanan kesehatan dan kesejahteraan, serta dalam pembinaan kecerdasan dan kemajuan masyarakat; maka pada usianya jelang satu abad ini Muhammadiyah selain melakukan revitalisasi gerakannya juga berikhtiar untuk menjalankan peran-peran baru yang dipandang lebih baik dan lebih bermasalahat bagi kemajuan peradaban.
2. Peran-peran baru sebagai wujud aktualisasi gerakan da'wah dan tajdid yang dapat dikembangkan Muhammadiyah antara lain dalam menjalankan peran politik kebangsaan guna mewujudkan reformasi nasional dan mengawal perjalanan bangsa tanpa terjebak pada politik-praktik (politik kepartaian) yang bersifat jangka pendek dan sarat konflik kepentingan. Dengan bingkai Khittah Ujung Pandang tahun 1971 dan Khittah Denpasar tahun 2002, Muhammadiyah secara proaktif menjalankan peran dalam pemberantasan korupsi, penegakan supremasi hukum, memasyarakatkan etika berpolitik, pengembangan sumberdaya manusia, penyelamatan lingkungan hidup dan sumberdaya alam, memperkokoh integrasi nasional, membangun karakter dan moral bangsa, serta peran-peran kebangsaan lainnya yang bersifat pencerahan. Muhammadiyah juga akan terus menjalankan peran dan langkah-langkah sistematis dalam mengembangkan kehidupan masyarakat madani (civil society) melalui aksi-aksi da'wah kultural yang mengraih pada pembentukan masyarakat Indonesia yang demokratis, otonom, berkeadilan, dan berakhlak mulia.
3. Dalam pergaulan internasional dan dunia Islam, Muhammadiyah juga terpanggil untuk menjalankan peran global dalam membangun tatanan dunia yang lebih damai, adil, maju, dan berkeadaban. Muhammadiyah menyadari pengaruh kuat globalisasi dan ekspansi neo-liberal yang sangat mencengkeram perkembangan masyarakat dunia saat ini. Dalam perkembangan dunia yang sarat permasalahan dan tantangan yang kompleks di abad ke-21 itu Muhammadiyah dituntut untuk terus aktif memainkan peran kerisalahannya agar umat manusia sedunia tidak terseret pada kehancuran oleh keganasan globalisasi dan neo-liberal, pada saat yang sama dapat diarahkan menuju pada keselamatan hidup yang lebih hakiki serta memiliki peradaban yang lebih maju dan berperadaban mulia.
4. Khusus bagi umat Islam baik di tingkat lokal, nasional, maupun global Muhammadiyah dituntut untuk terus memainkan peran da'wah dan tajdid secara lebih baik sehingga kaum muslimin menjadi kekuatan penting dan menentukan dalam perkembangan kebudayaan dan peradaban di era modern yang penuh tantangan ini. Era kebangkitan Islam harus terus digerakkan ke arah kemajuan secara signifikan dalam berbagai bidang kehidupan umat Islam. Umat Islam harus

tumbuh menjadi khaira ummah yang memiliki martabat tinggi di hadapan komunitas masyarakat lain di tingkat lokal, nasional, dan global. Di tengah dinamika umat Islam yang semacam itu Muhammadiyah harus tetap istiqamah dan terus melakukan pembaruan dalam menjalankan dan mewujudkan misi Islam sebagai rahmatan lil-'alamin di bumi Allah yang tercinta ini.

Demikian Pernyataan Pikiran Muhammadiyah Jelang Satu Abad sebagai ungkapan keyakinan, komitmen, pemikiran, sikap, dan ikhtiar mengenai kehadiran dirinya sebagai Gerakan Islam yang mengemban misi da'wah dan tajdid dalam memasuki usianya hampir seratus tahun. Pernyataan Pikiran Muhammadiyah Jelang Satu Abad tersebut menjadi bingkai dan arah bagi segenap anggota dan pimpinan Persyarikatan baik dalam menghadapi perkembangan kehidupan maupun dalam melaksanakan usaha-usaha menuju tercapainya tujuan Muhammadiyah yaitu menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam sehingga terwujud masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Akhirnya, dengan senantiasa memohon ridha dan karunia Allah SWT., semoga kiprah Muhammadiyah di pentas sejarah ini membawa kemasalahatn bagi hidup umat manusia dan menjadi rahmat bagi alam semesta. *Nashr min Allah wa fath qarib.*

## **Membaca 'Manivesto' Muhammadiyah Terhadap Globalisasi**

Muktamar Muhammadiyah ke-45 di Malang kemarin menghasilkan sebuah dokumen yang dikenal sebagai Zhawāhir al-Afkār al-Muhammadiyah 'Abra Qarn min al-Zamān (Pernyataan Pikiran Muhammadiyah Jelang Satu Abad). Dokumen tersebut tampaknya meneruskan tradisi Muhammadiyah yang menghasilkan manifesto demi manifesto di setiap periode sejarahnya. Manifesto-manifesto tersebut kemudian dikenal dengan nama resmi : **Kepribadian Muhammadiyah** (Keputusan Muktamar ke 35, 1956), **Matan Keyakinan dan Cita-Cita Hidup Muhammadiyah** (Keputusan Tanwir Tahun 1969 di Ponorogo), **Khittah Perjuangan Muhammadiyah** ( Muktamar ke-40 Surabaya, 1978) dan **Khitah dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara** (Tanwir Bali 2002 ). Selain dokumen-dokumen diatas, ada juga dokumen-dokumen formal sejarah Muhammadiyah yang layak disebut sebagai manifesto Muhammadiyah seperti **Langkah 12** yang dicetuskan oleh KH Mas Mansyur di masa Pra Kemerdekaan juga **Muqodimah Anggaran Dasar Muhammadiyah** yang digagas Ki Bagus Hadikusumo di awal Kemerdekaan Indonesia, disamping ada sebuah 'manifesto praksis' hasil Muktamar ke 44 tahun 2000 di Jakarta yang dikenal dengan sebutan **Pedoman Hidup Islami Warga Muhammadiyah**.

Tradisi ini memang bukan tradisi yang dimulai oleh KH Ahmad Dahlan, dimana dimasa KH Ahmad Dahlan hidup tidak ada satupun bentuk teks yang kemudian diakui sebagai dokumen organisasi layaknya sebuah manifesto. Mungkin sosok KH A.Dahlan-lah yang dianggap sebagai 'manifesto hidup' dimana di awal perintisan Muhammadiyah itu. Dengan keluarnya bentuk manifesto-manifesto yang keseluruhannya merupakan produk pasca KH Dahlan ini, bisa diartikan sebagian misi KH Ahmad Dahlan telah berhasil ruh tajdid (pembaharuan) di dalam Muhammadiyah secara kelembagaan masih terus bergelora.

Namun yang kemudian perlu di kritisi adalah seberapa besar pengaruh dokumen-dokumen sejarah Muhammadiyah ini dalam perjalanan persyarikatan Muhammadiyah ke depan ? Efektifkah manifesto terbaru berjudul Zhawāhir al-Afkār al-Muhammadiyah 'Abra Qarn min al-Zamān ini dalam perjalanan Muhammadiyah kedepan ?

### **Nilai Strategis Zhawāhir al-Afkār**

Keluarnya Zhawāhir al-Afkār al-Muhammadiyah 'Abra Qarn min al-Zamān (kemudian disebut sebagai Zhawāhir al-Afkār saja) tampaknya bukanlah semata-mata layaknya pidato peringatan ulang tahun Muhammadiyah yang sudah berusia hampir satu abad ini. Zhawāhir al-Afkār ini keluar dalam waktu yang strategis di tengah krisis peradaban Modern umat manusia. Muhammadiyah mungkin merujuk prediksi para penafsir arah peradaban yang sepakat bahwa saat ini adalah detik-detik akhir dari peradaban modern dan merupakan awal dari munculnya konstruksi peradaban baru, walaupun kemudian para penafsir arah peradaban itu memiliki perbedaan membaca kecenderungan jaman dengan rumusan-rumusan yang beragam. Dimana perbedaan-perbedaan itu memunculkan beberapa varian seperti konsep Post Modern Derida dan kawan-kawan, The End of History nya Fukuyama, Toynbee dalam The Study of History, Turning Point-nya Fritjof Capra, atau Peradaban Gelombang Ketiganya Alvin Tofler.

Bila dilihat dari teks Zhawāhir al-Afkār tampak ada perbedaan mendasar dibandingkan dengan isi manifesto-manifesto sebelumnya, dimana selain merupakan sebuah manifesto terpanjang sepanjang sejarah, Zhawāhir al-Afkār ini juga merupakan sebuah manifesto yang menganut pola fikir baru, walaupun tetap berpijak dalam tradisi ar-ruju' ila al-Qur'an wa as-Sunnah dan tajdid. Di dalam dokumen Zhawāhir al-Afkār inilah pertama kali di cantumkan secara jelas tafsir bentuk **Masyarakat Islam yang Sebenar-Benarnya** sebagai tujuan Muhammadiyah dalam 5 pokok pikiran. Dan Zhawāhir al-Afkār tidak sekedar menganut bentuk penegasan ulang identitas persyarikatan yang lebih bersifat nasional seperti manifesto-manifesto sebelumnya, namun juga merupakan sebuah bentuk rumusan visi kedepan Persyarikatan Muhammadiyah dalam menyambut zaman baru yang ditandai dengan Globalisasi.

Mungkin Muhammadiyah dengan Zhawāhir al-Afkār ini ingin menghadirkan kembali 'sosok' KH A Dahlan yang ijtihadnya telah terbukti mampu mengatasi peliknya relasi Islam dengan modernisme selama kurun waktu hampir satu abad ini. Pendek kata, Zhawāhir al-Afkār ini mencoba mentajdid kembali bentuk Muhammadiyahnya KHA Dahlan seabad yang lalu dalam sebuah konstruksi relasi Islam dengan tata peradaban baru pasca runtuhnya modernisme. Atau bahkan dengan Zhawāhir al-Afkār ini Muhammadiyah ingin menghadirkan kembali spirit Piagam Madinah yang telah berhasil 'melampaui jamannya' di tengah peradaban baru yang akan datang .

## Peta Globalisasi Versi Muhammadiyah

Bentuk kesadaran baru tersebut terlihat pada dimasukkannya masalah globalisasi dan tata kehidupan dunia di dalam rumusan Zhawāhir al-Afkār. Di dalam point demi point di dalam Zhawāhir al-Afkār ini, **secara gamblang tergambar peta kondisi masa depan versi Muhammadiyah, tanggung jawab Muhammadiyah sebagai bagian dari bangsa Indonesia dan Kemanusiaan, serta agenda antisipatif Muhammadiyah kedepan dalam rangka menyongsong era baru tersebut.**

Khususnya pada pernyataan kedua point Pandangan Muhammadiyah tentang Kehidupan, Muhammadiyah telah menyadari dan memetakan sebuah era baru yang tak mungkin ditolak lagi yang kemudian disebut sebagai era Globalisasi. Era yang memang belum pernah secara nyata dirasakan oleh pendahulu-pendahulu umat manusia ini disadari Muhammadiyah sebagai pisau bermata dua, dimana bisa bernilai positif dan juga tidak menutup kemungkinan bernilai negatif.

Seperti dibahas oleh para penafsir arah peradaban, di era Globalisasi ini umat manusia akan dihadapkan dengan setting global yang menjadikan mereka terkumpul dalam sebuah 'global village'. Dimana dengan daya dukung revolusi teknologi informasi yang benar-benar memiliki akselerasi yang belum pernah dialami umat manusia sebelumnya, sekat-sekat geografis dan politis akan tidak banyak berarti lagi, faktor produksi yang utama adalah modal intelektual dan manajemen informasi yang kemudian memungkinkan meningkatnya intensitas kehidupan yang berpijak pada kemerdekaan individu dan persaingan bebas dalam berbagai bidang. Apalagi ketika era pasar bebas yang menjadi puncak dari 'hantu' Globalisasi itu sudah berlaku efektif di seluruh dunia.

Meminjam cerita sejarah permusuhan Ibrahim a.s dengan para pemuja berhala, di dalam rumusan Zhawāhir al-Afkār tersebut Muhammadiyah mencoba mengidentifikasi 'berhala-berhala' baru di era Globalisasi. Berhala pertama berupa egoisme (ta'bid al-nafs), penghambaan terhadap materi (ta'bid al-mawād), penghambaan terhadap nafsu seksual (ta'bid al-syahawāt), dan penghambaan terhadap kekuasaan (ta'bid al-siyasiyyah) yang sebenarnya merupakan musuh risalah tauhid sepanjang sejarah umat manusia. Berhala lainnya adalah timbulnya ekstrimisme baru berupa lahirnya fanatisme primordial agama, etnik, dan kedaerahan yang bersifat lokal sehingga membangun sekat-sekat baru dalam kehidupan. Dan berhala yang lain adalah lahirnya ketidak-adilan global yang baru akibat pesatnya pengaruh Neo-liberalisme yang semakin mengokohkan dominasi Kapitalisme yang lebih memihak kekuatan-kekuatan berjuasi sekaligus kian meminggirkan kelompok-kelompok masyarakat yang lemah (dhu'afā) dan tertindas (mustadh'afin).

Namun kemudian Muhammadiyah juga memetakan nilai positif zaman Globalisasi ini dalam rumusan :

Globalisasi dan alam kehidupan modern yang serba maju saat ini juga dapat dimanfaatkan oleh gerakan-gerakan Islam seperti Muhammadiyah untuk memperluas solidaritas umat manusia sejangad baik sesama umat Islam (ukhuwah islamiyyah) maupun dengan kelompok lain ('alāqah insāniyyah), yang lebih manusiawi dan berkeadaban tinggi

Dari pernyataan terakhir diatas tampak bahwa Muhammadiyah ingin menumbuhkan optimisme dalam menghadapi zaman baru yang akan datang. Namun sayang, ternyata Muhammadiyah hanya bisa melihat nilai positif Globalisasi baru sebatas rumusan di atas, sehingga terkesan Muhammadiyah masih belum bisa menangkap sisi positif lain seperti layaknya KHA Dahlan melihat berbagai sisi positif Modernisme di tengah kejamnya modernisme. Sepertinya perlu di kemudian hari untuk lebih jeli memetakan peluang-peluang positif yang lain yang sebenarnya bisa lebih banyak dipetakan, bila tidak spirit baru yang terkandung didalam Zhawāhir al-Afkār ini masih kalah futuristis dibanding visi futuristis KHA Dahlan hampir se-abad yang lalu . Karena seperti layaknya kelahiran peradaban modern di akhir abad-17, rumus peradaban berlaku: siapa yang menyadari dan berhasil mendefinisikan diri kususnya posisi politik dan ekonomi secara tepat dan cepat, memenangkan tafsir atas konstruksi budaya baru serta mampu menginjeksi nilai-nilai fundamental yang diyakini di dalam paradigma universal, dan menguasai perangkat-perangkat peradaban baru sampai tingkatan expert dialah yang mampu bersaing di dalam peradaban baru itu. Dalam rumusan teologi positif, persaingan Global di era Globalisasi harus dimaknai juga sebagai wujud fastabiqul khairat antar seluruh penduduk dunia dalam arti sebenar-benarnya. Karena sebenarnya yang mengerikan bukan Globalisasi itu sendiri, namun bagaimana kita bisa melewati proses transisi ke memasuki Globalisasi. Karena seperti ketakutan para penentang Globalisasi, bila kalah maka siaplah menjadi budak-budak baru di era Globalisasi, inilah yang disebut sebagai neo-imperialisme. Walaupun bila berhasil melewati transisi dengan sukses tidak berarti akan menjadi penguasa tunggal Globalisasi itu sendiri, namun akan terus bersaing dengan para pemain lain yang berhasil melewati masa transisi ini.

### **Globalisasi dan Realitas Ummat Islam Saat Ini**

Seperti kebanyakan ummat Islam di dunia dan juga di Indonesia, kesadaran akan datangnya jaman baru yang di kenal dengan Globalisasi ini masih sangat kurang. Hal ini terjadi karena adanya lemahnya pengetahuan dan akselerasi pemikiran mayoritas ummat Islam, minimnya kompetensi dan keterbatasan akses ummat terhadap perangkat-perangkat Globalisasi, Serta masih banyaknya ummat Islam yang masih hidup dalam alam 'manusia kalah' yang tidak berhasil melewati transisi dari zaman pra modern ke jaman modern. Sehingga Globalisasi difahami hanya sebatas 'hantu' di siang hari yang sulit mereka fahami bentuknya karena selalu datang dalam wujud abstrak seperti di dalam khutbah para khatib muda, dan tulisan-tulisan kolom para ahli di surat kabar.

Tidak heran bila muncul plesetan dari para mubaligh ummat yang frustrasi dengan munculnya kosa kata ‘Gombalisasi’.

Hal yang sangat strategis adalah Muhammadiyah perlu sekali mencoba menerjemahkan gejala baru ini dalam bahasa ‘ummatnya’, tentunya tetap dalam paradigma Islam yang selalu positif memandang perubahan. Sehingga proses pembangunan kearifan global ‘ummatnya’ itu dengan tetap bersandar pada etika Islam bisa dilakukan. Upaya strategis yang lain adalah mendorong meningkatnya upgrading kompetensi warga dan obyek dakwahnya serta pengenalan kepada warga dan obyek dakwahnya tentang perangkat-perangkat jaman baru yang lebih mengedepankan modal intelektual dan penggunaan teknologi informasi. Dengan demikian pembacaan peluang yang terumuskan dalam pernyataan tentang sisi positif Globalisasi di atas bisa menjadi kenyataan atau bahkan lebih dari sekedar itu.

Mungkin bila semua hal diatas bisa berjalan efektif, tidak mustahil pengulangan sejarah sukses perkenalan Islam dengan peradaban Yunani, Persia, India, Cina yang kemudian menjadi fondasi bentuk peradaban ‘Orang Islam’ di abad pertengahan yang lalu bisa terjadi lagi. Tentunya dengan tafsir baru yang berlaku di era Globalisasi yang menjadikan seluruh bumi, hingga ‘pojokan-pojokan’-nya, sebagai surganya seluruh ummat manusia.

### **Globalisasi dan Kesadaran Peradaban Ummat Islam**

Merujuk dari pemetaan fase peradaban Alvin Tofler dengan tiga fase peradaban : Peradaban Agraris, Peradaban Industri dan Peradaban Informasi, dalam kenyataannya sebagian besar ummat Islam, termasuk yang berada di Indonesia baru saja memasuki peradaban Industri, bahkan masih banyak yang masih hidup dalam alam kesadaran agraris. Dengan demikian, akan menjadi persoalan besar bagi Muhammadiyah dalam melakukan advokasi terhadap peluang Indonesia yang disinyalir di dalam Zhawāhir al-Afkār akan menjadi lahan paling subur dan tempat pembuangan limbah yang sangat mudah dari globalisasi dan pasar bebas yang berwatak neo-liberal.

Dengan keinginan Muhammadiyah untuk terus aktif memainkan peran kerisalahannya agar umat manusia sedunia tidak terseret pada kehancuran oleh keganasan globalisasi dan neo-liberal, sepertinya membutuhkan kerja yang super keras. Pekerjaan super keras itu bahkan bisa terjadi ketika menghadapi anggotanya sendiri yang sebagian besar adalah pribadi-pribadi yang mapan dan nyaman dengan bentuk peradaban industri ‘cerobong asap’ dalam status buruh baik ‘buruh negara’ (PNS), maupun buruh industri. Belum lagi persoalan ketika menghadapi sebagian warga dan obyek dakwahnya yang dimungkinkan masih banyak yang berpola pikir agraris dan juga feodal.

Menurut Alvin dan Heidy Tofler, bentuk The Clash of Civilitation itu sejatinya bisa terjadi bukan dalam bentuk peperangan antara barat dan Islam (serta

Cina) seperti gambaran Huntington, namun dalam bentuk peperangan antara generasi berkesadaran baru melawan generasi dengan kesadaran lama. Pertentangan itu terjadi karena sifat dasar manusia yang merasa terancam ketika ada arus baru timbul, sehingga sentimen-sentimen gengsi dan sombong akan mengubur kebijaksanaan dan kearifan di dalam dialog antar dua kesadaran tersebut.

Bila potensi konflik ini tidak bisa dikelola dengan baik, bisa-bisa didalam tubuh Muhammadiyah sendiri akan terjadi pertarungan sengit antara dua wakil kesadaran peradaban di atas. Dimana generasi baru yang memiliki kesadaran global, bergerak lintas bangsa dan negara, memiliki relasi multikultural dan memiliki definisi kecepatan waktu dan kedetailan analisis yang jauh berbeda dengan generasi sebelumnya akan menghadapi perlawanan sengit, karena 'tidak nyambung', dengan generasi lama yang memang tidak pernah merasakan bentuk kehidupan baru tersebut dalam kenyataan hidupnya. Ini karena generasi baru ini memiliki akses terhadap artefak peradaban baru seperti referensi yang jauh lebih variatif (bahkan bisa dikatakan tidak terbatas), komputer dengan aplikasi yang semakin memanjakan penggunanya, internet dengan kecepatan tinggi, TV satelit, hingga teknologi pemetaan DNA serta berbagai perangkat yang membutuhkan keahlian spesifik lainnya dalam kapasitas expert. Sekali lagi bukan karena perbedaan aqidah atau keyakinan, namun hanya perbedaan pengalaman akan zaman yang ternyata sangat mempengaruhi perbedaan akan persepsi terhadap kenyataan baru. Para futurolog sering mengibaratkan sulitnya menjelaskan era baru ini kepada generasi berkesadaran lama seperti sulitnya menjelaskan wujud seekor gajah kepada lima orang buta yang memegang lima macam organ tubuh gajah.

Namun yang lebih berbahaya lagi bila ternyata pertentangan tersebut terjadi karena adanya fihak-fihak yang merasa terancam kekuasaan politik ekonominya akibat timbulnya arus baru. Mungkin kita bisa merujuk gambaran melalui penjelasan di Al Qur'an mengapa Fir'aun menolak risalah Musa, atau bangsawan Makkah menolak risalah Muhammad SAW, bukan karena mereka menolak kebenaran itu sendiri, selain karena kesombongannya juga karena mereka merasa terusik 'zona nyamannya' yang sebelumnya sudah mereka anggap sebagai sebuah puncak kenyamanan. Dialog antar dua kesadaran tidak terjadi, karena salah satu fihak terus menerus membuat 'noise' dalam proses dialog dalam bentuk kekerasan fisik, pemboikotan akses politik dan ekonomi, intimidasi, kecurigaan berlebih dan bahkan teror yang kesemuanya itu menandakan adanya sifat paranoid dan inferiority complex yang akut. Jangankan saling nasehat-menasehati dalam kebenaran, kesabaran saja sudah menjadi harga yang sangat mahal di dalam dialog ini.

### **Nasib Minoritas Kreatif Sebagai Kader Penerus di Era Baru**

Kesadaran secara normatif akan Globalisasi mungkin memang sudah didapatkan oleh Muhammadiyah, walaupun masih terbatas di tingkatan elitnya. Namun

yang kemudian perlu menjadi perhatian lebih adalah bagaimana menyiapkan kader-kader penerus yang mampu mengaplikasikan kesadaran baru itu dalam perjalanan selanjutnya, taruhlah seratus tahun ke depan dahulu. Hal ini harus menjadi perhatian karena saat ini tampaknya ada masalah yang cukup memprihatinkan di dalam hubungan antara generasi tua yang sebagian mungkin telah menyadari perubahan kondisi jaman ini dengan kader-kader mudanya yang mencoba berfikir dan membangun batu-bata peradaban selanjutnya dalam prespektif Muhammadiyah. Tentu saja ini terlepas dari kesalahan beberapa anak muda yang memang kurang santun dalam menyampaikan ide-ide pembaharuannya yang seharusnya dimaknai sebagai proses anak muda yang kadang juga ada yang masih 'Shock' dengan kenyataan baru yang tidak disadari generasi sebelumnya .

Seharusnya bila Muhammadiyah ingin tetap memiliki peran lebih dan tidak akan ikut hancur bersama hancurnya modernisme, Muhammadiyah harus menyadari pula tentang bagaimana memelihara minoritas kreatif (mujadid, pembaharu) yang menyiapkan diri untuk memasuki zaman baru nanti. Ini mencoba merujuk konsep Toynbee tentang kelahiran minoritas kreatif di tengah transisi peradaban.

Budaya runtuh karena kehilangan Fleksibilitas. Pada waktu struktur sosial dan pola perilaku telah menjadi kaku sedangkan masyarakat tidak lagi mampu menyesuaikan diri dengan situasi yang berubah, peradaban itu tidak akan mampu melanjutkan proses kreatif evolusi budayanya. Dia akan hancur dan secara berangsur mengalami disintegrasi.

Sementara peradaban-peradaban yang sedang berkembang menunjukkan keberagaman dan kepandaian yang tak pernah berhenti, peradaban-peradaban yang berada dalam proses disintegrasi menunjukkan keseragaman dan kurangnya daya temu. Hilangnya fleksibilitas dalam masyarakat yang mengalami disintegrasi ini disertai dengan hilangnya harmoni secara umum pada elemen-elemennya, yang mau tak mau mengarah pada meletusnya perpecahan dan kekacauan sosial.

Namun demikian, selama proses disintegrasi yang menyakitkan itu, kreativitas masyarakat -kemampuannya untuk menghadapi tantangan - tidak hilang sama sekali. Meskipun arus budaya telah menjadi beku dengan melekatkan diri pada pemikiran-pemikiran mapan dan pola-pola perilaku yang kaku, minoritas kreatif akan tetap muncul ke permukaan dan melanjutkan proses tantangan dan tanggapan itu. Lembaga-lembaga sosial yang dominan akan menolak menyerahkan peran-peran utama kepada kekuatan-kekuatan budaya baru ini, tetapi mereka mau tak mau akan tetap runtuh dan mengalami disintegrasi, dan kelompok minoritas kreatif itu mungkin akan mampu mentransformasikan beberapa elemen lama menjadi konfigurasi baru. Proses evolusi budaya ini akan terus berlanjut, tetapi berada dalam kondisi-kondisi baru dan dengan tokoh-tokoh baru pula. (dari Titik Balik Peradaban, Fritjof Capra, 1981).

Adalah sebuah prestasi yang membanggakan bila Muhammadiyah ternyata bisa survive bahkan berperan aktif dalam bentuk peradaban baru yang akan datang. Bahkan bila ini terjadi, Muhammadiyah akan membuktikan lebih cerdas dibanding bentuk masyarakat Islam pasca abad pertengahan yang terbukti tidak berhasil mempertahankan diri ketika arus peradaban dunia berubah karena ternyata tidak bisa melahirkan minoritas kreatif yang mampu survive dan bersaing dengan minoritas kreatif dari komunitas lain, dalam hal ini barat.

Mungkin saja sebagian kalangan di Muhammadiyah masih hidup didalam alam mitos tentang kelahiran para Mujadid ini layaknya keyakinan tentang datangnya Ratu Adil atau Satria Piningit di dalam kepercayaan jawa tradisional-agraris-pra modern, sehingga hingga saat ini masih banyak kalangan di Muhammadiyah yang tidak memiliki perhatian mendalam tentang proses perkaderan para mujadid tadi. 'Pembaharu yang dijanjikan' yang akan menjadi nahkoda Muhammadiyah di kemudian hari itu hanya di tunggu, bukan diusahakan. Hal ini terbukti dengan rendahnya kualitas perkaderan hasil dari Angkatan Muda Muhammadiyah, terutama yang mampu mengantisipasi perubahan zaman. Yaitu lahirnya kader-kader yang memiliki kesadaran akan jaman baru, mampu berperan dalam proses evolusi kreatif untuk mengkonstruksi kebudayaan baru, memiliki kompetensi yang memungkinkan mengakses artefak-artefak zaman baru, dan sekaligus bisa memaknainya dan menginjeksi nilai-nilai yang diyakininya, disamping kompetensi normatif seperti kedalaman pengetahuan tentang Islam dalam arti luas dan sempit.

Yang sangat tidak kita harapkan adalah bila banyak 'Kalangan Mapan' di Muhammadiyah, sadar atau tidak, sedang berada dalam posisi yang digambarkan Toynbee sebagai bagian dari "Lembaga-lembaga sosial yang dominan akan menolak menyerahkan peran-peran utama kepada kekuatan-kekuatan budaya baru ini.." karena bila benar begitu akan berlaku asumsi Toynbee selanjutnya "...mereka mau tak mau akan tetap runtuh dan mengalami disintegrasi, dan kelompok minoritas kreatif itu mungkin akan mampu mentransformasikan beberapa elemen lama menjadi konfigurasi baru.." Akan sangat menyedihkan bukan bila kelompok minoritas kreatif di dalam rumusan Toynbee di atas adalah berasal dari golongan lain di luar Muhammadiyah. Pendek kata bila asumsi Toynbee di atas benar, Muhammadiyah berarti cepat atau lambat juga akan mengalami keruntuhan dan mengalami disintegrasi.

Gambaran kemungkinan 'keruntuhan' Muhammadiyah di atas, walaupun tidak bisa diartikan sebagai keruntuhan Islam walaupun berarti keruntuhan sebuah aset ummat Islam yang besar , secara logis akan sangat mungkin terhindar bila Muhammadiyah konsisten dengan kalimat terakhir dari point ketiga komitmen Muhammadiyah di dalam naskah Zhawāhir al-Afkār yang berbunyi "Karena itu Muhammadiyah akan melaksanakan tajdid (pembaruan) dalam gerakannya sehingga di era kehidupan modern abad ke-21 yang kompleks ini, sesuai dengan Keyakinan dan Kepribadiannya, dapat tampil sebagai pilar kekuatan gerakan pencerahan peradaban di berbagai lingkungan kehidupan " . Tentu saja wujud

konsistensi itu ketika Muhammadiyah mampu menerjemahkannya dalam gerakan riilnya, khususnya dalam memformat kelahiran mujadid-mujadid yang akan hidup di jaman baru nanti.

Sayang bila lahirnya dokumen sejarah yang (seharusnya) fenomenal ini harus tenggelam oleh hiruk pikuk pemilihan Pimpinan Pusat Muhammadiyah dan kontroversi pertarungan kekanak-kanakan para pemikir golongan 'tua' dan 'muda' Muhammadiyah di Muktamar lalu. Dengan lahirnya Zhawāhir al-Afkār al-Muhammadiyah 'Abra Qarn min al-Zamān, saat ini warga Muhammadiyah sudah seharusnya berbangga bahwa mereka sudah memiliki pijakan normatif untuk menyongsong era baru yang akan datang sehingga salah satu tafsir bentuk masyarakat utama yang tercantum di dalam naskah Zhawāhir al-Afkār berupa masyarakat yang : bercorak "madaniyah" , senantiasa menjadi masyarakat yang serba unggul atau utama (khaira ummah) dibandingkan dengan masyarakat lainnya (dalam keunggulan) kemampuan penguasaan atas nilai-nilai dasar dan kemajuan dalam kebudayaan dan peradaban umat manusia, yaitu nilai-nilai ruhani (spiritualitas), nilai-nilai pengetahuan (ilmu pengetahuan dan teknologi), nilai-nilai materi (ekonomi), nilai-nilai kekuasaan (politik), nilai-nilai keindahan (kesenian), nilai-nilai normatif berperilaku (hukum), dan nilai-nilai kemasyarakatan (budaya) yang lebih berkualitas" bisa terealisasikan.

Insya Allah Muhammadiyah akan mampu meneladani konsep berfikir para generasi shalaf yang percaya diri karena ke-Islaman, ke-imaan, dan ke-ihsanannya menghadapi segala bentuk perubahan dan segala macam peradaban dengan fikiran sikap positif. Terbukti mereka mampu menjinakkan produk-produk peradaban lain dari Cina, India, Persia, Yunani, Mesir dan mampu menjadikannya sebagai fondasi bentuk peradaban baru. Kita yang hidup di ujung peradaban lama dan di awal peradaban baru ini memang berada dalam kondisi krisis dan bahkan menjadi mengerikan. Namun ada baiknya kita belajar dari konsep 'krisis' dalam kearifan Cina yang menggunakan kata wei ji yang terdiri dari huruf-huruf yang berarti "bahaya" dan "kesempatan" yang bisa diartikan bahwa krisis muncul karena adanya proses transformasi. Hal ini selaras dengan konsep 'sesungguhnya setelah kesulitan itu ada kemudahan' di dalam Al Qur'an. Tantangan kongkritnya, mampukah kita menjinakkan Globalisasi ? Karena bila tidak maka kemungkinan kita akan terjebak dalam frustrasi berat dengan menghadapi Globalisasi dengan pikiran negatif seperti yang dialami saudara-saudara kita yang terpaksa memilih jalan teror untuk menghadapi perubahan. Tentunya ini bertentangan dengan substansi misi Islam yang ingin berkontribusi dalam bangunan peradaban (rahmatan lil alamin) yang tidak mungkin dibangun dengan teologi negatif seperti teror.

Mampukah kemudian PP Muhammadiyah dan jajaran pimpinannya hingga ranting bisa menerjemahkan idealisme Zhawāhir al-Afkār al-Muhammadiyah 'Abra Qarn min al-Zamān secara efektif menjadi pemahaman warga, dan obyek dakwahnya terutama dalam program-program praksis ? Ujian selama hampir

seratus tahun ini akan membuktikan bagaimana Muhammadiyah membuktikan bahwa mereka sudah lebih daripada dewasa. Wallahu 'Alam Bissawab.

**Ditulis di Yogyakarta, Februari 2006**

Mei 29 2008

Markus : Pembangunan Kesehatan Kita Terpengaruh  
Globalisasi



Arif Nur Kholis

Kamis, 29 Mei 2008



**Bandar Lampung-** Ketua PP Muhammadiyah Dr. Sudibyo Markus menyatakan bahwa dalam dunia global seperti ini kita harus tepat mengantisipasi dengan melihat gejalanya. Menurutnya dalam acara Stadium general Muktamar XIII [i IMM](#) di Bandar Lampung, Kamis (29/05/2008) hal ini dilakukan dalam kerangka kesadaran bahwa globalisasi bukanlah jalan tanpa ujung.\

Lebih lanjut menurut salah satu pendiri IMM itu, dalam tatanan global saat ini ibarat dalam sebuah pola tarikan sentrifugal dan sentrifugal, yaitu dimana kita berada dalam posisi yang tertarik dengan kepentingan global dan disisi lain ada kekuatan yang memusat dan selalu berusaha menarik kita. “Dengan memberdayakan kemampuan lokal kita, seperti dengan pemberdayaan ranting Muhammadiyah, maka kita bisa membangun kesetimbangan antara kita yang sebagai kekuatan yang selalu ditarik dan kekuatan penarik yang dominan menguasai globalisasi” demikian terangnya.

Dalam prespektif pembangunan kesehatan, Markus menyatakan bahwa seringkali pemerintah seperti tidak menyadari resiko yang akan terjadi di masa mendatang, seperti dengan terus menerus menambah hutang kepada negara maju. “Hal ini berbahaya dimasa mendatang, karena ketika saatnya membayar hutang nanti, anggaran kesehatan dan pendidikanlah yang paling mudah dipotong” ungkapnya. Kejadian tersebut terjadi karena perencanaan pembangunan kita dari Bapenas hingga perencanaan tingkat RT yang selalu berasumsi bahwa semua akan mampu kita lakukan. “Dimana kita tidak pernah berhitung kelemahan kita” ungkapnya.

### **Politik Sentralisasi**

Menurutnya kadang sejarah politik Indonesia juga membuat tatanan kesehatan masyarakat kita rusak, seperti sejak tahun 70-an dimana menurut beliau Indonesia bisa melakukan hal yang luar biasa dengan program Posyandunya dengan bersandar pada kuatnya kohesi sosial. Namun karena dalam pelaksanaannya berada dalam sistem politik

yang sentralistik, ketika keadaan politik sudah berubah rusaklah sistem tersebut akibat rusaknya kohesi sosial yang tadinya terbangun semu dalam sistem sentralistik.

Menurut sosok yang pernah aktif menggerakkan korps kesehatan IMM dimasa awal pendirian IMM ini, disini lain perlu terus dikritisi keadaan sekitar kita termasuk ketidakadilan internasional yang sering berkaitan dengan isu kesehatan dalam dunia global ini. Hal ini docontohkan dengan fenomena laboratorium NAMRU milik Amerika Serikat di Jakarta yang sarat dengan kepentingan Intelejen Amerika Serikat berkedak laboratorium kesehatan. Menurutnya bahkan Muhammadiyah pernah mendapat tekanan langsung dari atase politik kedutaan Amerika Serikat untuk Indonesia. Atase politik kedubes Amerika Serikat tersebut sempat memintanya agar menteri kesehatan Ibu Siti Fadhillah Supari yang kader Muhammadiyah untuk berhenti berbicara tentang Amerika. (arif)

## [Habib Chirzin's Weblog](#)

Blog On Peace, Human Rights and Human Responsibilities

### [Kearifan Muhammadiyah Menghadapi Globalisasi](#)

[leave a comment »](#)

#### **Kearifan Muhammadiyah Menghadapi Globalisasi**

Oleh

**M. Habib Chirzin**

**Komisioner, Komnas HAM**

#### **Pertanyaan Dasar Kesejagatan**

Dalam sebuah forum diskusi meja bundar Internasional, tentang Agama-agama Dunia dan Globalisasi, di Genting Highland Resort, yang dihadiri oleh tokoh-tokoh pemikir globalisasi peringkat dunia, seperti Richard Falk, Paul Knitter, Kinhide Mushakoji, Joseph Camillarie, Chandra Muzaffar dan sederet nama beken lainnya, Buya DR. Ahmad Syafii Maarif mengajukan pertanyaan yang sangat arief dan cerdas. Moralitas macam apakah yang dapat menyelamatkan dunia dari kehancuran bersama ?. Karena di tengah puncak perkembangan ilmu dan teknologi saat ini, penderitaan manusia akibat konflik, perang, kemiskinan absolute, kelaparan dan penyakit yang menimpa sebagian umat manusia; belum kunjung teratasi. Ketidakadilan social dan jurang kaya miskin semakin menganga. Bahkan kemampuan perusak manusia (*human*

*distruction*) juga mencapai puncaknya kecanggihannya. Lewat sistem dan struktur global yang dibungkus dengan kesejagatan. Penulis yang hadir sebagai anggota *International Advisory Panel* dari *International Movement for a Just World*, penyelenggara forum tersebut, sangat mengapresiasi pertanyaan Buya Syafii yang sangat strategis tersebut. Pertanyaan yang dilontarkan di forum tersebut sebenarnya mewakili keprihatinan segenap warga persyarikatan, umat Islam dan bahkan mewakili kemanusiaan.

Kesejagatan (globalisasi) telah menjadi narasi besar (*grand narrative*), zaman ini. Kesejagatan ini lebih dari sekedar tajuk ilmiah atau fenomena social yang mengemuka. Di atas itu semua, ia sangat dominan, sebagai diskursus politik dan ekonomi di dunia. Sebuah ideologi yang telah merubah dan merembes masuk ke dalam pemberitaan media, naskah kebijakan dan publikasi bisnis. (Don Kalb, 2000, David Held, 1999, John Gray 1988, 1998, Immanuel Wallerstein, 1980). Bahkan wacana kesejagatan ini telah dianggap sebagai cerita dominant dalam sebuah setting dari narasi besar yang muncul segera setelah posmodernisme, yang mengklaim telah berakhirnya semua narasi besar, beberapa dekade yang lalu. (Don Kalb, *the End of Globalization*, 2000).

Sebagaimana dikemukakan oleh Arjun Appadurai, bahwa kesejagatan ini bersifat sangat kompleks dan merupakan konsep yang berlapis-lapis dan fenomena social yang didukung oleh fakta geografis : bahwa manusia dan tempat-tempat di dunia ini telah menjadi semakin terhubungkan satu sama lain (*interconnected*) secara lebih luas, sebagai akibat dari meningkatnya aliran modal, barang dan jasa antar bangsa, informasi dan gagasan, teknologi serta manusia. (Arjun Appadurai, 1996). Pertanyaan yang muncul kemudian, apa hubungannya kesejagatan ini dengan proses homogenisasi budaya, dominasi ekonomi dan bahkan dengan kolonialisme baru ? . Dalam kenyataannya, sejak awal abad 21 telah terjadi pengambil alihan kekuasaan negara untuk melakukan regulasi oleh kekuatan korporasi-korporasi- transnasional (Samir Amin,2000, Martin Khor, 2002) .Apakah globalisasi ini membawa kesejahteraan, keadilan dan perdamaian di dunia ? . Karena sejak tahun 1990 dunia telah menambah penderitaan penduduk dunia dengan 250 perang antar negara dan konflik sipil baru yang mengakibatkan kematian 100 juta militer dan 100 juta rakyat sipil ( Majid Tehranian, 1999). Atau apakah sekelompok masyarakat dan bangsa memperoleh keuntungan lebih banyak dari yang lain, sehingga menimbulkan ketidakadilan dan eksploitasi ? Ketika 20 persen penduduk terkaya di dunia menerima 82 persen pendapatan dunia, sementara 20 persen paling miskin hanya mendapat 1,4 persen. (Majid Tehranian, opcit). Atau benarkah kesejagatan ini merupakan akhir dari dari sejarah (Fukuyama 1992), berakhirnya modernitas (*the End of Modernity*- Wilson dan Mowlana, 1990) atau proses McDonaldisasi budaya (Ritzer 1993).

### **Kebijakan Publik, Kekerasan dan Pornografi Sosial Budaya**

Pornografi yang tampil sangat vulgar, adegan kekerasan dan budaya instant yang ditayangkan di berbagai media, adalah bentuk dominasi budaya (*cultural domination*) dari globalisasi, yang secara tidak sadar telah merasuk ke dalam rumah tangga, bahkan kamar-kamar pribadi keluarga kita. Bahkan secara tidak sadar, masyarakat kita telah terlibat ataupun mendukung kebijakan publik yang mengembangkan kekerasan budaya, kekerasan sosial, kekerasan lingkungan ( lewat pembabatan hutan dan pembalakan liar) maupun kekerasan struktural dan ideologis. "Pornografi social" dan "pornografi ekonomi" yang berupa kemiskinan yang mencekik para petani, nelayan

dan masyarakat miskin perkotaan kita – yang sebagian besar adalah bagian dari umat-, penyakit lumpuh layu, kematian ibu yang melahirkan dan anak, busung lapar, ambruknya sekolah-sekolah dasar pada saat berlangsungnya proses belajar dan mengajar, mahalunya air bersih dll; adalah bentuk-bentuk pornografi baru yang meng-global. Realitas sosial yang memprihatinkan yang menimpa masyarakat kita di era reformasi ini seharusnya membuat bangsa dan para pengambil kebijakan ini malu. Semua bentuk “pornografi” tersebut, sebenarnya tidak dapat dilepaskan dari berbagai kebijakan public sebagai dampak langsung globalisasi.

Dalam konperensi dunia lembaga-lembaga swadaya masyarakat di Budapest, pada bulan Ramadhan yang lalu, Oktober 2004, penulis yang diundang sebagai pembicara dalam tajuk “Hak atas Perdamaian dan Penyembuhan Dunia”, mendapat pertanyaan dari seorang penasehat UNDP, DR. Zia Rizvi, sahabat karib DR. Soedjatmoko (alm) tentang hubungan antara *Peace, Human Rights and Human Security*. Penulis diuntungkan oleh karena dua tahun sebelumnya telah menerbitkan Jurnal tentang “*Human Security, Human Rights and Responsibilities*”. Sebenarnya konsep *human security* (keamanan manusia), yang sekarang telah diadopsi oleh PBB, lahir karena telah terjadinya diversifikasi ancaman di dunia, setelah berakhirnya masa Perang Dingin. Bentuk-bentuk ancaman terhadap bangsa-bangsa di dunia dan kemanusiaan di era globalisasi ini telah mengalami penganeka ragam : kejahatan internasional yang terorganisir, korupsi, kejahatan pencucian uang, perdagangan narkoba, cyber pornografi, perdagangan perempuan dan anak-anak, kerusakan lingkungan hidup, kemiskinan akut dsb. Untuk itu, national security yang konvensional, hendaknya dilengkapi dengan konsep ketahanan baru yang berpusat pada manusia (*Human Centered Security*). Inti dari keamanan manusia ini berupa : kebebasan manusia (*human freedom*), kesejahteraan manusia (*human wellbeing*) dan kelanjutan hidup manusia (*human survival*). Muhammadiyah yang sejak berdirinya telah melakukan penyelamatan social lewat lembaga PKO (Penolong Kesengsaraan Oemoem) dan berbagai amal usaha yang berpihak kepada kepentingan rakyat, sebenarnya merupakan sebuah kreatifitas yang sangat cerdas dari pendiri persyarikatan. Jalan Muhammadiyah adalah jalan penyelamatan kemanusiaan, sejarah dan peradaban dari ketakutan dan kelaparan ( *alladzi ath'amahum min juu'in wa amanahum min khouf* ).

## Globalisasi Hutang dan Pelucutan Kedaulatan Rakyat dan Negara

Salah satu dampak globalisasi yang langsung menjadi beban negara, masyarakat dan rakyat jelata adalah « globalisasi hutang » yang membuat semua warga negara dan bahkan bayi yang baru lahir berposisi sebagai « ghorim » ( orang yang berhutang). Hutang model ini bukan merupakan hutang individual ( *dain* ) yang diikat dengan etika dan hukum fiqih yang konvensional. Tetapi ini adalah hutang publik, hutang yang bersifat multilateral, yang mempunyai dampak yang sangat besar kepada kebijakan publik yang sangat berpengaruh kepada kehidupan rakyat maupun negara. Sejak tahun 1980-an berbagai lembaga studi bahkan lembaga keagamaan melakukan advokasi atas ‘rezim hutang internasional’ ini. Sebagai contoh, pada bulan September 1990, penulis pernah diminta menjadi panelis dalam diskusi tentang pembebasan dari rezim hutang ini di *Interfaith Center for Economic Justice*, di Washington DC, antara lain bersama DR. Leonora Briones, President “*International Anti Debt Coalition*” di the University of Philippines. Sudah saatnya Muhammadiyah mengembangkan kajian yang serius dan mendasar tentang fiqih hutang multi lateral ini yang mempunyai dampak yang sangat luas kepada kehidupan masyarakat dan Negara.

Kedaulatan pangan (*food sovereignty*) saat ini merupakan wilayah perjuangan para petani kita yang sudah sejak tahun 1970-an menderita karena kehilangan kedaulatannya dalam pemilikan tanah, pemilihan dan penanaman benih-benih padi, palawaija, buah dan sayur ; pupuk, pestisida serta input pertanian lainnya. Bahkan kedaulatan keanekaragaman pangan yang selama ini mereka pelihara, seperti : getuk lindri, semar mendem, kipo, yangko, wadai, empek-empek dan berbagai jenis makanan lokal lainnya, semakin terdesak oleh produk-produk asing. Dibungkus dengan kemasan yang indah dan iklan yang didanai besar-besaran, sebagai bagian dari dominasi selera masyarakat. Akibatnya monopoli 1000 perusahaan multi nasional telah menguasai asset lebih dari 80 persen nilai sumber daya, alat produksi dan modal dunia, termasuk menguasai 33 persen nilai penjualan pada setiap tahun. (Gelinis, 2003).

Ketidak mampuan atau kenggan Negara untuk melindungi (to protect), memenuhi (to fulfill) hak warga negaranya dan untuk mengatur kebijakan pubiknya di bidang pertanahan, sumber daya alam, termasuk sumber daya air yang menjadi kebutuhan pokok masyarakat; semakin lama semakin dilucuti oleh rezim liberalisasi yang berpihak kepada modal. Maka tidak heran, semakin banyak orang yang tidak mampu menyekolahkan anak, membayar pengobatan dan memperoleh akses ke air bersih. Sudah saatnya gerakan pemberdayaan masyarakat dengan semangat awal pendirian PKO (Penolong Kesengsaraan Oemoem) perlu diaktualkan dalam skala yang luas. Sebenarnya Gerakan Jamaah dan Dakwah Jamaah merupakan basis perjuangan untuk membangun kedaulatan masyarakat, baik di bidang sosial, budaya dan ideology. Termasuk kedaulatan pangan.

#### Muhammadiyah ASEAN

Klaim yang sangat arogan dari globalisasi ini adalah *TINA (There Is No Alternative*”, dari tatanan dunia dan model kemasyarakatan dan budaya, selain yang mereka bangun atas dasar kerakusan (*Greediness*) dan ketakaburan (*Arrogance*). Seolah-olah di dunia ini hanya ada satu pilihan nasib kemanusiaan dan sejarah peradaban. Dan seluruh penduduk dunia harus mengekor kepada kekuatan modal besar yang penuh bergelombang riba. Klaim TINA yang telah menyengsarakan banyak penduduk dunia, bukan saja di Asia, Afrika dan Amerika Latin, tetapi juga di Negara-negara maju di Eropa maupun Amerika sendiri, karena watak Hegemonik, Dominatif, Diskriminatif dan menciptakan ketidakadilan social dan penderitaan.

Untuk menghadapi arus globalisasi yang diikuti dengan liberalisasi dan kolonisasi ekonomi dan budaya ini kadang-kadang suatu Negara kebangsaan dan kawasannya tidak cukup memadai. Untuk itu, regionalisasi menjadi suatu cara pengaturan baru. Dalam kerangka ini, regionalisasi Muhammadiyah menjadi sebuah keharusan. Penulis yang sejak tahun 1980-an mengadvokasikan Muhammadiyah ASEAN, melihat kekurang sungguhan kita dalam mengelola kerjasama regional ini. Padahal Muhammadiyah ASEAN ini merupakan bagian dari masa depan Muhammadiyah. Terlebih-lebih dalam menghadapi globalisasi.

Salah satu kearifan budaya Muhammadiyah yang telah dibuktikannya sampai menjelang usianya yang satu abad ini adalah “daya survivalnya” yang membuatnya bukan hanya mampu bertahan, tetapi juga terus berkembang dan memberikan sumbangannya dalam kehidupan masyarakat luas. Muhammadiyah yang telah berdiri sebelum lahirnya Negara Republik Indonesia, telah menjadi “penyangga budaya” bagi keberadaan dan kelangsungan bangsa dan Negara. Terutama pada bangsa Indonesia berada dalam kondisi yang kritis. Semisal pada masa krisis moneter yang disusul dengan proses reformasi. Daya survival yang merupakan keunggulan Muhammadiyah ini, oleh karena hadir sebagai sebuah persyarikatan yang merupakan “*new social movement*”, gerakan social yang sekarang tengah menjadi model baru gerakan sosial di dunia. Muhammadiyah harus dapat membuktikan bahwa berbagai alternative nilai dan tatanan dunia yang lebih adil dan sejahtera adalah sangat mungkin : “*many worlds are possible*”. Lembaga-lembaga keagamaan dan juga gerakan-gerakan social baru itu sekarang sedang menghadapi tantangan dan panggilan sejarah yang baru, berupa penyelamatan kemanusiaan di era kesejagatan ini.

Kembali kepada pertanyaan cerdas dan arif dari Buya Syafii Maarif tadi, sebenarnya kalau dikaji secara mendalam, sebenarnya Muhamadiyah telah menanam dan menyebarkan benih-benih kearifan social dan kearifan budaya yang mendasar untuk menghadapi dominasi budaya akibat globalisasi. Muhammadiyah juga menyediakan suatu kearifan pribumi yang menyelamatkan dan mengembangkan genius local, seperti yang dipersonifikasikan oleh K H Ahmad Dahlan, K H Mas Mansyur, Buya AR Sutan Mansur, Buya HAMKA, Pak AR Fachruddin, Pak Amien Rais, Buya Syafii Maarif dan tokoh-tokoh masyarakat di tingkat ranting maupun anggota dakwah jamaah yang bekerja keras lewat persyarikatan. Masihkah Muhammadiyah menyimpan kearifan tersebut dan mengembangkannya untuk menyelamatkan kemanusiaan dan keadabannya (civility). *Wallahu a'lamu bisshawab.*

(Pegangsaan, 29 Mei 2005).

## **Globalisasi, Neoliberalisme dan the *New Sosial Movement* : *Pengalaman Muhammadiyah***

Zuly Qodir

Abstrak

Misi neoliberalisme dan globalisasi pada kenyataannya tidak hanya berpengaruh pada kehidupan ekonomi dan politik, tapi juga kehidupan sosial masyarakat. Tatanan sosial, budaya, beserta institusi norma, secara langsung dan tak langsung juga tak lepas dari pengaruh dua arus besar ini. Pada titik inilah, gerakan sosial baru diperlukan sebagai gerakan alternatif. Dalam konteks inilah, hanya ada dua pilihan bagi asosiasosiasi sosial: mengikuti arus, atau menjadi lokomotif gerakan alternatif.

Problem ini juga yang dihadapi oleh Muhammadiyah. Sebagai organisasi *civil society* yang besar di Indonesia, Muhammadiyah diharapkan dapat menjadi penyeimbang negara dan pasar yang menjadi kepanjangan tangan neoliberalisme dan globalisme. Namun, harapan agar Muhammadiyah menjadi energi bagi *the New Social Movement* ternyata juga terbentur pada persoalan kesulitan menentukan pilihan. Konsistensi atas nilai-nilai, dibarengi dengan peningkatan kapabilitas sumber daya, menjadi kunci, apakah Muhammadiyah akan berhasil menjadi sumber Gerakan Sosial Baru (GSB) atau tidak.

### **A. Pendahuluan**

Dalam tulisan ini saya akan mengantarkan pada tiga tema pokok dan kemudian

pembahasan saya bawa pada pengalaman Muhammadiyah dalam menghadapi gempuran dua kekuatan besar dunia sekarang yakni globalisasi, dan ikutannya, Neo-liberalisme.

Sementara *the New Sosial Movement* ingin saya tempatkan sebagai salah satu contoh yang mungkin dilakukan oleh masyarakat sipil yang mandiri, untuk menghadapi gempuran global yang menjangkiti hampir semua level kehidupan umat manusia termasuk level keagamaan dan ormas keislaman, termasuk Muhammadiyah.

Tentu saja bahasan dalam tulisan ini serba sedikit dan hanya pengantar umum untuk kita masuk pada diskusi yang lebih luas dan serius dalam perbincangan yang Zully Qodir adalah Pengajar di Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Jurnal Mandatory Edisi 4/Tahun 4/2008

© Institute for Research and Empowerment (IRE) Yogyakarta 2008, Dusun Tegalrejo RT 04/RW 09, Desa Sariharjo, Kec. Ngaglik, Jl. Palagan Tentara Pelajar Km. 9,5 Sleman, Yogyakarta 55281.

© Institute for Research and Empowerment (IRE) Yogyakarta 2008

54 Zuly Qodir

akan kita jalani bersama. Tiga hal yang akan saya kemukakan dalam tulisan ini: globalisasi, neoliberalisme, dan *the New Sosial Movement*.

Tiga masalah ini merupakan masalah pokok yang sangat kompleks dan sesungguhnya berat dibahas dalam satu artikel. Namun begitu saya berharap kita bersama dapat mendiskusikannya secara seksama sehingga dapat berbuat sekalipun hanya pada radius 100 meter. Sebab, perubahan dan transformasi sesungguhnya hanya akan mungkin ketika kita memegang kendali, apakah kendali kekuasaan, keuangan, atau kendali hukum. Tanpa tiga kekuatan kendali yang kita miliki, tidak akan banyak yang bisa kita lakukan meskipun, sekali lagi, sesungguhnya kita hanya berada dalam radius 100 meter, untuk berbuat baik dan berbuat jahat.

Muhammadiyah menjadi bahasan dalam tulisan ini karena sampai saat ini, dua ormas Islam di Indonesia yang paling penting selain NU adalah Muhammadiyah yang menjadi basis dari gerakan *Civil Islam*, basis munculnya gerakan kultural yang diharapkan akan mampu menjadi jembatan atas kebangkitan gerakan Islam politik dan radikalisme Islam di Indonesia. Posisi Muhammadiyah dalam karakteristik Islam Indonesia karena itu menjadi bagian yang tidak mungkin untuk dipisahkan dengan gerakan masyarakat sipil yang berkehendak melakukan gerakan sosial. Namun menjadi problem yang serius tatkala Muhammadiyah belakangan tampak terlihat bukan hanya terseret dalam “tarian” globalisasi dan neoliberalisme, tetapi dengan agak malu-malu menjadi bagian dari dua arus besar ini. Muhammadiyah seakan-akan dipaksa untuk menerima dan menjadi pijakan teologi kelompok pendukung globalisasi dan neo-liberalisme dengan menerima demikian banyak proyek yang sebagian berkolaborasi dengan gerakan neoliberalisme pasar yang semakin menemukan pasarnya di Indonesia, selain di dunia Negara-negara Selatan sebagai negara miskin.

Muhammadiyah saya bahas dengan perspektif reflektif, sehingga saya berharap akan dapat menjadi bagian dari refleksi masyarakat sipil secara keseluruhan yang menghadapi dua kekuatan besar dunia. Sebab, kita akan sangat kesulitan jika harus membahas gerakan sipil tetapi tidak meminjam salah satu atau beberapa kasus yang akan menjadi bahan rujukan bersama. Muhammadiyah dengan begitu akan dapat menjadi rujukan masyarakat sipil lainnya, jika nanti kita membahas gerakan sipil dalam koridor gerakan sosial baru (*the New Sosial Movement*) di Indonesia, yang secara keseluruhan bisa dikatakan hampir sempurna dalam menerima kampanye kaum globalis dan neoliberalis yang dibungkus dalam slogan semangat *welfare state* dan demokratisasi politik serta ekonomi.

## **B. Globalisasi**

Tidak terlalu mudah untuk mempersoalkan istilah globalisasi dalam bidang ekonomi

© Institute for Research and Empowerment (IRE) Yogyakarta 2008

### **PENGALAMAN MUHAMMADIYAH 55**

dan politik, sebab hal itu terkait dengan kondisi global (mendunia), sehingga ada persoalan serius yang harus dibahas dalam kaitannya dengan kerja yang efisien dan persaingan bebas sebagai isu dalam kapitalisme. Biasanya hal seperti ini agak terlupakan dalam diskusi globalisasi politik dunia. Namun anehnya, begitu isu globalisasi ekonomi didaratkan, yang terjadi adalah perubahan-perubahan dalam

kebijakan politik sebuah negara.

Dalam hal persaingan lapangan kerja misalnya, gagasan dari globalisasi untuk mengakomodir tenaga kerja terampil dan efisien yang janjinya akan dibayar mahal dan penuh, ternyata dalam prakteknya tidak demikian. Pekerja terampil dan efisien ternyata dibayar secara tidak penuh, tetapi seperti kehendak para majikan. Buruh tetap statusnya sebagai buruh, yang harus bersedia diperlakukan apa saja oleh majikannya yang hadir sebagai “kolonialis” bagi pekerja. Inilah janji globalisasi ekonomi yang tidak pernah ditepati untuk mengakomodir tenaga kerja dengan sesungguhnya, sehingga membayarkan upah secara penuh dan manusiawi pada para buruh yang bekerja penuh waktu (Tabb, 2003:31).

Bila kita mundur ke belakang sejenak, perdebatan tentang globalisasi sebenarnya dimulai dari perkembangan dunia yang mengarah pada adanya kolonialisme fisik. Dengan kolonialisme ini, beberapa negara kaya dan besar berusaha memperoleh bahan baku mentah dari negara-negara di dunia ketiga yang memiliki sumber daya yang melimpah, namun belakangan dimiskinkan, seperti Indonesia di kawasan Asia Tenggara, negara-negara di kawasan Afrika, Skandinavia, dan Balkan sejak 50-60 tahun yang lalu. Sebagian dari negara-negara yang terjajah secara fisik kini telah memerdekakan diri dari cengkeraman kolonialis seperti Uni Soviet (telah mulai ambruk sejak era Gorbachev dengan glasnost dan perestroika-nya, sehingga muncullah negara-negara di kawasan Balkan seperti Kroasia, Yugoslavia, Slovenia, Ukraina, Bosnia, dan seterusnya).

Imperialisme fisik juga mulai runtuh ditandai dengan bubarnya negara komunis seperti Cekoslovakia, Polandia, dan beberapa negara di Eropa Timur. Tanda keruntuhan komunisme yang lain adalah bersatunya kembali negara Jerman pada tahun 1992, sehingga tidak ada lagi pemisahan Jerman Barat dan Timur. Berakhirnya penjajahan fisik oleh beberapa kekuatan negara di dunia atas beberapa negara lain menjadi tanda berakhirnya kolonialisme pada fase yang pertama. Fase berikutnya, kolonialisme muncul dengan bentuk yang lain.

Fase lanjutan tersebut, atau fase kedua adalah fase neo-kolonialisme, ditandai dengan penjajahan dunia dengan teori dan ideologi. Fase ini yang kemudian dikenal dalam khazanah ilmu-ilmu sosial sebagai fase *developmentalisme* atau fase *pembangunanisme*. Pada fase ini negara-negara penjajah memang tidak lagi

© Institute for Research and Empowerment (IRE) Yogyakarta 2008

#### 56 Zuly Qodir

melakukan penjajahan dalam arti fisik, namun penjajahan teori dan ideologi berjalan dengan sempurna. Sangat kentara bagaimana kontrol atas kebijakan sebuah negara yang baru saja merdeka sebagai bekas negara jajahan oleh negara penjajah. Bantuan-bantuan yang diberikan melalui lembaga-lembaga donor atau lembaga mantan penjajah berjalan dengan serius: IGGI (CGI) yang dikomandoi pemerintah kerajaan Belanda, bantuan beasiswa melalui *The Ford Foundation* untuk mahasiswa Indonesia tahun 1950-1960-an seperti Widjojonitisastro, Ali Wardana, M. Sadli, Emil Salim dan tokoh-tokoh lainnya. Kelahiran tokoh-tokoh ini, berikut dengan pemikiran ekonomi mereka yang banyak mempengaruhi kebijakan negara pada era 1980-an, memunculkan apa yang sangat dikenal dengan Mafia Berkeley –karena kebanyakan dari mereka adalah lulusan University of California, Berkeley, Amerika Serikat (baca Malarangeng, 2002 dan 2004).

Penjajahan ideologi oleh Negara-negara Utara kepada Negara-negara Selatan terus berkembang hingga cara pandang dan pengetahuan pun menjadi bagian yang tidak lepas dari unsur penjajahan negara-negara dominan ketika itu. Pengetahuan diproduksi atas jasa para penjajah ideologi kebijakan ekonomi yang menekankan pertumbuhan. Istilah “Ekonomi sebagai Panglima” adalah hasil paling nyata dari penjajahan ekonomi yang didasarkan pada adanya perspektif pertumbuhan Rostorian dan Keynesian.

Belum berakhir penjajahan secara ideologi, tahapan berikut telah dipersiapkan dengan seksama, yakni periode yang sekarang dikenal dengan periode globalisasi. Fase ini di mulai awal abad 21, ditandai sistem liberalisasi ekonomi dunia dalam segala bidang yang dipaksakan melalui kebijakan penyesuaian struktural oleh lembaga-lembaga donor internasional seperti IMF dan World Bank yang direstui oleh rezim GATT (*General Agreement on Tariff and Trade*) dan WTO. Sejak saat itulah, era baru dunia mulai bergulir yang kemudian dikenal sekarang dengan

sebutan era globalisasi.

Era globalisasi adalah sebuah era di mana proses integrasi dalam bidang ekonomi demikian jelas sehingga sistem ekonomi nasional harus mengintegrasikan diri dengan sistem ekonomi global berdasarkan keyakinan pada perdagangan bebas yang telah dicanangkan pada era sebelumnya, baik era kolonialisme maupun neo-kolonialisme. Dengan masuknya era global seperti itu, yang terjadi kemudian adalah adanya dominasi global atas Negara-negara Selatan (khususnya) seperti Indonesia pada sistem ekonomi, politik, dan budaya. Negara-negara Utara sebagai Negara pemberi utang. Ideologi TNCs (Trans National Corporations) adalah buah paling mutakhir dari sistem global ekonomi dunia, sehingga pasar bebas menjadi ideologi tunggalnya.

Bahkan, dalam perkembangan lanjutannya, apa yang disebut dengan IMF,

© Institute for Research and Empowerment (IRE) Yogyakarta 2008

#### PENGALAMAN mUHAMMADIYAH 57

World Bank, dan WTO ibarat agama baru yang layak untuk disembah, sekalipun merupakan tiga mahluk yang maha tidak suci (*Un-Holly Trinity*) dengan ritualnya berbelanja di mall-mall dan memperbesar (sekurang-kurangnya memperbarui hutang pada setiap semester oleh negeri-negeri penghutang seperti Indonesia). Inilah masa di mana penjajahan ideologi kapitalis dunia kian sempurna di bawah ancaman perdagangan bebas yang mengutamakan adanya persaingan bebas di muka bumi. Hanya sayang, janjinya untuk menyejahterakan rakyat banyak tidak terbukti sama sekali. Yang riil terjadi, penduduk miskin bertambah miskin, sementara yang kaya semakin kaya raya (baca, Tabb, 2003; Fakhri, 2001).

#### C. Perspektif tentang Globalisasi

Sekurang-kurangnya ada empat perspektif (paradigma tentang globalisasi) yang sedang kita bicarakan.

*Pertama*, Wallestian (Immanuel Wallerstein) yang membicarakan tentang globalisasi dalam perspektif ilmu sosial Marxian. Ada perbedaan yang tegas antara perspektif ekonomi kapitalis versus ekonomi sosialis, sebagai sebuah sistem ekonomi dunia yang berpengaruh. Dua sistem ekonomi ini berada dalam kontradiksi yang berkepanjangan sehingga janji menyejahterakan masyarakat tidak pernah terjadi, bahkan yang terjadi adalah kesenjangan antara mereka yang bermodal besar dengan mereka yang tidak memiliki modal. Struktur ekonomi yang mendominasi adalah kekuatan pemilik modal dengan semena-mena dan mendominasi kelas ekonomi lapisan bawah. Yang terjadi sesungguhnya adalah adanya ekspansi negara-negara pemilik modal atas negara yang memungkinkan untuk "dijajah" secara non fisik. Perbedaan kelas sosial ekonomi menjadi ukuran dalam dunia global (Beyer, 1994: 7).

Teori sistem dunia ala Wallerstein merupakan pendekatan dari perspektif Marxian yang memperhatikan sistem dunia dengan ekonomi dan konteks material. Dunia akan banyak dipengaruhi oleh sistem ekonomi kapitalis-sosialis yang terus bergerak tanpa malu-malu, sehingga untuk membebaskan dunia yang dominasinya dibawah kaum kapitalis haruslah didekati dengan perspektif Marxian.

Mengikuti Wallerstein, maka sistem sosial dunia itu sebenarnya berada dalam pembagian kerja dalam berbagai sektor yang antara satu dengan lainnya saling tergantung dengan persoalan ekonomi, dimana perubahan antara satu dengan lainnya akan terjadi secara perlahan dan terus-menerus sebagaimana kebutuhan akan ketuhanan (Beyer, 1994: 15).

Ada tiga sistem sosial yang harus dicermati dalam perspektif Marxian: perspektif mini sistem, penjajah dunia, dan ekonomi dunia. Sistem sosial yang mini menggambarkan kehidupan agrikultural yang memimpikan adanya dunia

© Institute for Research and Empowerment (IRE) Yogyakarta 2008

#### 58 Zuly Qodir

sejahtera dan kebersamaan. Tetapi yang terjadi adalah sistem agrikultural tidak akan pernah bertahan akibat penjajahan sistem oleh dunia dan ekonomi global. Sementara penjajah-penjajah dunia memiliki banyak sistem kultur yang didasarkan pada sistem politik dan pembagian kerja. Sedangkan sistem ekonomi dunia menekankan adanya korporasi yang multiwajah dalam politik dan kultur dalam sebuah pembagian kerja yang tunggal yang didedikasikan pada sistem ekonomi dunia yang menindas.

Argumen kunci dari perspektif Wallerstein tentang globalisasi adalah adanya apa yang disebut dunia inti, semi pinggiran dan pinggiran secara ekonomi dan politik. Tetapi, apa yang hendak dikatakan Wallerstein sesungguhnya secara singkat adalah, bahwa globalisasi dunia yang tengah terjadi di bidang ekonomi dan politik sejatinya dikuasai oleh Negara-negara kapitalis dan didukung oleh sistem ekonomi kapitalis.

*Kedua*, perspektif yang dikemukakan oleh John Meyer, yang menyatakan bahwa melihat globalisasi dunia harus didekatkan dengan sistem perpolitikan (kondisi politik dunia) yang tidak bisa dilepaskan dari persoalan ekonomi dunia. Ekonomi dunia sangat terpengaruh oleh sistem global dari *nation state* (negara bangsa) yang beroperasi secara sistematis dalam merubah sistem perpolitikan dan perekonomian dunia. Perspektif ekonomi dalam era globalisasi adalah sama persis dengan sistem ekonomi yang mendukung adanya konsumsi, komodifikasi ekonomi, sistem produksi dan ekonomi pasar untuk menjadi sandarannya.

Pengendalian ekonomi dunia adalah pasar yang tidak bisa diregulasi secara pasti sebab hanya negara-negara pemilik otoritas semata yang mampu bermain dengan sempurna, sehingga kebijakan negara-negara pemilik modal akan sangat tinggi otoritasnya. Di situlah, produksi dan distribusi menjadi bagian dari proses ekonomi yang mengarah pada pengelolaan pasar.

Dunia akan dikendalikan oleh sistem perpolitikan yang didominasi oleh sistem ekonomi dan politik yang menjadikan komoditas sebagai dasarnya. Oleh sebab itu, Meyer kemudian menyatakan bahwa sistem politik dunia yang didekati secara Marxian dalam perspektif Wallerstein sejatinya perlu dikoreksi. Alasannya, karena sistem ekonomi dunia yang sekarang ada merupakan kelanjutan dari sistem kapitalis, dengan pijakan sistem produksi dan sistem perpolitikan dunia maya. Untuk itu, dibutuhkan kerangka yang lebih independen tentang sistem ekonomi dan politik dunia yang mengarah pada negara bangsa (Beyer, 1994: 24-25)

*Ketiga*, perspektif individu versus masyarakat ala Roland Robertson. Bagi Robertson, sebenarnya antara individu dan masyarakat dalam sebuah dunia modern seperti sekarang terjadi ketegangan, sehingga antara keduanya memunculkan apa yang sering disebut sebagai keinginan primordial (lokalitas) melawan globalisme

© Institute for Research and Empowerment (IRE) Yogyakarta 2008

#### PENGALAMAN mUHAMMADIYAH 59

yang diwakili oleh sistem dunia modern (masyarakat). Namun demikian, meski garis batas keduanya dapat dilihat secara kentara, pada dasarnya, terdapat keterhubungan yang sifatnya fungsional. Meski batas-batas kultur telah tergerus (*relative*), tetap ada proses institusionalisasi norma pada masing-masing individu oleh sistem nilai dunia (masyarakat) sehingga individu terpaksa mengikuti sistem nilai masyarakat luas.

Dengan demikian, bagi Robertson, sistem dunia sebenarnya merupakan proses menyatunya kebudayaan dunia, antara individu dan masyarakat, sehingga menyebabkan relativitas budaya antara individu dan masyarakat. Dari sinilah kemudian dapat dikatakan bahwa di dunia ini sebenarnya nyaris tidak ada lagi sistem budaya yang tunggal sebab antara budaya yang satu dengan lainnya tidak bisa saling independen, tetapi sebaliknya, saling tergantung dan mempengaruhi secara terus menerus sehingga membentuk sebuah *nation state*.

Secara singkat, dapat dikatakan bahwa globalisasi dunia itu akan membawa dampak pada terjadinya sistem kebudayaan yang menyatu. Tidak ada lagi pembatasan yang tegas antara kebudayaan sebuah daerah (negara) dengan daerah (negara) lainnya, sebab yang terjadi adalah peredaran budaya dari tempat yang satu ke tempat lainnya. Memang di sana memungkinkan adanya penguatan identitas primordial, tetapi identitas primordial hanya menjadi penanda adanya kerancuan budaya global yang hendak diterapkan pada setiap negara dan individu dalam masyarakat.

*Keempat*, perspektif Niklas Luhmann, yang menyatakan bahwa globalisasi dunia terjadi karena terjadinya sistem komunikasi antara masyarakat yang semakin efektif dan efisien, sehingga tidak mungkin terjadi di dunia ini antara masyarakat tidak terjadi saling tukar menukar informasi. Bahkan, komunikasi inilah yang menyebabkan dunia ini terasa semakin sempit (Beyer, 2001:33)

Menurut Luhmann, globalisasi dan modernisasi itu sangat dekat hubungannya

sehingga membicarakan globalisasi dunia, orang tidak bisa lupa membicarakan semakin modernnya dunia. Modernisasi dunia, kata Luhmann merupakan akibat signifikan dari westernisasi yang digelar oleh negara-negara kapitalis, sekalipun membawa problem sendiri seperti adanya perbedaan negara dan integrasinya. Dengan demikian, yang dibutuhkan dalam transformasi masyarakat adalah perlunya jaringan komunikasi yang memadai dan berlangsung terus-menerus. Hal terpenting lain dari globalisasi sebenarnya adalah adanya norma-norma dan pelajaran yang bisa diambil sebagai sebuah pengetahuan sehingga memungkinkan adanya transformasi masyarakat agraris menuju masyarakat industrial. Namun, sebagaimana para pengkaji lainnya, Niklas Luhmann juga berpelehan bahwa apa yang menjadi simbol dari sistem ekonomi dan politik dunia serta

© Institute for Research and Empowerment (IRE) Yogyakarta 2008

#### 60 Zuly Qodir

kebudayaan tidaklah dengan gampang dapat diadopsi, terutama oleh negaranegara yang tergolong pinggiran. Namun demikian, Luhmann juga percaya bahwa sistem ekonomi politik dunia yang menekankan perbedaan tegas antara masyarakat dan individu, hanya akan dipudarkan oleh komunikasi yang berjalan secara terus-menerus, sehingga hampir bisa dipastikan tidak akan ada lagi sistem budaya yang monolit karena sentuhan-sentuhan globalisasi yang secara perlahan terus mengendusnya, sekalipun kadang tidak terasa.

#### **D. Neoliberalisme : kolonisasi ekonomi dan politik**

Neoliberalisme merupakan istilah yang belakangan ramai diperdebatkan. Neoliberalisme merupakan kelanjutan dari liberalisme ekonomi yang berlandaskan pada penjajahan non fisik pada negara-negara di selatan, utamanya oleh negaranegara di utara. Negara-negara di selatan adalah negara penghutang, sementara negara di utara adalah pemberi utang.

Prinsip utama neoliberalisme adalah privatisasi, kebebasan perdagangan, persaingan bebas dan pengurangan subsidi untuk hal-hal yang sifatnya publik, seperti subsidi untuk sekolah yang dikelola negara, pengurangan subsidi rumah sakit yang dikelola negara (pemerintah), privatisasi BUMN menjadi milik swasta (bebas) sehingga mendapatkan keuntungan yang besar dan seterusnya.

Prinsip politik ekonomi neoliberalisme awalnya adalah dari prinsip liberalisme ekonomi dan politik liberal sejak zaman Jeremi Bentham di Eropa pada abad 18. Isinya adalah mendoktrinkan keinginan adanya kemakmuran dan kesejahteraan untuk seluruh warga negara, sehingga tidak boleh ada monopoli badan usaha atau kepemilikan pada sekelompok orang yang akan merugikan masyarakat. Namun, khutbah kaum liberal ternyata tidak bisa terbukti, bahkan dengan liberalisme ekonomi dan politik yang terjadi adalah adanya penumpukan kekayaan pada sekelompok orang atau negara atas negara lainnya. Kesejahteraan dan kemakmuran yang dijanjikan pun tidak pernah terjadi, sebab yang terjadi adalah pembengkakan pengangguran akibat lapangan kerja yang sulit didapatkan, kemiskinan meningkat karena prinsip pembagian kekayaan tidak terjadi, dan kemerosotan pendidikan masyarakat yang meningkat tajam.

Prinsip neoliberalisme yang sama dengan liberalisme ekonomi sebenarnya tidak memberikan rasa aman bagi masyarakat untuk mampu mengakses sumber-sumber ekonomi didalam negaranya sekaligus di dunia, sebab kontrol ekonomi dunia dan negara ternyata berada di tangan negara-negara kaya pemberi utang. Akses ekonomi masyarakat akan semakin rendah karena dibukanya peluang perebutan pasar bebas yang demikian kuat sehingga siapa saja yang memiliki basis ekonomi kuat sudah bisa dipastikan akan mampu menguasai perekonomian negara dan dunia.

© Institute for Research and Empowerment (IRE) Yogyakarta 2008

#### PENGALAMAN mUHAMMADIYAH 61

Dampak paling jelas dari kebijakan liberalisme (neoliberalisme) ekonomi dan politik adalah ukuran keberhasilan negara, dihitung dengan makin terbukanya keterlibatan masyarakat dunia dalam hal urusan kenegaraan. Sebagai contoh adalah keterlibatan negara-negara lain dalam pemilu, sebagaimana yang terjadi di Indonesia pada dua pemilunya, tahun 1999 dan 2004, yang dianggap cukup berhasil sehingga pemerintah AS, Inggris, Australia dan Singapura kemudian memberikan ucapan selamat pada presiden terpilih tatkala itu.

Dalam bidang ekonomi, penjualan aset ekonomi negara yang berada di bawah

BUMN, seperti Indosat, Telkomsel, dan beberapa usaha perbankan, diupayakan dijual kepada swasta sehingga tidak ada lagi kepemilikan negara atas aset-aset nasional. Kebijakan swastanisasi BUMN adalah bukti konkret proyek neoliberalisme ekonomi dan politik dunia yang sekarang tengah marak di Indonesia. Yang terjadi kemudian adalah masuknya perusahaan-perusahaan asing TNCs ke Indonesia dengan sempurna, seperti Shell yang menyaingi Pertamina, Danone, dan perusahaan asing lainnya.

Apa yang menjadi dasar dari neoliberalisme adalah klaim yang didadahkan (dikutbahkan) oleh rezim pendukung globalisasi, baik para intelektual maupun rezim politik-ekonomi negara kaya dan pemberi utang, seperti Amerika, Jepang, Jerman, Inggris, Australia, Singapura, Cina dan negara-negara Skandinavia semacam Denmark, Canada, Norwegia dan Swedia.

Ada lima dalil kutbah utama para penganjur globalisme di dunia. Dalil pertama adalah: liberalisasi dan integrasi pasar; kedua, globalisme suatu yang tidak tertolak dan terbantahkan (terbalikkan-mundur kembali); ketiga, globalisasi tidak akan terkendalikan dan terkontrol oleh siapaun; keempat, globalisasi akan menguntungkan semua orang; dan kelima, globalisasi akan membawa iklim demokrasi ke seluruh dunia.

Kita lihat secara ringkas dalil-dalil dari lima klaim globalisasi yang mendasari neo-liberalisme dunia saat ini, karena kita butuh sebuah perspektif dan gerakan yang efektif jika hendak menghadapi globalisasi dan neo-liberalisme yang sejatinya sangat mengerikan kehidupan banyak orang dan menguntungkan sedikit saja.

**Pertama;** liberalisasi dan integrasi pasar. Cita-cita utama pasar bebas yang akan bekerja secara otomatis (*self-regulating*) adalah bagian yang secara normatif menjadi dasar dari globalisasi. Fungsi utama pasar bebas (yang didalamnya membayangkan adanya efisiensi, rasionalitas dan kemakmuran serta kemajuan untuk meningkatkan integrasi sosial dan kemakmuran-kemajuan material), hanya dapat diwujudkan dalam masyarakat demokratis yang menghargai dan melindungi kebebasan individu. Para penganjur neoliberalisme dan globalisasi menuntut adanya "liberalisasi pasar" yakni deregulasi perekonomian nasional. Dikatakannya,

© Institute for Research and Empowerment (IRE) Yogyakarta 2008

62 Zuly Qodir

pandangan semacam itu tidak hanya akan memunculkan pasar global yang teintegrasi, namun sekaligus akan melahirkan kebebasan politik yang lebih besar bagi semua warga dunia. Tatanan ekonomi yang memberikan kebebasan ekonomi secara langsung yakni kapitalisme kompetitif, juga akan mendorong kebebasan politik sebab ia akan memisahkan kekuatan ekonomi dan kekuasaan politik sehingga memungkinkan terjadinya keseimbangan antara keduanya" (Steger, 2006: 81)

Dengan pandangan seperti itu, masyarakat, oleh penganjur globalisasi dan neoliberalisme, harus bersikap menerimanya. Kita lihat anjuran mereka:

"Gagasan pendorong dibalik globalisasi adalah kapitalisme pasar bebas. Semakin Anda biarkan kekuatan pasar untuk berkuasa dan semakin Anda membuka perekonomian Anda pada kompetisi dan perdagangan bebas, maka akan semakin efisien ekonomi Anda. Globalisasi berarti penyebaran kapitalisme pasar bebas ke semua negara di dunia. Karena itu, globalisasi juga memiliki perangkat saluran ekonominya sendiri, aturan-aturan seputar pembukaan, deregulasi, dan privatisasi perekonomian, untuk menjadikannya lebih kompetitif dan menarik bagi investor asing" (Steger, 2006: 84).

Dengan segala instrumen yang dimainkan, melalui *hardware* dan *software* pasar bebas, maka tidak ayal lagi globalisasi yang saling berkelindan dengan neoliberalisme ekonomi dan politik akan memenangi sejarah manusia dalam era yang disebut kapitalisme pasar bebas. Globalisasi akan menciptakan pasar bebas yang tunggal sebagai pakaian ekonomi-politik yang menentukan dalam era globalisasi. Itulah kutbah yang sangat membius sebagian pemimpin negara-negara penghutang seperti Indonesia, yang pemimpinnya tidak memiliki ketegasan sikap atas utang luar negeri dan penjajahan pasar global.

**Kedua,** globalisme sesuatu yang tidak akan tertolak dan mundur kembali.

Menurut para penganjur globalisasi dan liberalisme ekonomi, globalisasi merupakan refleksi atas penyebaran kekuatan pasar yang tidak bisa dibendung, yang dikendalikan oleh inovasi teknologi, dan yang menjadikan integrasi pasar perekonomian nasional menjadi tak terelakkan. Globalisasi selalu terkait dengan kekuatan atas kepercayaan pada kemampuan pasar dalam memanfaatkan teknologi baru untuk menyelesaikan persoalan sosial secara lebih baik dibandingkan sumber-sumber

alternatif lainnya. Pemerintah, partai politik, dan gerakan sosial tidak punya pilihan lain kecuali “menyesuaikan” dengan ketakterelakkan globalisasi” (Steger, 2006: 91).

Kita lihat betapa kuatnya desakan para pendukung globalisasi dan liberalisasi ekonomi dunia. Pernyataan mantan Presiden AS, Bill Clinton misalnya:

“Saat ini kita harus menerima logika tak terelakkan globalisasi. Bahwa segala hal, dari kekuatan perekonomian kita sampai keamanan kota-kota kita, hingga kesehatan rakyat kita, tidak hanya tergantung pada peristiwa-peristiwa di negeri kita, tetapi juga peristiwa yang terjadi jauh di belahan dunia lain. Globalisasi adalah sesuatu yang tidak bisa dibendung. Proteksionisme hanya akan membuat segala sesuatu kian memburuk. Globalisasi adalah elemen kehidupan kita yang tidak bisa dielakkan. Tidak seperti kita mencegah ombak membentur pantai. Globalisasi tidak lagi bisa dihentikan. Argument yang mendukung liberalisasi perdagangan dan pasar terbuka sangat kuat dan dibuat oleh banyak orang  
© Institute for Research and Empowerment (IRE) Yogyakarta 2008

### **PENGALAMAN mUHAMMADIYAH 63**

diantara kita, dan kita tidak boleh takut untuk berhadapan dengan mereka yang tidak sependapat” (Stiger, 2006: 92).

Elit-elit pendukung neoliberal di Negara-negara Barat dan non Barat terus menggemakan slogan kelompok globalis, dengan menyatakan bahwa negara manapun membutuhkan apa yang dinamakan liberalisasi dan deregulasi perekonomian. Mereka akan selalu menyatakan tidak ada pilihan lain dengan globalisasi dan liberalisasi ekonomi dunia. Dari India, Pilipina dan seterusnya selalu berkeyakinan demikian atas globalisasi.

Keyakinan seperti itu membuat para pendukung globalisme mudah mendapatkan pembenaran di tanah air masing-masing dan negara-negara yang sebelumnya tidak mendukung bahkan terdapat potensi pembangkangan. Untuk melancarkan kampanye tentang globalisasi, kelompok pendukung globalisasi mengkampanyekan wacana yang bersifat menetralsisir penentangan anti globalisasi dengan mendepolitisasi wacana globalisasi. Pernyataan yang paling populer adalah bahwa kebijakan neoliberal adalah kebijakan yang melampaui politik, sebab ia hanya menjalankan apa yang ditakdirkan oleh alam (Steger, 2006: 94).

Kita lihat pernyataan paling sensasional para pendukung globalisasi Thomas Friedman, seperti berikut dibawah ini:

“Dan itulah sebabnya kenapa Amerika bukanlah sekedar sebuah negara. Ia adalah nilai spiritual dan model... Dan itulah alasan kenapa saya teramat sangat percaya bahwa agar globalisasi bisa berlangsung, Amerika harus tetap menjadi yang terbaik, hari ini, esok, dan sepanjang masa. Ia tidak hanya bisa, tetapi harus menjadi inspirasi bagi seluruh dunia” (Steger, 2006: 98).

Argumen-argumen diatas dengan jelas memberikan petunjuk bahwa globalisasi dan liberalisasi ekonomi dibawah payung globalisme dan neoliberalisme merupakan sesuatu yang sedang dikampanyekan secara masif oleh para pendukung globalisme di dunia. Tujuannya, agar negara-negara lainnya, yang awalnya menolak sekalipun, terus mendukung, sebab hanya mendukunglah yang dianggap memberikan keuntungan.

**Ketiga**, globalisasi tidak akan terkontrol dan terkendalkan secara perseorangan. Para pendukung globalisasi akan memberikan pandangan yang sangat jelas tentang sikapnya pada globalisasi. Misalnya, Robert Hormats, pimpinan Goldman Sach International, berpendapat, “...keindahan luar biasa dari globalisasi adalah bahwa ia tidak terkendalkan oleh perseorangan, pemerintah atau lembaga manapun”. Bahkan, Thomas Friedman, seorang globalis murni lainnya menyatakan dengan sinis tatkala Mahathir Mohammad menyatakan akan melawan globalisasi yang membuat krisis keuangan di Asia, termasuk Malaysia, Indonesia dan Thaliand.

Demikian kata Friemdan:

© Institute for Research and Empowerment (IRE) Yogyakarta 2008

### **64 Zuly Qodir**

“Ah, mohon maaf, Mahathir, tapi di planet mana Anda tinggal? Anda bicara tentang partisipasi dalam globalisasi seolah pilihan yang Anda miliki. Globalisasi bukanlah pilihan. Ia adalah kenyataan... dan landasan utama globalisasi adalah tak seorang pun memegang kendali... kita semua ingin mempercayai bahwa seseorang memegang kendali dan bertanggung jawab (atas globalisasi). Namun ruang pasar global saat ini adalah grup elektronik yang acapkali dibentuk oleh para pedagang valuta, obligasi, maupun saham yang anonim serta inverstor multinasional, yang dihubungkan melalui layar (komputer) dan jaringan” (Steger, 2006: 102).

Dengan menggunakan dukungan negara-negara kuat di belahan Utara, lembaga-lembaga internasional semacam IMF, WTO dan Bank Dunia, sebagai para pengusung globalisme, mendulang keuntungan yang maha dahsyat. Kebijakan yang dikeluarkan oleh mereka sering kita kenal dengan sebutan “Konsensus Washington” sejak tahun 1970-an hingga sekarang. Ada sekurang-kurangnya sepuluh prinsip

“Konsensus Washington” yang harus dijalankan oleh negara-negara penghutang di dunia:

1. Menjamin disiplin fiskal, dan mengendalikan defisit anggaran.
2. Mengurangi pengeluaran publik, khususnya militer dan administrasi publik.
3. Reformasi pajak, dengan basis yang efektif dan lebih luas.
4. Liberalisasi keuangan, dengan tingkat bunga yang ditentukan pasar.
5. Nilai tukar mata uang kompetitif, untuk membantu ekspor.
6. Liberalisasi perdagangan, disertai dengan penghapusan ijin impor dan pengurangan tarif.
7. Mendorong investasi asing langsung.
8. Privatisasi BUMN, demi manajemen yang efisien dan kinerja yang lebih baik.
9. Deregulasi ekonomi.
10. Perlindungan atas hak cipta (*property rights*).

Dengan argumen bahwa tidak ada pemimpin yang mampu mengendalikan globalisasi, sebenarnya bisa dikatakan bahwa AS ingin menempatkan diri sebagai satu-satunya pemimpin dunia yang hendak memperluas hegemoninya. AS dengan keangkuhannya hendak menjadi polisi dunia dan penguasa tatanan ekonomi-politik dunia tanpa pesaing sama sekali, sehingga apa yang dikampanyekan dengan lancar diterima oleh belahan dunia lainnya.

**Keempat**, globalisasi akan menguntungkan semua orang. Dalil ini memberikan gambaran kepada kita agar semua orang mengafirmasi kampanye dahsyat globalisasi yang dibawa AS dan sekutunya ke belahan dunia lainnya. Kita simak hasil pertemuan negara-negara maju di Lyon Perancis pada tahun 1996 yang merupakan kampanye negara-negara penyokong globalisasi, yang menyatakan bahwa:

© Institute for Research and Empowerment (IRE) Yogyakarta 2008

#### PENGALAMAN MUHAMMADIYAH 65

“Pertumbuhan dan kemajuan ekonomi dunia yang interdependen dewasa ini berkaitan erat dengan proses globalisasi. Globalisasi memberikan peluang yang sangat besar bagi masyarakat di masa depan, tidak hanya bagi negara kita, tetapi juga negara lain. Aspek-aspek positifnya meliputi ekspansi intervensi dan perdagangan yang belum pernah terjadi sebelumnya: pembukaan perdagangan internasional di wilayah paling padat dan berbagai peluang bagi banyak negara berkembang untuk memperbaiki standar hidupnya; penyebaran informasi yang kian cepat, inovasi teknologi, dan menjamurnya lapangan pekerjaan dengan tenaga yang terlatih. Karakter globalisasi ini telah melahirkan perluasan kekayaan dan kemakmuran luar biasa di dunia. Karena itu, kami yakin bahwa proses globalisasi adalah sumber harapan bagi masa depan” (Stiger, 2006: 110).

Kita kutip kembali pendapat pendukung globalisasi, George David, CEO United Technology, dengan menyatakan perlunya menjamin berlanjutnya keberhasilan agenda global ini. Demikian pernyataan David:

“Kita tengah berada pada masa paling optimistik: batas-batas antar bangsa telah menyusut, liberalisme ekonomi sedang diberlakukan dan terbukti masuk akal, perdagangan dan investasi merebak, keseimbangan penempatan antar bangsa menyempit, dan generasi yang makmur secara global tercatat pada tingkatan yang tinggi, dan saya percaya hal ini akan berlangsung terus” (Stiger, 2006: 111).

Itulah dalil keempat yang dirintis dan dikampanyekan kaum globalis agar dunia mengikutinya. Namun tidak satupun dapat membuktikan jika “janji-janji” globalisasi itu memang untuk masyarakat luas, sehingga perlu dipertanyakan dimanakah sisi masuk akal nya globalisasi ekonomi dan politik.

**Kelima**, globalisasi akan membawa iklim demokrasi ke seluruh dunia. Ini dalil kelima yang menjadikan dunia semakin hiruk pikuk dengan globalisasi dan liberalisasi ekonomi dibawah komando Amerika. Klaim kaum globalis atas globalisasi dan neoliberalisme adalah bahwa pasar bebas dan demokrasi adalah istilah yang sinonim. Francis Fukuyama, seorang penasehat kepresidenan AS menyatakan adanya korelasi positif antara perkembangan ekonomi suatu negara dengan demokrasi. Semakin makmur sebuah negara, maka semakin demokratislah negara tersebut. Fukuyama melanjutkan kutbahnya dengan mengatakan:

“Tingkat perkembangan ekonomi yang dihasilkan globalisasi sangat kondusif bagi terciptanya masyarakat sipil dan kelas menengah yang kuat. Kelas menengah yang kuat dan struktur masyarakat inilah yang akan mendorong demokrasi” (Stiger, 2006: 122).

Untuk meyakinkan negara-negara lainnya, AS melalui Direktur Jendral WTO, Mikie Moore menyatakan bahwa organisasinya adalah organisasi yang mendorong terjadinya proses demokrasi fundamental, sebab di dalamnya terjadi konsensus yang merepresentasikan demokrasi dengan cara mengungkapkan opini mereka secara bebas mengenai segala persoalan perdagangan internasional. Namun

yang harus diingat adalah bahwa konsensus dalam WTO senantiasa dikendalikan oleh negara-negara kuat seperti AS, Jepang, Uni Eropa, dan Kanada. Keputusan diambil secara informal melalui kaukus oligarkis bentukan-bentukan perusahaan dagang raksasa yang ada dalam koridor organisasi dagang dunia dalam negosiasi© Institute for Research and Empowerment (IRE) Yogyakarta 2008

66 Zuly Qodir

negosiasi “rahasia” selama pertemuan tingkat menteri WTO, termasuk pertemuan Singapura.

### **E. Dampak Globalisasi dan Neoliberalisme**

Dampak dari globalisasi dan neoliberalisme adalah keterbukaan dalam semua bidang, tidak ada lagi batas-batas nasional yang jelas. Segi positifnya, informasi dengan gampang mudah kita terima akibat jaringan telekomunikasi yang mendunia. Peristiwa yang terjadi di negara lain dengan mudah kita saksikan pada saat yang hampir bersamaan. Dalam hal kebudayaan, hampir tidak bisa dibedakan secara tegas mana kebudayaan nasional dengan kebudayaan asing, semuanya hampir menyatu, pola makan pun demikian, konsumsi juga begitu. Ini yang membuat era globalisasi menjadikan orang semakin berada dalam batas yang tidak jelas. Sementara itu, neoliberalisme sebagaimana dijelaskan di atas, hadir dalam bentuk swastanisasi, privatisasi, dan pengurangan subsidi. Dari bentuk-bentuk yang muncul ini, justru yang terlihat lebih jelas adalah dampak negatifnya. Dampak negatif juga menjadi lebih nyata dengan pembukaan jalur perdagangan bebas, dimana tidak ada lagi pembatasan jalur perdagangan, berdasarkan sebagaimana termaktub dalam GATT (*General Agreement on Tariff and Trade*). Dari sana, kemungkinan kesejahteraan bagi semua rakyat adalah omong kosong, sebab demokrasi ekonomi sama artinya dengan perdagangan bebas yang menjadi sandaran sistem ekonomi pasar.

Berkembangnya globalisasi yang demikian masif, sejak tahun 1960-an, sekalipun menjadi sangat kentara sejak tahun 1970-an dan 1980-an, ada banyak dampak yang sesungguhnya sangat mengerikan, terutama untuk negara-negara di selatan, sebagai negara yang sebagian besar dikategorikan miskin dan sekaligus penghutang atas negara-negara kaya. Tetapi, dampak munculnya penghutang-penghutang baru negara miskin, tenaga kerja yang melimpah ruah karena proses imigrasi internasional, kemiskinan yang melanda negara-negara Selatan, serta unifikasi nilai tukar internasional, jarang diperhitungkan atau kurang mendapatkan perhatian serius dari negara.

Kita lihat betapa mengerikannya dampak dari globalisasi yang menimpa negaranegara selatan dalam bidang ekonomi, seperti dilaporkan Paul Hirst dan Grahame Thompson. Ada beberapa aspek yang paling kentara dari dampak globalisasi, yakni munculnya kekuatan baru perusahaan multinasional (MNCs), perusahaan transnasional (TNCs) dan bisnis internasional; perkembangan perdagangan internasional dan integrasi internasional (penyatuan-penyatuan mata uang internasional dan bisnis internasional); pertumbuhan dan membludaknya imigrasi internasional dan pasar tenaga kerja internasional; terjadinya keterbukaan dan

© Institute for Research and Empowerment (IRE) Yogyakarta 2008

### **PENGALAMAN MUHAMMADIYAH 67**

interdependensi sistem internasional; dan terjadinya sistem moneter dan mata uang internasional (Hirst dan Thompson, 2001: 32-50).

Memperhatikan apa yang menjadi dampak dari globalisasi ekonomi di atas kita akan dapat memberikan penjelasan lebih lanjut tentang hal itu dalam tiga masalah terbesar yang melanda negara-negara di kawasan Selatan. Pertama, terjadinya keterbukaan dan interdependensi internasional dewasa ini bukanlah hal yang baru, kita sekarang masuk dalam kawasan ekonomi baru internasional. Kedua, mekanisme pengendalian ekonomi internasional telah terjadi sejak lama, dalam bentuk yang lain. Ketiga, terjadinya reorganisasi ekonomi yang baru dalam tatanan global perekonomian dunia; dan terakhir, telah terjadinya rezim *governance* ekonomi internasional di bawah kekuasaan Amerika dan negara-negara kaya atas negara-negara miskin di kawasan Selatan, seperti Indonesia di Asia Tenggara dan negara-negara Asia Selatan.

### **F. The New Social Movement**

Gerakan Sosial Baru –GSB- atau *the New Social Movement* merupakan citra

cermin sebuah masyarakat baru yang menandakan adanya kebutuhan akan sebuah paradigma baru tentang aksi kolektif, sebuah model kebudayaan alternatif dalam masyarakat, dan sebuah kesadaran baru dari gerakan-gerakan komunitas dalam masyarakat untuk masa depan. GSB bisa direfleksikan sebagai model pemberontakan kultural kontemporer yang menentang meningkatnya mekanisme sistem kontrol dan pengawasan oleh negara terhadap masyarakat di satu pihak. Di pihak lain, GSB sebanding dengan peningkatan realisasi dan kepercayaan diri masyarakat yang (tidak mesti) menempatkan nasib kemanusiaan di tangan negara. GSB sebagai lokomotif perubahan tetap waspada terhadap penyakit-penyakit dari sistem politiknya. Agensi-agensi pelaku-pelaku sejarah dalam GSB adalah energi yang mempunyai kemampuan mengubah medan gerakan dan transformasinya. Rajendra Sikh, seorang sosiolog India, memberikan gambaran apa yang menjadi aspek dari *the New Sosial Movement (NSM)*. Kata Rajendra, GSB terdiri tiga hal utama. *Pertama*, kebanyakan menaruh perhatian konsepsi ideologis mereka pada asumsi bahwa masyarakat sipil telah digerogoti oleh kemampuan kontrol negara. Negara berkolaborasi dengan kekuatan pasar yang masuk dalam seluruh wilayah kehidupan manusia dalam negara. Oleh karena itu, GSB mengintrodusir perlunya pertahanan diri komunitas dan masyarakat untuk melawan menguatnya mekanisme kontrol Negara dan pasar.

Kedua, secara radikal mengubah paradigma Marxis yang menjelaskan konflik dan kontradiksi dalam istilah kelas dan konflik kelas. Perjuangan melawan rasisme, feminisme, environmentalism, dan pelucutan senjata adalah perjuangan yang

© Institute for Research and Empowerment (IRE) Yogyakarta 2008

68 Zuly Qodir

dilakukan oleh GSB, tetapi tidak termasuk dalam kategori perjuangan kelas. Oleh karena itu, perjuangan kelas dalam maknanya yang konvensional tidak lagi memadai dalam konteks GSB. Metode dan artikulasi gerakannya berbeda dengan asumsi kelas dalam representasi Marxis. Arah gerakannya adalah aspek kemanusiaan, bukan lagi melulu masalah politik kebangsaan.

Ketiga, latar belakang kelas dan identitas aktor atau penopang aktor tidak terpaku pada gerakan pengorganisasian kelas buruh industri dan politik kepartaian, tetapi mereka melahirkan asosiasi demokrasi secara organisasional yang melibatkan kelompok-kelompok kecil dalam masyarakat akar rumput, memprakarsai gerakangerakan kelompok kecil, membidik isu-isu local dengan institusi yang terbatas (Sikh, 19-21).

Sementara, Jean Cohen, seorang ilmuwan politik Perancis, memberikan batasanbatasan bahwa gerakan-gerakan sosial baru memiliki dasar empat pengertian utama. *Pertama*, umumnya aktor-aktor GSB tidak berjuang demi kembalinya komunitas-komunitas utopia dimasa lalu. *Kedua*, aktor-aktor berjuang untuk otonomi, pluralitas, dan kepelbagaian, tanpa menolak partai politik, prinsip egaliter, demokrasi, parlemen dan hukum. *Ketiga*, para aktor melakukan upaya sadar untuk belajar dari pengalaman masa lalu untuk merelatifkan nilai-nilai mereka melalui pengalaman. *Keempat*, para aktor mempertimbangkan keberadaan formal negara dan ekonomi pasar (Cohen, 1985: 669).

Sementara, bila kita hendak mengikuti An Swidler, seorang sosiolog Jerman, dia mengintorusrir bahwa GSB harus diperhatikan dalam tiga level utama. *Pertama*, level konteks dimana dan kapan dia muncul. *Kedua*, level simbolik yang mampu menjelaskan apa yang menjadi gerakannya. *Ketiga*, level organisasi, seperti apakah bentuk organisasinya, voluntarisme, dan strukturnya. Ketiganya harus dibaca dalam kesatuan *cultural power* yang memberikan penekanan pada adanya kontinuitas gerakan dan kesimbungan actor penggerakannya. (Swidler, 324-332)

Memperhatikan karakteristik yang demikian, maka melihat GSB sudah seharusnya dalam perspektif yang baru, yakni perspektif yang mempertautkan antara kepentingan gerakan komunitas dengan gerakan negara dan pasar di pihak lain. Studi tentang GSB dengan demikian harus memperhatikan secara cermat tentang masyarakat dan aksi masyarakat yang dilakukannya dalam konteks kehidupan sosial, aksi sosial dalam menentang egara dan kebijakan negara terkait dengan kebijakan yang mengabaikan dimensi keamanan manusia dan kemanusiaan, menentang persenjataan, mendukung gerakan ekologi, mendukung kebebasan individu dan komunitas, mendukung warisan cultural, identitas dan gender.

### G. Pengalaman Muhammadiyah

Sebagai ormas Islam yang besar bersama NU, Muhammadiyah di Indonesia posisinya memang cukup strategis untuk membuat gerakan sekaligus untuk menjadi basis legitimasi atas kampanye apa saja, termasuk kampanye untuk globalisasi dan neoliberalisme. Oleh karena itu, sadar akan posisi tersebut, lembaga-lembaga asing seperti UNDP, The Asia Foundation, Ford Foundation, Partnersip, Bank Dunia, British Council, American Embassy, dan AusAid, dan beberapa lainnya sangat memberikan perhatian pada Muhammadiyah di Indonesia.

Memang perhatian agak berlebihan pada Muhammadiyah baru berjalan kira-kira lima tahun yang lalu, sekalipun telah beberapa kali dicoba terutama paska reformasi 1998. Namun, kira-kira sejak tahun 2002 yang lalu, lembaga-lembaga donor internasional tersebut di atas benar-benar merasuk masuk dalam tubuh Muhammadiyah. Dengan pelbagai program yang ditawarkan kepada Muhammadiyah, dengan variasi program dan mempertimbangkan kondisi sosial kultural masyarakat Muhammadiyah, perlahan namun pasti, sekarang Muhammadiyah benar-benar menjadi bagian tak terpisahkan dari para *funding agency*.

Apakah itu berarti Muhammadiyah telah tercerabut kemandiriannya dalam berswasembada dan swadesi (jika mengikuti pola Mahatma Gandhi), ada dua jawaban yang dapat saya kemukakan. Pertama, Muhammadiyah belum secara radikal “terjual” pada *funding agency*, sehingga semua program dari *funding agency* diterima dengan terbuka dan senang hati. Kedua, Muhammadiyah secara perlahan-lahan baik disadari ataupun tidak sejatinya telah menjadi bagian dari kampanye para pendukung kelompok globalis dan neo-liberalis yang berada dibalik layar, sebab *funding agency* bergerak melalui lembaga-lembaga *charity* dan bahkan filantropi yang tampaknya menyangga pilar kemanusiaan di muka bumi. Program-program *civil society*, *clean government*, *good governance*, transparansi, *civic education* dan HAM adalah program-program yang dikemas oleh para *funding agency* yang sangat sering ditawarkan pada Muhammadiyah, setelah sejak tahun 2002, mulai “bercerai” atau pisah ranjang dengan NU yang telah lebih dahulu menikmati proyek globalisasi dan neoliberalisme di Indonesia.

Muktamar Muhammadiyah ke-45 di Malang Jawa Timur bisa disebut sebagai puncaknya Muhammadiyah melakukan “bulan madu” dengan kelompok pendukung globalisasi dan neoliberalisme, yang ditandai dengan ditenderkannya penyusunan *Strategic Planning* kepada salah seorang ahli yang menjadi konsultan dari sebuah lembaga donor internasional, dengan membayar yang sangat mahal, berkisar antara 200-300 juta, seorang konsultan program dari sebuah lembaga donor internasional didatangkan untuk memberikan gambaran dan memandu program

#### 70 Zuly Qodir

yang hendak disusun oleh Muhammadiyah sampai 30 tahun mendatang, sejak tahun 2005 yang lalu.

Tentu saja seorang konsultan lembaga internasional bekerja secara profesional memandu penyusunan program Muhammadiyah, tetapi apakah orang-orang Muhammadiyah kemudian dapat menjalankan apa yang menjadi rancangan programnya selama 30 tahun ke depan? Menjadi persoalan serius, sebab banyak program yang sebetulnya tidak sesuai dengan kondisi riil Muhammadiyah di Indonesia.

Persoalan berikutnya, jika hal ini dianggap sebagai persoalan serius adalah dengan mentenderkan *Strategic Planning* kepada seorang konsultan donor internasional yang berada dibalik kampanye globalisasi dan neoliberalisme maka dengan sendirinya seluruh program akan dengan mudah diarahkan untuk mendukung kampanye terselubung gerakan globalisme dan neoliberalisme yang mendukung pasar bebas, selain juga donor dengan demikian mengerti apa yang akan menjadi program Muhammadiyah.

Sebenarnya penyusunan program Muhammadiyah sampai tahun 2030 mendatang bukan sesuatu yang mustahil dilaksanakan dengan mengundang seorang aktivis atau ahli dari Muhammadiyah sendiri. Muhammadiyah saya ketahui

memiliki banyak ahli dalam bidang *strategic planning*, ahli dalam bidang politik, ekonomi, budaya bahkan agama adalah gudangnya, dengan kepahaman yang jauh lebih mendalam tentang Muhammadiyah sendiri, ketimbang konsultan asing yang bekerja untuk donor. Tetapi pertanyaannya, mengapa Muhammadiyah memutuskan untuk menggunakan konsultan asing dari sebuah lembaga donor internasional adalah pertanyaan penting dalam konteks gerakan globalisasi dan neoliberalisme untuk kita menempatkan Muhammadiyah dalam bagian dari gerakan sosial baru di Indonesia.

Dengan segudang ahli yang dimiliki Muhammadiyah, apakah dari semuanya dianggap tidak ada yang sanggup membuat *strategic planning* atau karena jika mempergunakan ahli dari Muhammadiyah sendiri secara otomatis berarti program harus dibiayai sendiri, dan mencari peluang-peluang pembiayaannya sendiri karena tidak diketahui secara langsung oleh donor (*funding agency*)? Ataukah pemakaian konsultan dari lembaga donor internasional merupakan “pesanan” dari orang-orang Muhammadiyah sendiri yang bekerja untuk mereka atau sekurang-kurangnya adanya tawaran-tawaran dan janji-janji dari lembaga asing untuk membiayai seluruh aktivitas Muhammadiyah dengan syarat mempergunakan konsultan asing dalam penyusunan *Strategic Planning*.

Jika dua hal ini yang memang menjadi basis argumentasi Muhammadiyah, dengan sendirinya memang Muhammadiyah telah secara perlahan-lahan

© Institute for Research and Empowerment (IRE) Yogyakarta 2008

#### PENGALAMAN MUHAMMADIYAH 71

“menyerahkan dirinya” pada gerakan globalisasi dan neo-liberalisme yang secara berhati-hati masuk pada ormas Islam yang diharapkan oleh beberapa kalangan sebagai penyangga civil Islam dan gerakan sosial di masyarakat. Muhammadiyah dengan demikian baik disadari atau tidak telah menjadi bagian dari agen globalisme dan neoliberalisme. Namun yang disayangkan adalah bahwa belakangan, masuknya arus modal ke dalam tubuh Muhammadiyah bukannya mendapatkan perlawanan yang kuat dari ormas Islam pembaru ini, tetapi malahan di lapangan sebagian besar proyek dari pendukung globalisme dan neoliberalisme mendapatkan *affirmative action* untuk terus berjalan di Indonesia tanpa berbasa-basi, dengan dalil bahwa Muhammadiyah akan tetap mandiri, bertahan pada kakinya sendiri dan tidak terkooptasi, secara ideologis maupun secara finansial.

#### H. Bagaimana Mestinya Muhammadiyah

Dengan gambaran singkat di atas, maka ada beberapa hal yang bisa diambil dari Islam (dalam arti pemeluk Islam) baik personal maupun tergabung dalam organisasi sosial kemasyarakatan seperti Muhammadiyah, NU, SI, Persis, sampai dengan organisasi-organisasi mahasiswa Islam, lebih khusus lagi adalah Muhammadiyah.

1. Perlu melakukan kajian serius tentang globalisasi, liberalisme (neoliberalisme) politik dan ekonomi dan the New Sosial Movement (NSM) sehingga ditemukan apa manfaat dan mudharatnya. Hanya dengan proses diskursif yang memadai akan terbangun sebuah konsepsi tentang apa globalisasi, liberalisme-neoliberalisme politik dan ekonomi serta NSM.
2. Sebab globalisasi dan liberalisasi ekonomi-politik sudah merupakan perkembangan yang nyaris *given*, tidak bisa ditolak keberlangsungannya, sehingga yang mungkin bisa dilakukan adalah membangun pendekatan non mainstream sehingga bisa menjadi counter atas adanya hegemoni wacana globalisasi dan liberalisme-neoliberalisme ekonomi dan politik. Pendek kata yang dibutuhkan sekarang adalah adanya *counter hegemony* atas paham globalisasi dan neoliberalisme ekonomi dan politik.
3. *The New Sosial Movement* akan dapat menjadi bagian dari gerakan sipil yang benar-benar mandiri ketika elemen-elemen dalam gerakan sosial tidak lagi bekerja secara sektarian-parokial, apalagi kaplingisasi masalah. Yang harus dibangun dari NSM adalah pembagian peran dan kerja gerakan yang samasama bermuara pada pemberontakan kebudayaan atau pemberontakan struktur dan sistem yang hegemonik di tengah masyarakat, sebab yang akan terabaikan adalah masyarakat kebanyakan yang sering disebut sebagai rakyat jelata atau rakyat biasa, bukan aristokrat.

© Institute for Research and Empowerment (IRE) Yogyakarta 2008

72 Zuly Qodir

4. Umat Islam harus bersatu dalam menyelesaikan masalah-masalah yang ditimbulkan oleh dampak negatif globalisasi dan neoliberalisme ekonomi dan politik seperti kemiskinan umat, kebodohan akibat pendidikan mahal, kesengsaraan akibat masyarakat tidak mampu lagi berobat karena mahalnya biaya berobat akibat kebijakan pengurangan subsidi oleh Negara, semakin banyaknya jenis penyakit menular yang menimpa masyarakat miskin di Indonesia.

5. Umat Islam harus memberikan prioritas pada penanganan masalah-masalah konkret di masyarakat yang menjadi kebutuhan umat, ketimbang mempersoalkan masalah-masalah yang masih *debatable* (seperti penerapan syariat Islam) apalagi menjadikan Indonesia sebagai Negara Islam. Jika dulu NU, Muhammadiyah, SI, Persis bergerak pada level perbaikan masyarakat dari hal-hal syariat, sekarang sudah harus beranjak pada masalah kenegaraan dalam arti merespon kebijakan Negara tentang ekonomi dan politik.

6. Menempatkan posisinya sebagai gerakan moderat yang terus mendukung gerakan Islam moderat di Indonesia. Tidak terjebak dalam arus tarikmenarik pada gerakan Islam radikal, sehingga mampu berdiri sebagai wasit di tengah runyamnya masalah bangsa yang terus menguntitnya. Dengan menempatkan posisinya sebagai gerakan Islam moderat, dengan sendirinya akan menempatkan Muhammadiyah sebagai gerakan masyarakat sipil yang mandiri, tidak terkooptasi oleh kelompok kepentingan khususnya kelompok kepentingan gerakan globalisme dan neoliberalisme yang berada di balik donor-donor internasional atau lembaga internasional.

7. Bila kita hendak mengikuti saran Ziauddin Sardar, maka pola kerja memperbaiki sistem ekonomi politik dunia digambarkan demikian:

a. Di mulai dengan cara pandang dunia (dasar filosofis) atau landasannya yakni epistemologinya yang di dasarkan pada etika syariah Islam, kemudian memiliki turunan-turunan pada bidang:

- Struktur sosial dan politik umat Islam

- Pengembangan Ilmu pengetahuan dan teknologi

b. Pengembangan ekonomi kewirausahaan yang akan menopang kemandirian sebuah negara (masyarakat) dan;

c. Kepekaan terhadap masalah lingkungan.

Jogjakarta, 18 Agustus 2007

© Institute for Research and Empowerment (IRE) Yogyakarta 2008

PENGALAMAN MUHAMMADIYAH 73

## Daftar Pustaka

Beyer, Peter, *Religion and Globalization*, Sage Publication, New Delhi, 1994

B. Steger, Manfred, *Globalisme: Bangkitnya Ideologi Pasar*, Lafald, 2006

Fakih, Mansour, *Sesat Pikir Teori Pembangunan dan Globalisasi*, Pustaka Pelajar, 2001

Hirst, Paul dan Graham Thompson, *Globalisasi adalah Mitos*, Yayasan Obor Indonesia, 2001

Inayatullah Sohail and Gail Boxwell, *Islam, Postmodernism and Other Futures A Ziauddin Sardar Reader*, Pluto Press, London, 2003

Malarangeng, Rizal, *Mendobrak Sentralisme Ekonomi Indonesia 1986-1992*, Gramedia, Jakarta 2002

Sihk, Rajendra, They're the New Sosial Movement, dalam *Sosial Movement, Old dan A New: A Post Modernis Critique*, New Delhi, Sage: 2001)

Swidler, Ann, Cultural Power and Sosial Movement, dalam *Cultural Sociology*, Lyn Blackwell, UK, Spillman, 2002

Tabb, William K, *Tabir Politik Globalisasi*, Lafadl, Yogyakarta, 2003

# LUQMAN

**Wednesday, January 11, 2006**

## **MUHAMMADIYAH DALAM CENGKERAMAN GLOBALISASI**

Persyarikatan yang kita cintai ini, mau tidak mau telah tergerus pula oleh arus globalisasi. Muhammadiyah yang dahulu didirikan sebagai sebuah bentuk perlawanan terhadap kolonialisme dan Kristenisasi, mengalami kemunduran dalam menyikapi perkembangan dunia dalam konteks kekinian. Bentuk perlawanan terhadap globalisasi yang berwujud kolonialisme kala itu kini hanya tinggal kenangan. Kini, Muhammadiyah tengah mengalami kegamangan dalam penyikapannya terhadap globalisasi dikarenakan wajah globalisasi begitu sarwa-jamak yang tidak mudah diterjemahkan kawan atau didefinisikan untuk dilawan. Amal usaha yang banyak dalam segi jumlah tidaklah bisa menjadi alasan karena hal ini cuma merupakan replikasi atau bisa disebut pengulangan dari apa yang dilakukan oleh KH Ahmad Dahlan, bahkan bisa dikatakan menyimpang dari tujuan semula. Penolong Kesengsaraan Oemoem, sebagai semboyan Rumah Sakit Muhammadiyah tidak menemukan makna filosofisnya di Persyarikatan ini. Sekolah yang dibangun pun tidak bisa menampung golongan ekonomi lemah untuk menikmati pendidikan. Seharusnya bisa dimunculkan rumah sakit maupun sekolah alternatif yang dapat menampung ekonomi lemah tersebut sehingga dapat menikmati fasilitas kesehatan dan pendidikan yang sama. Adapun kelak yang menjadi penyangga dari sistem alternatif ini adalah rumah sakit dan sekolah yang telah ada yang memang mengejar kualitas dan fasilitas yang lebih baik untuk golongan ekonomi mampu agar tidak kalah bersaing dengan sekolah negeri, Nasrani, bahkan internasional. Sikap yang tidak jelas terhadap globalisasi malah menempatkan kader-kader Muhammadiyah sebagai agen proyek asing dengan maraknya proyek yang diterima dengan funding (pembiayaan) dari luar negeri. Apologi yang diungkapkan dari kader-kader ini adalah apabila proyek ini tidak diambil maka Muhammadiyah hanya bisa gigit jari karena tidak kebagian. Saya benar-benar heran dengan pernyataan ini, bukankah Muhammadiyah itu dihidupi/ dibiayai oleh warganya sendiri? KH Ahmad

Dahlan dahulu adalah seorang pedagang batik dalam misinya menghidup-hidupi Muhammadiyah secara finansial. Bahkan pernah seorang Pimpinan Pusat Muhammadiyah hanya berprofesi sebagai penjual bensin eceran, toh Muhammadiyah masih tetap eksis sampai sekarang.

Memang tidak sedikit kader Muhammadiyah yang tidak sabar terhadap perkembangan globalisasi, dan dengan cepatnya perkembangan itu Muhammadiyah sudah diminta untuk berlari padahal baru saja bisa berjalan. Ketidak sabaran ini terjadi karena adanya kader-kader karbitan yang tidak mengikuti alur perkaderan Muhammadiyah mulai dari tingkatan paling bawah, atau proses yang dijalani terlalu cepat bahkan tidak bernilai dalam proses perkembangannya sebagai kader Muhammadiyah. Kader-kader seperti ini mudah sekali tergoda oleh cepatnya pertumbuhan yang seharusnya terjadi di Muhammadiyah dan menekan bahkan memaksa menekan kader-kader yang masih idealis bertahan pada prinsip-prinsip dasar ber-Muhammadiyah.

Pertumbuhan cepat yang didanai oleh proyek asing adalah perkembangan semu, yang tidak mengakar dan memberdayakan warga Muhammadiyah. Pola pikir kader Muhammadiyah yang menjadi agen proyek asing seperti inilah yang menyebabkan adanya kesenjangan cukup tajam antara pimpinan pusat dengan warga cabang bahkan ranting. Visi dan misi idealis dan ideologis tereduksi oleh kepentingan pragmatis dan sesaat akan pemenuhan proyek-proyek yang mekanisme finansialnya bukan merupakan ciri khas Persyarikatan Muhammadiyah dengan kemampuan swadainya didanai oleh warganya sendiri. Betapa perubahan di tingkatan struktural Pusat Muhammadiyah tidak begitu memberikan pengaruh yang signifikan pada warga dan Pimpinan Muhammadiyah maupun ortom di tingkatan Ranting menunjukkan bahwa struktural pusat memang tidak mengakar dan asyik-masyuk dengan kepentingan sendiri. Di sini sering terjadi protes keras dari warga Muhammadiyah yang berada di Ranting terhadap Pusat atas inkonsistensi atas Putusan-putusan yang telah dibuat. Hal ini dapat dimaknai wajar dalam sebuah organisasi sebagai mekanisme otokritik, namun amatlah tidak wajar apabila ini berlangsung karena tidak adanya kesamaan visi dan misi yang ideal antara pusat dan ranting. Sehingga bisa kita lihat program kerja yang cuma jadi mimpi dari struktural pusat Muhammadiyah mampu

dilaksanakan dalam konteks lokal oleh Pimpinan-pimpinan Muhammadiyah di daerah, cabang, maupun ranting.

Amal usaha terpusat yang coba diterapkan pun tidak mampu menyentuh struktural bawah Muhammadiyah. Pendirian amal usaha ini lebih memanfaatkan jaringan Muhammadiyah yang telah ada namun tidak memperhatikan potensi dan kearifan lokal di masing-masing struktural bawah Muhammadiyah. Sehingga bisa kita saksikan bahwa amal usaha Muhammadiyah terutama di luar ketiga segmen yakni: pendidikan, kesehatan, panti asuhan; tengah dalam kondisi hidup segan, matipun tak mau.

Kondisi ini diperparah dengan adanya korupsi baik di tingkatan struktural maupun amal usaha Muhammadiyah. Muhammadiyah yang menggembar-gemborkan anti korupsi dengan menggalang aliansi antar umat beragama ternyata begitu keropos. Tidak adanya mekanisme audit independen terhadap struktural maupun amal usaha Muhammadiyah membuat tidak adanya pengawasan keuangan yang ketat terhadap Muhammadiyah. Hal ini tak ayal lagi meningkatkan budaya korupsi di Muhammadiyah sembari turut menyemarakkan korupsi yang terjadi di birokrasi Pemerintah. Hal ini amatlah bertentangan dengan norma agama dan standart profesionalitas organisasi, karena dalam era globalisasi, transparansi dan akuntabilitas merupakan syarat sehatnya sebuah organisasi.

Muhammadiyah memang beradaptasi dengan globalisasi karena ketidakmampuannya untuk melawan hegemoni sistem tersebut. Dalam proses adaptasi ini Muhammadiyah cenderung memihak yang dominan dan banyak materi, seperti yang saya gambarkan di atas. Dengan dalih adaptasi kita akomodasi konsep-konsep yang merugikan Persyarikatan. Kita harus pragmatis, realistis dan perut harus diprioritaskan. Ini bukanlah adaptasi yang kreatif dan autonom.

Apakah Muhammadiyah dapat tegak menghadapi tantangan-tantangan itu dan setia pada prinsip-prinsip pokoknya seperti diamanatkan para pendirinya? Jiwa ksatria pasti menjawab sanggup

\*Ketua Bidang IPTEK Pimpinan Cabang Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Bulaksumur Karangmalang tahun 2005-2006

*posted by YAYAK @ [1:33 AM](#) *

**0 Comments:**

[Post a Comment](#)

Tajdid Muhammadiyah Pada Bidang TI

Ditulis oleh Dr. H. Moh Givi Efgivia, M.Kom

Selasa, 28 Oktober 2008 14:04

**Indeks Artikel**

[Tajdid Muhammadiyah Pada Bidang TI](#)

[Menjawab Tantangan Masa Depan](#)

[TI Sebagai Sarana Berdakwah](#)

[Siap Hadapi Tantangan Global](#)

[Semua Halaman](#)

Halaman 4 dari 4

## **Siap Hadapi Tantangan Global**

Tidak bisa dinafikan bahwa ada sisi lain dari globalisasi yang berdampak tidak menguntungkan bagi umat Islam. Sebab pihak yang diuntungkan adalah yang paling menguasai teknologi dan bermodal besar. Dalam situasi inilah globalisasi muncul dalam bentuk dominasi Barat terhadap negara-negara Timur (Islam). Salah satu faktor yang menyebabkan muncul dan meluasnya radikalisme serta terorisme adalah dominasi tersebut. John L Esposito misalnya, melihat bahwa dominasi Barat terhadap negara-negara Islam menyebabkan umat Islam resisten terhadap peradaban Barat. Celakanya, resistensi tersebut acapkali disertai dengan generalisasi bahwa semua yang berasal dari Barat harus ditolak dan dimusuhi.

Dengan demikian sedikit banyak globalisasi memiliki kontribusi dalam konflik Islam-Barat. Ini bukan berarti kita harus menolak globalisasi, sebab ada nilai-nilai dan produk globalisasi yang bermanfaat bagi kehidupan bersama.

Globalisasi sebagai fenomena tercabutnya ruang dari waktu bukan hanya sebuah keniscayaan yang tidak bisa ditampik, melainkan juga menguntungkan bagi interaksi peradaban seluruh umat manusia. Kemunculannya seiring dengan kemajuan peradaban manusia itu sendiri. Namun globalisasi sebagai sebuah ideologi, dimana liberalisme ekonomi yang menjadi spiritnya, tentu harus diwaspadai.

Yang patut diperhatikan, dunia tanpa batas menuntut kemajuan Muhammadiyah dalam memperbaiki akhlak dan moral. Betapa beratnya tugas dakwah Nasional sebagai bagian umat Islam terbesar dunia-sekaligus dengan beban citra umat dan bangsa terkorup. Namun di tengah pesimisme itu Muhammadiyah harus mampu mendorong Umat Islam Indonesia agar dapat menjadi tauladan bagi umat manusia dan jembatan Barat dengan

Islam.

Dalam konteks dakwah global, Muhammadiyah memiliki kemampuan untuk mengarahkan warganya yang sebagian besar telah mengenyam sarjana S1, S2, dan S3 untuk berpartisipasi mensosialisasikan nilai-nilai Islam moderat dalam kancah pergaulan global. Sesungguhnya mereka (warga Muhammadiyah) telah siap menjadi dai MML (Mandiri dan Multi-Lingual). Mereka berdakwah atas dasar panggilan nurani.

Dengan demikian, kita bisa berharap bahwa umat Islam tidak gampang terseret dalam menghadapi arus globalisasi. Sebagai bagian terbesar dari bangsa Indonesia, umat Islam dengan kemampuannya menggali dan mendayagunakan ajaran agamanya untuk menjawab tantangan globalisasi, justru diharapkan untuk mampu memelopori dan membawa bangsa ini tampil di gelanggang percaturan dan persaingan global tanpa kehilangan jati dirinya sebagai bangsa yang beriman dan bertakwa. Ini sekaligus merupakan upaya konkrit untuk turut mengarahkan aliran arus globalisasi.

Dengan teknologi komunikasi dan informasi dunia memang terasa menjadi sempit dan kecil. Tanpa keimanan kecanggihan produk Iptek tersebut dapat membawa manusia ke sikap sombong dan melupakan Tuhan. Namun dari sudut iman dunia yang terasa kecil itu justru mengugah agar manusia lebih merasa kecil dihadapan Tuhan Yang Maha Pencipta. Tanpa pegangan iman pola kehidupan yang makin mengglobal ini akan mudah membawa orang-orang terombang-ambing, terlenda stress dan keterasingan (alienated). Tetapi dengan keimanan orang akan tangguh menghadapinya karena proses tersebut dipahami sebagai bagian dari sunnatullah yang tak mungkin dihindari.

Pendakwah di zaman ini tidak lagi mapan dengan hanya kebolehan berpidato atau berceramah. Tetapi pendakwah zaman ini adalah penyelidik dan penggerak kepada penyelesaian masalah semasa secara praktis. Ia memerlukan kemahiran dan kebijaksanaan sebagai pendakwah dan sekaligus penyumbang kepada pembinaan tamadun yang dibentuk berasaskan acuan Islam. Artinya dalam posisi ini Muhammadiyah mempunyai kesadaran dan telah menempatkan pada posisi startegis dengan menghadirkan dan mengikutsertakan teknologi informasi sebagai mitranya dalam dakwah amar ma'ruf nahyiu munkar.

Label Muhammadiyah sebagai gerakan tajdid (pembaharuan) bukan isapan jempol belaka, buktinya Muhammadiyah saat ini dan ke depan senantiasa memberi bukti untuk hadir yang terdepan dalam dakwah amar ma'ruf nahyiu munkar kapanpun dan dimanapun. Muhammadiyah harus sadar untuk menjadi pewarna, bukan yang diwarnai pada era globalisasi ini.

Sebab bagaimanapun, global society yang oleh Miriam L Campanella dalam buku *Transition to a Global Society* diartikan sebagai an idealistic cosmopolitan and universal society that includes all the people, living on earth, without regard to cultural and ethical beliefs lambat maupun cepat akhirnya akan menjadi kenyataan.

Kita (muhammadiyah dan umat islam) tidak bisa menutup mata atau bahkan menghindar

dari arus globalisasi ini, arus ini sangat elastis dan menampilkan dua wajah yang berbeda ia bisa sangat kejam menyeret kemanapun kalau kita tak pernah siap untuk menjadi pemain bukan hanya sebagai penonton, namun ia juga bisa berubah menjadi wajah “malaikat” yang membawa kita pada kemajuan.